



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN  
PINJAMAN BERGULIR PNPM MANDIRI PERKOTAAN  
BERDASARKAN TINGKAT KONSUMSI MASYARAKAT  
Studi Kasus: Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Ekonomi**

**ARTININGTYAS  
1006791455**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH  
JAKARTA  
JANUARI 2012**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Desember 2011



(Artiningtyas)

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Artiningtyas**

**NPM : 1006791455**

**Tanda Tangan :** 

**Tanggal : Desember 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Artiningtyas  
NPM : 1006791455  
Program Studi : MPKP  
Judul Tesis : Analisis Tingkat Keberhasilan Pinjaman Bergulir  
PNPM Mandiri Perkotaan Berdasarkan Tingkat Konsumsi Masyarakat. Studi Kasus:  
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing	:	Dr. Sartika Djamaluddin	(.....)
Penguji	:	Arindra A. Zainal, Ph.D	(.....)
Penguji	:	Dr. Aris Yunanto	(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master Ekonomi Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

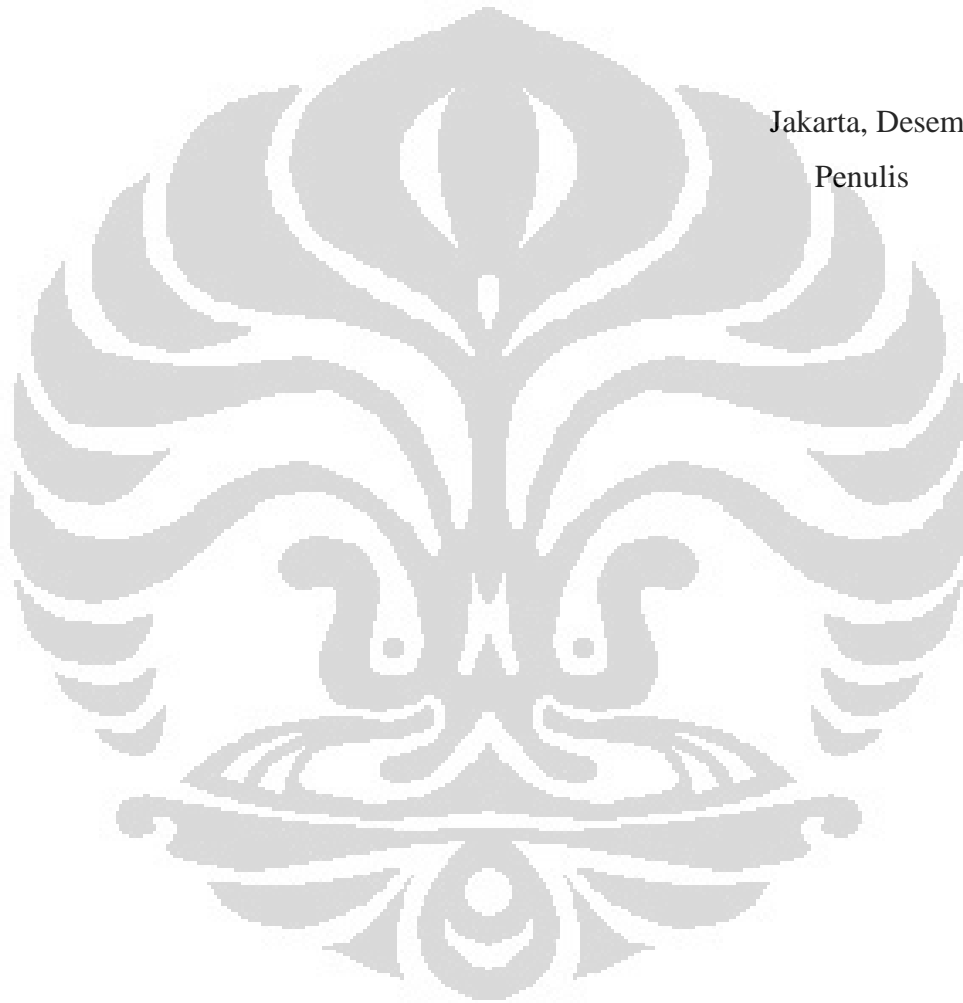
1. Pusbindiklatren Bappenas, selaku instansi yang memberikan beasiswa bagi saya untuk menempuh studi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
2. Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya cq Badan Kepegawaian Daerah yang telah memberikan ijin dan dukungan kepada saya untuk menempuh studi di MPKP UI serta Pimpinan dan jajaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pematang Jaya, tempat dimana saya bertugas, yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan bantuan moril selama saya menjalani studi;
3. Dr. Sartika Djamaluddin, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
4. Ir. Sudaryono, CES., selaku Kepala Bappeda Kabupaten Pematang Jaya yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian, memberikan informasi, masukan dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini;
5. Tim PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Pematang Jaya yang telah membantu saya melakukan survai, memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Sivitas Akademika Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik yang secara langsung maupun tidak langsung membantu saya dalam menyelesaikan studi dan penyusunan tesis ini;
7. Teman-teman angkatan XXIII Bappenas atas kerjasama, dukungan dan bantuan, sehingga saya dapat menjalani masa perkuliahan dan menyelesaikan tesis ini dengan baik;

8. Joko Sutikno, suami saya, atas pengertian, dukungan dan doa selama masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini;
9. Orang tua, keluarga besar dan sahabat-sahabat yang telah memberikan doa dan dukungan bagi saya dalam menjalani perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Desember 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Artiningtyas  
NPM : 1006791455  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

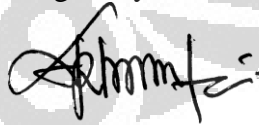
Analisis Tingkat Keberhasilan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Berdasarkan Tingkat Konsumsi Masyarakat. Studi Kasus: Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : Desember 2011

Yang menyatakan



(ARTININGTYAS)

## ABSTRAK

Nama : Artiningtyas  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul : Analisis Tingkat Keberhasilan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Berdasarkan Tingkat Konsumsi Masyarakat. Studi Kasus: Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Kemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan di Kabupaten Pemalang. Salah satu upaya yang dilakukan pemda untuk menanggulangi kemiskinan adalah merespon dan memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah yaitu PNPM Mandiri Perkotaan. Melalui kegiatan pengembangan ekonomi berupa Pinjaman Bergulir, berusaha mengatasi masalah ekonomi rumah tangga miskin di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yaitu rendahnya pendapatan dan ketiadaan akses ke layanan perbankan. Tetap tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pemalang (dari tahun 2005-2009 berkisar di 22-25% dan selalu lebih tinggi dari rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah) menimbulkan pertanyaan apakah pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan menghasilkan dampak sesuai yang diharapkan yaitu pengentasan kemiskinan yang diukur dari peningkatan pengeluaran rumah tangga penerima manfaat. Namun evaluasi dampak program selama ini belum pernah dilakukan. Pemerintah Kabupaten Pemalang baru sebatas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program. Oleh sebab itu, evaluasi dampak penting dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program sudah mencapai dampak yang diharapkan sehingga segala sumber daya yang telah digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan PNPM Mandiri Perkotaan tidak sia-sia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi masalah ekonomi yang dialami oleh rumah tangga miskin, mengidentifikasi efektivitas alokasi Dana Bergulir serta melakukan evaluasi dampak kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan terhadap tingkat konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Dengan mempertimbangkan Garis Kemiskinan Jawa Tengah tahun 2007 dan 2011 diketahui dampak program terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga penerima manfaat.

Kata kunci:

Kemiskinan, evaluasi dampak, Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan



## ABSTRACT

Name : Artiningtyas  
Program Studi : Master of Planning And Public Policy  
Judul : Analysis of the Success Rate of PNPM Urban Revolving Loan  
Based On The Level of Public Consumption. Case Study:  
Petarukan Sub-District

Poverty has been a problem in development in Pemalang District. One of the efforts of local government to tackle poverty is to respond and give full support to National Program of Urban Self-Empowerment. Through economic development activities in the form of Revolving Loan, trying to overcome the economic problems of poor households in the Petarukan sub-district ie low income and lack access to banking services. The persistence of high levels of poverty in Pemalang (from the 2005-2009 range in the 22-25% and is always higher than average poverty rate in Central Java Province) raises the question whether the implementation of PNPM urban generate the expected impact according to ie alleviation of poverty as measured from increased of beneficiary households's spending. However program impact evaluation has not been done. Pemalang local governments only monitor the implementation of the program. Therefore, impact evaluation should be conducted to determine whether the implementation of the program is achieving the desired effect so that all resources have been used in efforts to alleviate poverty by PNPM urban was not in vain. This study aims to identify the economic problems experienced by poor households, identifies the effectiveness of the Revolving Fund allocation and impact evaluation of PNPM Urban Revolving Loan on the level of consumption of beneficiary households in Petarukan sub-district. Taking into account the poverty line of Central Java in 2007 and 2011 known to program impact on the poverty of beneficiary households.

Keywords:  
Poverty, impact evaluation, PNPM Urban revolving loan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Perumusan Masalah Penelitian .....	7
1.3. Hipotesa penelitian.....	8
1.4. Tujuan Penelitian .....	9
1.5. Manfaat Penelitian .....	9
1.6. Batasan Studi dan Metodologi Penelitian .....	9
1.7. Sistematika Penulisan .....	11
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Konsep tentang Kemiskinan .....	12
2.2. Penyebab Kemiskinan.....	17
2.3. Ukuran Kemiskinan .....	20
2.4. Evaluasi Dampak .....	23
2.4.1. Pengukuran Dampak .....	24
2.5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan .....	27
(PNPM Mandiri Perkotaan)	
2.5.1. Indikator Keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan .....	31
2.6. Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan .....	32
2.6.1. Indikator Keberhasilan Pinjaman Bergulir.....	41
PNPM Mandiri Perkotaan	
2.7. Gambaran Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di .....	43
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang	
2.8. Studi Terdahulu Program Penanggulangan Kemiskinan di .....	45
Perkotaan (P2KP) atau PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP)	
<b>3. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1. Pendekatan Analisis .....	47
3.2. Pendekatan Penelitian .....	48
3.3. Populasi dan Sampel.....	51
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	57
3.5. Metode Analisis Data.....	58

<b>4. PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
4.1. Uji $t$ pada Rata-rata Tingkat Konsumsi perkapita perbulan.....	63
Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol Sebelum Intervensi Program	
4.2. Perhitungan Selisih Rata-rata Tingkat Konsumsi Pada Kelompok Aksi.....	64
4.2.1. Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan .....	64
pada Kelompok Aksi	
4.2.2. Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Pergeseran Status .....	65
Kemiskinan Kelompok Aksi	
4.2.3. Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan .....	70
dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jenis Pekerjaan	
Rumah Tangga Kelompok Aksi	
4.2.3.1. Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk.....	78
Untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan	
Jenis Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Aksi	
4.2.4. Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan .....	79
dan Status Kemiskinan Berdasarkan Pemanfaatan	
Dana Bergulir	
4.2.4.1. Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk.....	81
Untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan	
Pemanfaatan Dana Bergulir	
4.2.5. Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan .....	81
dan Status Kemiskinan Berdasarkan Frekuensi	
Putaran Pinjaman Bergulir	
4.2.5.1. Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk.....	84
Untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan	
Frekuensi Putaran Pinjaman Bergulir	
4.2.6. Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan .....	85
dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Dana Bergulir	
4.2.6.1. Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk.....	87
Untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan	
Jumlah Dana Bergulir	
4.2.7. Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan .....	88
dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan	
Rumah Tangga Kelompok Aksi	
4.2.7.1. Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk.....	90
Untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan	
Jumlah Dana Bergulir	
4.3. Perhitungan Selisih Rata-rata Konsumsi Pada Kelompok Kontrol .....	91
4.3.1. Perubahan Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan pada .....	91
Kelompok Kontrol	
4.3.2. Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Pergeseran Status .....	93
Kemiskinan Kelompok Kontrol	
4.3.3. Perubahan Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan.....	96
dan Status Kemiskinan Berdasarkan Pekerjaan	
Rumah Tangga Kelompok Kontrol	

4.3.3.1.	Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk.....	98
	Untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Kontrol	
4.3.4.	Perubahan Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan.....	99
	Dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga Kelompok Kontrol	
4.3.4.1.	Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk.....	101
	Untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga Kelompok Kontrol	
4.4.	Perhitungan Dampak dengan Menggunakan Kelompok Kontrol.....	102
4.4.1.	Perbandingan Perubahan Konsumsi perkapita perbulan.....	102
	Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
4.4.2.	Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan dan .....	104
	Pergeseran Status Kemiskinan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
4.4.3.	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi per Kapita .....	108
	per Bulan Berdasarkan Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
4.4.4.	Perubahan Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan.....	119
	Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
4.5.	Perhitungan FGT Index.....	125
<b>5.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>127</b>
5.1.	Kesimpulan .....	127
5.2.	Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>131</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin.....	1
	Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2009	
Tabel 1.2	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Pemalang .....	2
	dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah	
	Tahun 2005 – 2009	
Tabel 1.3	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemalang, .....	3
	Kabupaten / Kota Sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah	
Tabel 1.4	Jumlah Anak Jalanan di Kabupaten Pemalang .....	4
	Tahun 2005 – 2010	
Tabel 1.5	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Perkotaan .....	4
	di Kabupaten Pemalang Tahun 2005 - 2010	
Tabel 1.6	Jumlah Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Perkotaan .....	6
	Kabupaten Pemalang dan Jumlah Desa/Kelurahan yang	
	Melaksanakan Kegiatan Pinjaman Bergulir	
	PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2007	
Tabel 1.7	Dana PNPM Mandiri Perkotaan (Lingkungan, Sosial, Ekonomi).....	6
	di Kabupaten Pemalang Tahun 2007	
Tabel 1.8	Dana Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan .....	7
	di Kabupaten Pemalang Tahun 2007	
Tabel 2.1	Kelompok Sasaran dan Penerima Manfaat .....	29
	PNPM Mandiri Perkotaan	
Tabel 2.2	Ketentuan dan Sifat Penggunaan Dana BLM .....	30
Tabel 2.3	Indikator Keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan .....	31
Tabel 2.4	Kerangka Logis Strategi Pengembangan Pinjaman Bergulir .....	41
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin di.....	43
	Wilayah Kecamatan Petarukan Tahun 2007	
Tabel 3.1	Konsumsi Makanan .....	50
Tabel 3.2	Konsumsi Bukan Makanan .....	51
Tabel 3.3	Populasi Kelompok Aksi .....	53
Tabel 3.4	Sampel Kelompok Aksi .....	54
Tabel 3.5	Populasi Kelompok Kontrol .....	55
Tabel 3.6	Sampel Kelompok Kontrol .....	56
Tabel 3.7	Garis Kemiskinan Propinsi Jawa Tengah .....	62
Tabel 3.8	Status Kemiskinan BPS .....	62

Tabel 4.1	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan.....	64
	pada Kelompok Aksi	
Tabel 4.2	Perubahan Status Kemiskinan Tiap Rumah Tangga.....	69
	pada Kelompok Aksi	
Tabel 4.3	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan.....	71
	dan Status Kemiskinan Berdasarkan Pekerjaan	
	Rumah Tangga Kelompok Aksi	
Tabel 4.4	Kriteria Kinerja Unit Pinjaman Bergulir .....	82
Tabel 4.5	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan.....	85
	dan Status Kemiskinan Berdasarkan Frekuensi	
	Putaran Pinjaman Bergulir	
Tabel 4.6	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan.....	83
	dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Dana Bergulir	
Tabel 4.7	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan .....	89
	Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan	
	Rumah Tangga pada Kelompok Aksi	
Tabel 4.8	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan.....	92
	pada Kelompok Kontrol	
Tabel 4.9	Perubahan Status Kemiskinan Tiap Rumah Tangga.....	95
	pada Kelompok Kontrol	
Tabel 4.10	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan.....	97
	dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jenis Pekerjaan	
	Rumah Tangga Kelompok Kontrol	
Tabel 4.11	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan.....	100
	dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan	
	Rumah Tangga Kelompok Kontrol	
Tabel 4.12	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita.....	102
	perbulan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol (Nominal)	
Tabel 4.13	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita.....	103
	perbulan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol (Riil)	
Tabel 4.14	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita.....	108
	perbulan berdasarkan Pergeseran Status Kemiskinan	
	pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Tabel 4.15	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita.....	109
	perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Pekerjaan	
	Rumah Tangga Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Tabel 4.16	Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga.....	110
	Bengkel pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Tabel 4.17	Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga.....	111
	Buruh Bangunan pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	

Tabel 4.18	Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga.....	113
	Buruh Pabrik pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Tabel 4.19	Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga.....	114
	Buruh Tani pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Tabel 4.20	Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga.....	115
	Dagang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Tabel 4.21	Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga.....	117
	Penjahit pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Tabel 4.22	Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga.....	118
	Tukang Batu pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Tabel 4.23	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan.....	119
	Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Tabel 4.24	Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga.....	120
	dengan Jumlah Tanggungan 2 Orang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Tabel 4.25	Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga.....	121
	dengan Jumlah Tanggungan 3 orang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Tabel 4.26	Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga.....	122
	dengan Jumlah Tanggungan 4 orang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Tabel 4.27	Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga.....	123
	dengan Jumlah Tanggungan 5 orang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Tabel 4.28	Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga.....	124
	dengan Jumlah Tanggungan 6 orang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Tabel 4.29	FGT Index pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol.....	126

## DAFTAR GAMBAR

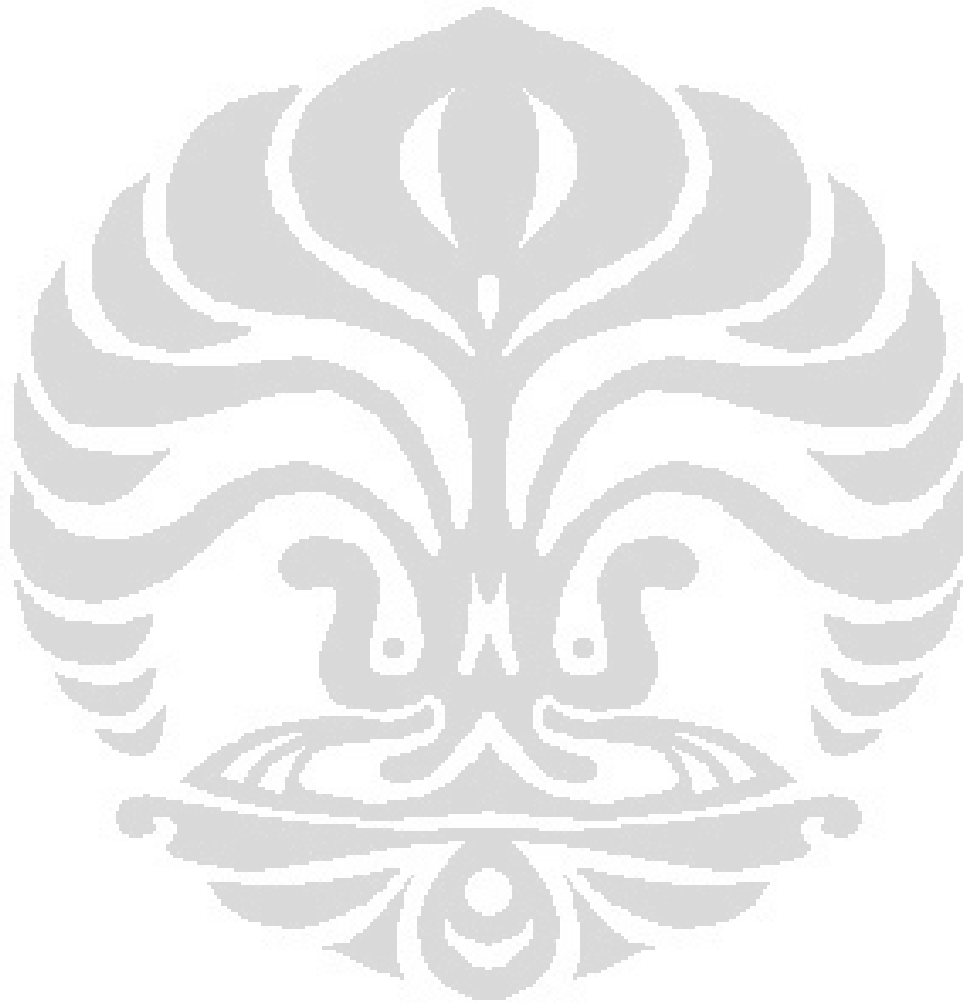
Gambar 2.1	Pandangan PNPM Mandiri Perkotaan tentang Akar Penyebab Kemiskinan.....	20
Gambar 2.2	Konsep Evaluasi Dampak .....	24
Gambar 2.3	Indikator Sebelum Intervensi Program .....	24
Gambar 2.4	Indikator Setelah Intervensi Program.....	25
Gambar 2.5	Perbandingan dengan Kontra-fakta.....	25
Gambar 2.6	Pengukuran Dampak dengan Kontra-fakta .....	26
Gambar 2.7	Penanganan Akar Kemiskinan oleh Masyarakat Melalui PNPM Mandiri Perkotaan.....	28
Gambar 2.8	Struktur Organisasi LKM.....	34
Gambar 2.9	Struktur Organisasi UPK .....	35
Gambar 3.1	Pengukuran Dampak dengan Kelompok Kontrol .....	60
Gambar 3.2	Langkah-langkah dalam Evaluasi Dampak.....	61
Gambar 4.1	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan pada Kelompok Aksi.....	65
Gambar 4.2	Perubahan Status Kemiskinan pada Kelompok Aksi.....	66
Gambar 4.3	Pergeseran Status Kemiskinan pada Kelompok Aksi .....	67
Gambar 4.4	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan Berdasarkan Pergeseran Status Kemiskinan pada Kelompok Aksi.....	68
Gambar 4.5	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan Berdasarkan Perubahan Status Kemiskinan pada Kelompok Aksi .....	69
Gambar 4.6	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Aksi.....	71
Gambar 4.7	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Pemanfaatan Dana Bergulir pada Rumah Tangga Buruh Tani.....	75
Gambar 4.8	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Pemanfaatan Dana Bergulir pada Rumah Tangga Dagang.....	76
Gambar 4.9	Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Rumah tangga Kelompok Aksi.....	78



Gambar 4.10	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status.....	80
	Kemiskinan Berdasarkan Pemanfaatan Dana Bergulir	
Gambar 4.11	Perubahan Konsumsi perkapita perbulan dan .....	84
	Status Kemiskinan Berdasarkan Frekuensi Perguliran	
Gambar 4.12	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan .....	86
	Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Dana Bergulir	
Gambar 4.13	Pekiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai.....	88
	Garis Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Dana Bergulir	
Gambar 4.14	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan .....	89
	Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga pada Kelompok Aksi	
Gambar 4.15	Pekiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai .....	90
	Garis Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga pada Kelompok Aksi	
Gambar 4.16	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan .....	92
	Pada Kelompok Kontrol	
Gambar 4.17	Perubahan Status Kemiskinan pada Kelompok Kontrol.....	93
Gambar 4.18	Pergeseran Status Kemiskinan pada Kelompok Kontrol .....	94
Gambar 4.19	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan .....	95
	Berdasarkan Pergeseran Status Kemiskinan pada Kelompok Kontrol	
Gambar 4.20	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan .....	96
	Berdasarkan Perubahan Status Kemiskinan pada Kelompok Kontrol	
Gambar 4.21	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan .....	98
	Status Kemiskinan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Kontrol	
Gambar 4.22	Pekiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai .....	99
	Garis Kemiskinan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Kontrol	
Gambar 4.23	Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan .....	100
	Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga pada Kelompok Kontrol	
Gambar 4.24	Pekiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai .....	101
	Garis Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga pada Kelompok Kontrol	
Gambar 4.25	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita .....	103
	perbulan pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol (Nominal)	

Gambar 4.26	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita .....	104
	perbulan pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol (Riil)	
Gambar 4.27	Perbandingan Perubahan Tingkat Kemiskinan pada.....	105
	Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Gambar 4.28	Perbandingan Perubahan Pergeseran Status Kemiskinan .....	106
	Pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Gambar 4.29	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita .....	107
	perbulan Berdasarkan Pergeseran Status Kemiskinan pada	
	Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Gambar 4.30	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita .....	110
	perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Bengkel	
	pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Gambar 4.31	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita .....	112
	perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Buruh	
	Bangunan pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Gambar 4.32	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita .....	113
	perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Buruh	
	Pabrik pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Gambar 4.33	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita .....	114
	perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Buruh	
	Tani pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Gambar 4.34	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita .....	116
	perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Dagang	
	pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Gambar 4.35	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita .....	117
	perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Penjahit	
	pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Gambar 4.36	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita .....	118
	perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga	
	Tukang Batu pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol	
Gambar 4.37	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita .....	121
	perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga dengan	
	Jumlah Tanggungan 2 Orang pada Kelompok Aksi dan	
	Kelompok Kontrol	
Gambar 4.38	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita .....	122
	perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga dengan	
	Jumlah Tanggungan 3 Orang pada Kelompok Aksi dan	
	Kelompok Kontrol	
Gambar 4.39	Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita .....	123
	perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga dengan	
	Jumlah Tanggungan 4 Orang pada Kelompok Aksi dan	
	Kelompok Kontrol	

- Gambar 4.40 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita ..... 124  
perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga dengan  
Jumlah Tanggungan 5 Orang pada Kelompok Aksi dan  
Kelompok Kontrol
- Gambar 4.41 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita ..... 125  
perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga dengan  
Jumlah Tanggungan 6 Orang pada Kelompok Aksi dan  
Kelompok Kontrol



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Survei Dampak Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan terhadap Tingkat Konsumsi
- Lampiran 2 Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Kelompok Aksi
- Lampiran 3 Perubahan Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Buruh Tani Berdasarkan Penggunaan Dana Bergulir
- Lampiran 4 Perubahan Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Dagang Berdasarkan Penggunaan Dana Bergulir
- Lampiran 5 Perubahan Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Kelompok Aksi Berdasarkan Penggunaan Dana Bergulir
- Lampiran 6 Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Kelompok Kontrol

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Kemiskinan menjadi permasalahan di hampir semua daerah di Indonesia. Begitu pun di Kabupaten Pemalang. Salah satu masalah penting dalam pembangunan di Kabupaten Pemalang adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin. Berdasarkan konsep Garis Kemiskinan (*Poverty Line*) dari BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita perbulan berada di bawah Garis Kemiskinan. ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) Persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang dari tahun 2005 sampai 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2009

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	Persentase Penduduk Miskin	
			Pemalang	Jawa Tengah
2005	128.309	300,2	22,59	20,49
2006	171.119	338,20	25,30	22,19
2007	160.105	307,10	22,79	20,43
2008	185.526	325,15	23,92	19,23
2009	198.295	303,72	22,17	17,72

Sumber : Bappeda Kabupaten Pemalang (2011)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang dari tahun 2005 sampai 2009 berputar di kisaran angka 22% - 25% dan tidak menunjukkan penurunan signifikan, bahkan angkanya selalu berada di atas rata-rata provinsi Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitarnya, Kabupaten Pemalang menempati urutan ke-3 terbanyak dalam persentase jumlah penduduk miskin, seperti tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2009

No.	Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (%)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Kabupaten Brebes	27,79	30,36	27,93	25,98	24,39
2	Kabupaten Pekalongan	27,79	30,36	27,93	25,98	24,39
3	Kabupaten Pemalang	22,59	25,30	22,79	23,92	22,17
4	Kabupaten Tegal	19,60	20,71	18,50	15,78	13,98
5	Kota Tegal	8,96	10,40	9,36	11,28	9,88
6	Kota Pekalongan	6,37	7,38	6,62	10,29	8,56
<b>Jawa Tengah</b>		<b>20,49</b>	<b>22,19</b>	<b>20,43</b>	<b>18,99</b>	<b>17,48</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang (2011)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Pemalang dari tahun 2005 hingga 2009 lebih tinggi dari Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kota Pekalongan, namun lebih rendah dari Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pekalongan.

Masalah kemiskinan di Kabupaten Pemalang juga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu gabungan tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu kesehatan (panjang umur atau harapan hidup), pendidikan dan kemampuan daya beli atau penghasilan. Dari tahun 2006-2009 IPM Kabupaten Pemalang hanya lebih tinggi dari Kabupaten Brebes dan menduduki peringkat ke-34 dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah. Walaupun dalam periode 2006-2009 tersebut IPM Kabupaten Pemalang mengalami sedikit kenaikan tiap tahunnya, namun bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi, IPM Kabupaten Pemalang selalu di bawah rata-rata provinsi. Data IPM Kabupaten Pemalang dan kabupaten/kota sekitarnya serta rata-rata Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemalang,  
Kabupaten / Kota Sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				Ranking ke- di Jawa Tengah	
	2006	2007	2008	2009	2008	2009
1. Kabupaten Brebes	65,90	66,57	67,08	67,69	35	35
2. Kabupaten Pemalang	67,40	67,89	68,38	69,02	34	34
3. Kabupaten Tegal	67,80	68,83	69,54	70,08	30	29
4. Kabupaten Pekalongan	69,40	69,69	70,31	70,83	23	23
5. Kota Tegal	72,40	72,72	73,20	73,63	8	8
6. Kota Pekalongan	72,50	73,10	73,49	74,01	5	5
<b>Jawa Tengah</b>	70,30	70,92	71,60	72,90	-	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang (2011)

Permasalahan kemiskinan tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan atau wilayah terpencil yang minim sarana aksesibilitas, namun kemiskinan juga dialami oleh masyarakat perkotaan. Suparlan (1984) sebagaimana ditulis oleh Harsono (2005) mengatakan bahwa masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut tapi juga melibatkan masalah-masalah sosial yang ada di pedesaan. Kemiskinan di perkotaan menjadi sebab munculnya masalah-masalah sosial dan kriminal seperti pelacuran, pencurian, perampokan serta perkelahian.

Salah satu indikasi masalah sosial yang kasat mata akibat adanya kemiskinan perkotaan di Kabupaten Pemalang adalah meningkatnya jumlah anak jalanan di wilayah perkotaan. Fakta ini makin diperkuat oleh data profil daerah yang dikeluarkan oleh Bappeda Kabupaten Pemalang bahwa pada tahun 2005 jumlah anak jalanan sebesar 5.593 jiwa meningkat menjadi sebesar 5.873 jiwa pada tahun 2006 atau meningkat sebesar 5 (lima) persen, dan jumlahnya dari tahun ke tahun tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Jumlah Anak Jalanan di Kabupaten Pemalang  
Tahun 2005 - 2010

	Tahun					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah anak jalanan	5593	5873	5916	5919	5890	5938

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang (2011).

Kabupaten Pemalang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2005 sebesar 1.351.374 jiwa dan pada tahun 2006 sebesar 1.364.274 (meningkat sebesar 0,95%), jumlah penduduk miskin perkotaan mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 104.626 jiwa (sekitar 7,7% dari total jumlah penduduk) meningkat menjadi 109.857 jiwa pada tahun 2006 (sekitar 8,05% dari total jumlah penduduk) atau mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin perkotaan sebesar 0,31%. (Bappeda Kabupaten Pemalang, 2010) Jumlah dan persentase penduduk miskin perkotaan cenderung meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2005 sampai 2010. Data jumlah penduduk miskin perkotaan lebih lanjut sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Perkotaan di Kabupaten Pemalang Tahun 2005 - 2010

	Tahun					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total jumlah penduduk	1.351.374	1.364.274	1.364.274	1.385.664	1.391.711	1.399.687
Jumlah penduduk miskin perkotaan	104.626	109.857	109.857	111.541	113.006	114.354
Persentase	7,74%	8,05%	8,05%	8,05%	8,12%	8,17%

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang (2011)

Dari data tersebut terlihat bahwa persentase penduduk miskin perkotaan terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tetap berada di kisaran 7% - 8%, tidak mengalami penurunan.

Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya menanggulangi masalah kemiskinan dengan mengembangkan dan melaksanakan berbagai program untuk mengurangi jumlah penduduk miskin perkotaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah merespon dan memberikan dukungan penuh pada program pengentasan



kemiskinan perkotaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya dengan prinsip keseimbangan pembangunan yang disebut Tridaya yaitu:

1. Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection*);
2. Pengembangan Masyarakat (*Social Development*);
3. Pengembangan Ekonomi (*Economic Development*).

Penelitian ini difokuskan pada Bidang pengembangan ekonomi (*economic development*) karena merupakan bidang yang secara langsung memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pengembangan ekonomi dilakukan dalam bentuk kegiatan Pinjaman Bergulir yaitu menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. (Buku Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Bergulir; 2010). Tujuan umum kegiatan Pinjaman Bergulir adalah keadaan ekonomi dari masyarakat golongan miskin meningkat, dengan indikator keberhasilan/dampak berupa:

1. Meningkatnya omzet usaha, pendapatan, dan modal sendiri bagi warga miskin kelompok sasaran proyek.
2. Meningkatnya aset, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, bagi warga miskin kelompok sasaran proyek.
3. Kegiatan sistem Pinjaman Bergulir tidak merusak tatanan lembaga keuangan mikro yang sudah ada.

Dari tiga indikator dampak sebagaimana di atas, tesis ini hanya meneliti dampak kegiatan Pinjaman Bergulir terhadap peningkatan pengeluaran rumah tangga.

Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pematang dilaksanakan di empat dari lima wilayah kecamatan perkotaan yaitu: Kecamatan Comal (12 desa), Kecamatan Petarukan (20 desa), Kecamatan Taman (16 desa) dan Kecamatan Pematang (14 desa), sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.6 Jumlah Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Perkotaan Kabupaten Pemalang dan Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2007

	Kecamatan Perkotaan di Kabupaten Pemalang				
	Ulujami	Comal	Petarukan	Taman	Pemalang
Total jumlah desa/kelurahan	18	18	20	21	20
Jumlah desa/kelurahan penerima Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM-MP	0	12	20	16	14

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang.

Dari lima wilayah kecamatan perkotaan di Kabupaten Pemalang tersebut hanya Kecamatan Ulujami yang tidak/belum melaksanakan kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Sedangkan semua desa di wilayah Kecamatan Petarukan telah menjalankan kegiatan Pinjaman Bergulir. Sementara itu di Kecamatan Comal 12 dari 18 desa/kelurahan di wilayahnya menjalankan Pinjaman Bergulir. Di kecamatan Taman sebanyak 16 dari 21 desa, dan Kecamatan Pemalang 14 dari 20 desa di wilayahnya telah melaksanakan kegiatan Pinjaman Bergulir. Dana yang dialokasikan pada PNPM Mandiri Perkotaan (meliputi semua bidang; Lingkungan, Ekonomi dan Sosial) di empat kecamatan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7 Dana PNPM Mandiri Perkotaan (Lingkungan, Sosial, Ekonomi) di Kabupaten Pemalang Tahun 2007

Sumber Pendanaan	Kecamatan				Total
	Comal	Petarukan	Taman	Pemalang	
PNPM-MP	1.472.100.000	3.463.779.200	2.343.425.500	2.045.100.000	9.324.404.700
Swadaya	1.709.843.250	3.306.076.337	2.441.954.460	1.043.949.725	8.501.823.772
APBD	0	4.625.000	0	0	4.625.000
DDUPB	0	117.000.000	112.375.000	253.300.000	482.675.000
<b>Total</b>	3.181.943.250	6.891.480.537	4.897.754.960	3.342.249.725	18.313.528.472

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang

Keseluruhan dana yang dialokasikan untuk PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2007 adalah Rp. 18,313 milyar, dengan urutan kecamatan berdasarkan besarnya dana adalah Kecamatan Petarukan, Kecamatan Taman, Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Comal. Diluar dana BLM (Bantuan Langsung

Masyarakat) tersebut, Pemda Kabupaten Pemalang juga mengalokasikan dana BOP (Bantuan Operasional) bagi persiapan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2007 sebesar Rp. 2 milyar. Dari dana BLM pada tabel di atas, dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pinjaman Bergulir di empat wilayah kecamatan perkotaan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan pada tahun 2007 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.8 Dana Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pemalang Tahun 2007

	Kecamatan				Total
	Comal	Petarukan	Taman	Pemalang	
<b>Jumlah Dana PNPM-MP untuk Pinjaman Bergulir</b>	615.550.000	1.330.275.000	951.500.000	762.200.000	3.659.525.000

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang.

Total dana PNPM Mandiri Perkotaan untuk kegiatan Pinjaman Bergulir tahun 2007 adalah Rp.3,659 milyar, dimana Kecamatan Petarukan mengalokasikan dana terbesar yaitu Rp.1,330 milyar, diikuti oleh Kecamatan Taman (Rp.915 juta), Pemalang (Rp. 762 juta) dan Comal (Rp. 615 juta).

Sejak pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2007 belum pernah dilakukan evaluasi dampak terhadap peningkatan pengeluaran rumah tangga miskin penerima manfaat, baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebagai pelaksana program PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pemalang, pemerintah pusat ataupun pihak lainnya. Mengingat segala upaya yang telah dilakukan untuk program ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan dana yang dialokasikan, evaluasi terhadap implementasi kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pemalang harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana indikator keberhasilan program tercapai, sehingga penggunaan segala sumber daya tersebut tidak sia-sia.

## 1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pemalang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Namun sejak pelaksanaannya hingga kini tingkat kemiskinan di Kabupaten Pemalang masih tinggi. Seperti diungkapkan di

**Universitas Indonesia**

atas, kemiskinan di Kabupaten Pemalang sejak tahun 2005-2009 berada di kisaran 22% - 25% dan selalu lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Pemalang ranking 34 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin perkotaan sejak tahun 2005 hingga 2010 tidak beranjak dari kisaran 7% - 8%. Sedangkan evaluasi terhadap program belum pernah dilakukan, sehingga dampak terhadap peningkatan konsumsi belum diketahui. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah apakah kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan mengakibatkan dampak sesuai yang diharapkan yaitu meningkatkan konsumsi rumah tangga miskin sasaran proyek.

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator keberhasilan/dampak program Pinjaman Bergulir. Pengeluaran rumah tangga (konsumsi makanan dan bukan makanan) juga merupakan pendekatan yang digunakan BPS untuk mengukur kemiskinan. Pada rumah tangga miskin konsumsi merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengukur pendapatan rumah tangga. Hal ini dilakukan karena data mengenai pendapatan relatif tidak mudah didapatkan, disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Pendapatan yang tidak menentu sehingga sulit bagi rumah tangga miskin untuk mengingat dengan pasti besar pendapatannya.
2. Keengganan untuk mengatakan besar pendapatan karena alasan etis, budaya dan sebagainya.
3. Seseorang lebih mudah untuk ditanyai jumlah uang yang dikeluarkan untuk konsumsi atau belanja daripada ditanyai besaran pendapatannya.
4. Sebagian besar bahkan keseluruhan porsi pendapatan penduduk miskin biasanya habis digunakan untuk konsumsi (tidak ada tabungan maupun investasi).

### **1.3. Hipotesa penelitian**

Seperti telah disebutkan di atas, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pemalang tidak mengalami perubahan, meskipun Pemda telah berupaya untuk menanggulangnya salah satunya dengan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Berdasarkan fakta tersebut maka hipotesa atau dugaan sementara

penelitian adalah salah satu indikator dampak sebagaimana ketentuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan yaitu peningkatan konsumsi rumah tangga penerima manfaat belum tercapai.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi distribusi alokasi dana Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan;
2. Mengidentifikasi efektivitas alokasi Dana Bergulir dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat;
3. Menganalisa dampak kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan terhadap peningkatan angka pengeluaran (konsumsi) rumah tangga penerima manfaat.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya terutama mengenai dampak kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan terhadap tingkat konsumsi masyarakat penerima manfaat.
2. Masukan bagi para pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam menentukan langkah dan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan perkotaan.
3. Bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang PNPM Mandiri Perkotaan.

#### **1.6. Batasan Studi dan Metodologi Penelitian**

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program pengentasan kemiskinan dengan konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, dengan prinsip keseimbangan pembangunan yang disebut Tridaya, yaitu

**Universitas Indonesia**

Perlindungan Lingkungan, Pengembangan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi. Penelitian ini dibatasi pada aspek Pengembangan Ekonomi berupa Pinjaman Bergulir karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Indikator keberhasilan Pinjaman Bergulir antara lain adalah:

1. Meningkatnya omzet usaha, pendapatan, dan modal sendiri bagi warga miskin kelompok sasaran proyek.
2. Meningkatnya aset, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, bagi warga miskin kelompok sasaran proyek.
3. Kegiatan sistem Pinjaman Bergulir tidak merusak tatanan lembaga keuangan mikro yang sudah ada.

Karena adanya keterbatasan, waktu, dana, tenaga, teori-teori dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua indikator kinerja kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan ini diukur. Penulis membatasi pengukuran pada dampak kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan terhadap pengeluaran (tingkat konsumsi) rumah tangga penerima manfaat. Penulis juga membatasi daerah penelitian di salah satu kecamatan yang menetapkan porsi tertentu dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan untuk kegiatan Pinjaman Bergulir yaitu Kecamatan Petarukan. Pemilihan Kecamatan Petarukan sebagai lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kecamatan Petarukan merupakan satu-satunya kecamatan dimana seluruh desa/kelurahan di wilayahnya menjalankan kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan.
2. Kecamatan Petarukan merupakan kecamatan yang mengalokasikan dana BLM untuk kegiatan Pinjaman Bergulir paling besar di antara tiga kecamatan lainnya.
3. Kemiskinan di Kecamatan Petarukan hampir merata di seluruh desa/kelurahan.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah statistika deskriptif dengan pendekatan evaluasi dampak (*impact evaluation*). Dampak dilihat dari adanya perbaikan indikator keberhasilan program yaitu peningkatan angka pengeluaran atau tingkat konsumsi rumah tangga penerima manfaat. Sehingga langkah yang dilakukan adalah menghitung perubahan tingkat konsumsi rumah tangga penerima bantuan

**Universitas Indonesia**

dana Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan pada tahun 2007 (Kelompok Aksi) sebelum intervensi program (*baseline*) dan setelah adanya intervensi, yaitu tahun 2011 (*impact*). Untuk mengetahui bahwa dampak yang ada ditimbulkan dari kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan proses *netting-out* dengan membentuk Kelompok Kontrol yaitu rumah tangga dengan karakteristik kemiskinan yang sama namun tidak mendapat intervensi program. Sama halnya dengan Kelompok Aksi, pada Kelompok Kontrol juga dilakukan perhitungan perubahan tingkat konsumsi sebelum dan setelah intervensi program. Kemudian perubahan konsumsi pada Kelompok Aksi dibandingkan dengan Kelompok Kontrol sehingga diperoleh besar dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Tesis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, hipotesa penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan studi dan metodologi penelitian serta sistematika penulisan.
2. Bab II berisikan landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian dan deskripsi pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir di daerah penelitian.
3. Bab III memuat metode penelitian, data dan sampel, evaluasi dampak dan metode analisa.
4. Bab IV memuat pembahasan.
5. Bab V memuat kesimpulan dan saran.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Konsep tentang Kemiskinan**

Definisi kemiskinan secara umum adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi terbatas. (Mafruhah, 2009). Dalam mengidentifikasi kemiskinan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai pendekatan untuk memahami kemiskinan, yaitu:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi dalam bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi seluruh dunia. (Mafruhah, 2009).

Rahardjo Adisasmita (2005) mengatakan bahwa kemiskinan absolut sering dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis kemiskinan. Damanhuri (2010) menjabarkan kebutuhan pokok minimum sebagai kebutuhan akan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja. Bila seseorang atau keluarga tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok



minimumnya maka dikategorikan miskin absolut. Mafruhah (2009) mengatakan bahwa masalah utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan tingkat komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan, iklim dan berbagai faktor ekonomi lain. Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang mudah dipahami tetapi garis kemiskinan objektif sulit dilaksanakan karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Garis kemiskinan berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya sehingga tidak ada garis kemiskinan yang berlaku pasti dan umum.

Apabila suatu keluarga telah mampu memenuhi kebutuhan standard minimal tetapi tingkat pendapatan/kualitas kehidupannya lebih rendah dibandingkan dengan keluarga lain dalam komunitasnya maka keluarga tersebut mengalami kemiskinan relatif. Menurut Rahardjo Adisasmita (2005) kemiskinan relatif terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh lingkungan (orang dan keluarga yang bersangkutan). Kaitannya dengan pendapatan, apabila pendapatan seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal namun masih jauh dari pemenuhan kebutuhan hidup sederhana maka masih berada dalam keadaan miskin. Menurut Damanhuri (2010) kemiskinan relatif merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam hubungannya dengan garis kemiskinan Mafruhah (2009) mengatakan bahwa berdasarkan konsep kemiskinan relatif ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Berkaitan dengan ukuran pendapatan, sama halnya dengan Damanhuri (2010), Mafruhah (2009) mengatakan bahwa keadaan kemiskinan relatif disebabkan karena adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin besar ketimpangan antara golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula penduduk yang dikategorikan miskin. Konsep kemiskinan ini relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.

Adisasmita (2005) mengatakan bahwa kemiskinan pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) atau kemiskinan

struktural (*structural poverty*) yang terjadi terus menerus, dan kemiskinan sementara (*transient poverty*). Kemiskinan kronis adalah kemiskinan yang disebabkan oleh:

1. Kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif;
2. Keterbatasan sumberdaya dan keterisolasian terutama penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah kritis sumberdaya alam dan wilayah terpencil;
3. Rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pasar.

Dengan kata lain kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. (Damanhuri: 2010). Arsyad dalam Mafruhah (2009) menyebutkan bahwa kemiskinan struktural dapat disebabkan karena keadaan pemilikan sumber yang tidak merata; kemampuan masyarakat yang tidak seimbang; dan ketidakseimbangan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan yang tidak seimbang dalam pembangunan. Berbeda dengan Adisasmita, Damanhuri mendefinisikan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial budaya sebagai kemiskinan kultural, bukan struktural, yaitu kondisi kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sebuah komunitas. Misalnya sikap malas, etos kerja rendah, tak siap berkompetisi, sikap menerabas dan ambil cara gampang kalau perlu dengan melanggar hukum/korupsi, dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan Selo Sumardjan dalam Arsyad dalam Mafruhah (2009) berpendapat bahwa kemiskinan struktural bukanlah kemiskinan yang dialami oleh individu karena malas atau sakit keras. Kemiskinan jenis ini dikategorikan sebagai kemiskinan individual.

Kemiskinan sementara adalah kemiskinan yang disebabkan oleh:

1. Perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi;
2. Perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan;
3. Bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau wilayah-wilayah tertentu.

Bank Dunia, sebagaimana dikutip dari Damanhuri (2010) memberikan kriteria dalam menilai kemiskinan. Ada dua kriteria yang dikemukakan oleh Bank Dunia dalam kemiskinan, yaitu:

1. US\$ 1 per kapita per hari

Ini merupakan ukuran bagi kemiskinan absolut. Jika dihitung berdasarkan ukuran Bank Dunia dalam kriteria ini, maka diperkirakan ada sekitar 1,2 milyar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran ini. Di Indonesia ada sekitar 50 juta penduduk (22%) yang berada di bawah ukuran tersebut.

2. US\$ 2 per kapita per hari

Bila menggunakan ukuran yang ke dua, maka ada lebih dari 2 miliar penduduk dunia yang hidup kurang dari batas tersebut. Di Indonesia, ada 118 juta penduduk (52%) yang berada di bawah ukuran tersebut. Adapun US\$ yang digunakan adalah US\$ PPP (*Purchasing Power Parity*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*).

Kemiskinan menurut BPS dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. (<http://www.bps.go.id>).

Menurut definisi dari <http://www.pnpm-perkotaan.org> dalam kehidupan sehari-hari dimensi dari gejala kemiskinan muncul dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Dimensi Politik, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi;
2. Dimensi Sosial sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada, terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial;
3. Dimensi Lingkungan sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga

**Universitas Indonesia**

cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;

4. Dimensi Ekonomi muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak; dan
5. Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (*human capital*), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya.

Kemiskinan yang tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi juga dikatakan oleh Mafruhah (2009). Menurutnya konsep kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional. Kemiskinan dalam konteks gejala ekonomi memiliki dimensi yang berbeda dengan kemiskinan sebagai gejala sosial budaya, begitupun berbeda dengan konteks kemiskinan dalam gejala politik. Kemiskinan terdiri atas beberapa gejala yang berbeda antara lain adalah:

1. Kemiskinan Ekonomi. Secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok itu dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya merupakan pengertian finansial, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kemiskinan Politik. Kemiskinan politik menekankan pada derajat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan yang dimaksud mencakup tatanan sistem sosial politik yang dapat menentukan aloksi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial yang menentukan alokasi sumber daya. Cara mendapatkan akses tersebut dapat melalui sistem politik formal, kontak-kontak informal dengan struktur kekuasaan yang mempunyai pengaruh pada kekuasaan ekonomi.
3. Kemiskinan Sosial. Diartikan sebagai kemiskinan karena kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat.

**Universitas Indonesia**

Pembedaan jenis kemiskinan yang lain sebagaimana diungkapkan oleh Mafruhah (2009) adalah kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah didefinisikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh sumber daya yang terbatas atau karena tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Dengan kata lain ketidakmampuan seseorang atau komunitas dalam memenuhi kebutuhan dan mengejar ketertinggalan teknologi menjadi penyebabnya. Sementara itu kemiskinan buatan didefinisikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh kelembagaan yang ada dalam masyarakat membuat masyarakat sendiri tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.

Dari berbagai definisi kemiskinan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan mempunyai dimensi yang luas, tidak terbatas pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar minimal tapi juga keterbatasan dalam akses sosial, politik, aset dan ekonomi bahkan akses spiritual (agama). Definisi kemiskinan juga meliputi unsur pendidikan, kesehatan, perumahan sehingga dapat disimpulkan bahwa kemiskinan berarti tidak tercapainya standar hidup yang layak. Todaro dan Smith (2006) mengatakan bahwa standar hidup yang rendah termanifestasikan secara kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah (kemiskinan), perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang relatif sangat singkat, peluang mendapatkan pekerjaan yang rendah, dan dalam banyak kasus juga terdapat ketidakpuasan serta ketidakberdayaan secara umum.

## **2.2. Penyebab Kemiskinan**

Seperti halnya definisi kemiskinan yang memiliki dimensi luas, begitu pula penyebab kemiskinan. Banyak faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab kemiskinan. Mafruhah (2009) mengatakan bahwa penyebab kemiskinan antara lain adalah:

1. Individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Berdasarkan penyebab tersebut muncul

adanya anggapan bahwa penyebab seseorang menjadi miskin adalah karena faktor kemalasan.

2. Keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan kemiskinan pada generasi sebelumnya atau istilahnya kemiskinan turun temurun. Seseorang pada keluarga miskin akan tetap menjadi miskin karena ketiadaan kesempatan dan pendidikan.
3. Sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari. Penyebab kemiskinan ini cenderung pada motivasi dan *attitude* yang terbentuk selama bertahun-tahun. Salah satu ungkapan yang selama ini dianggap sebagai penyebab kemiskinan adalah *Pasrah Ing Pandum* (menerima pada nasib), yang dipahami secara letter luks pada masyarakat.
4. Agensi, penyebab kemiskinan ini dilakukan oleh orang lain baik secara individu maupun secara kelompok atau bahkan pemerintah sendiri yang punya andil dalam kemiskinan. Misalnya karena perang, pemerintah, dan krisis ekonomi.
5. Struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Menurut Kartasmita dalam Mafruhah (2009), kemiskinan sekurang-kurangnya disebabkan oleh empat hal, yaitu:

1. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah menyebabkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki.
2. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.
3. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan tersebut.
4. Konsisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat dijangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Sebagaimana salah satu konsep kemiskinan yaitu relatif, kemiskinan tergantung pada lingkungan dan bersifat dinamis, artinya berubah sesuai dengan

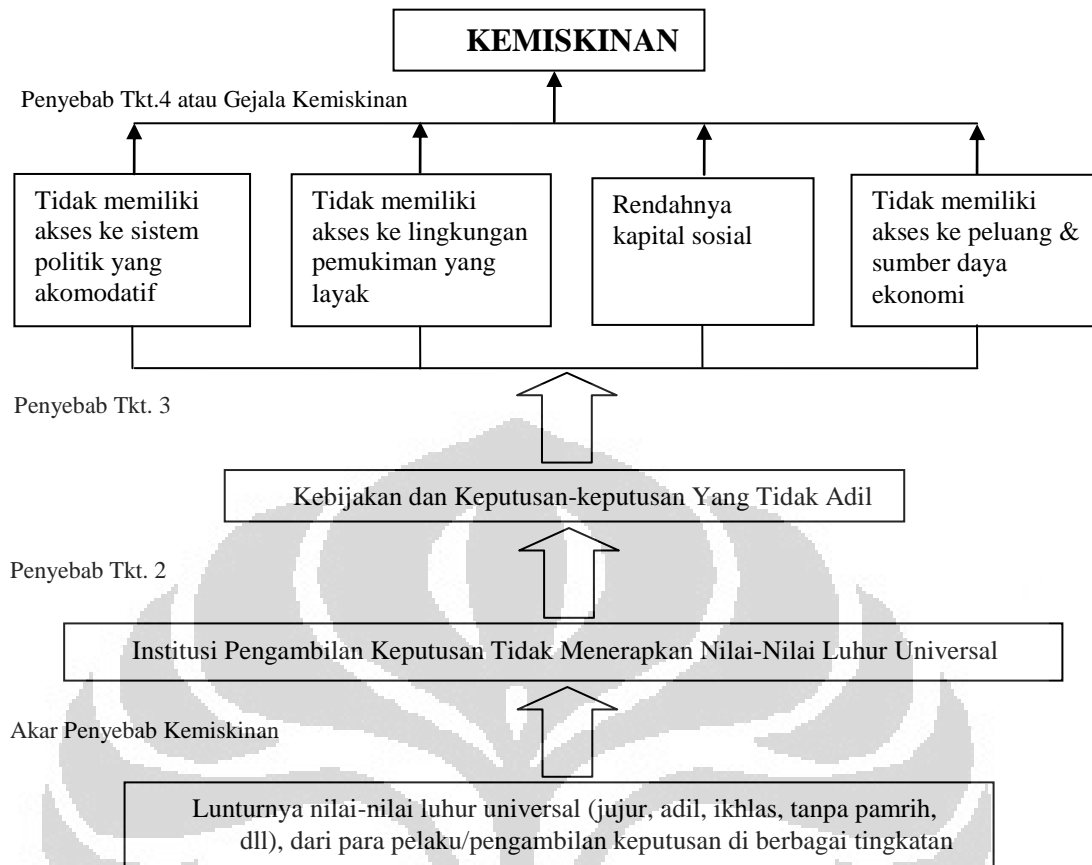
perubahan lingkungannya. Begitupun yang menjadi penyebabnya, berbeda antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain demikian pula berbeda antar waktu. Beberapa penyebab kemiskinan yang lainnya menurut Mafruhah (2009) adalah:

1. Kegagalan kepemilikan, terutama tanah dan modal;
2. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
3. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
4. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
5. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
6. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
7. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
8. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*);
9. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Sedangkan dalam dokumen strategi penanggulangan kemiskinan 2004 seperti ditulis dalam Mafruhah (2009), penyebab kemiskinan di Indonesia antara lain adalah: Terbatasnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; Terbatasnya akses terhadap faktor produksi; Rendahnya kepemilikan aset, hal ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bagi masyarakat miskin untuk dapat melakukan kegiatan usaha atau produksi; Kurangnya aset terhadap fasilitas pendidikan; Kurangnya aset terhadap fasilitas kesehatan; Terhambatnya mobilitas sosial dan kurangnya partisipasi; Kelemahan tata pemerintahan; Lemahnya penyelenggaraan perlindungan sosial; Konflik sosial yang bersifat horisontal dan vertikal yang terjadi di beberapa daerah seperti Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, serta Nangroe Aceh Darusalam; Bencana alam.

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (Juli, 2009) disebutkan bahwa kemiskinan adalah akibat dan akar penyebab kemiskinan sebenarnya adalah kondisi masyarakat utamanya para pemimpin yang belum berdaya sehingga tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan, seperti pada gambar berikut:

**Universitas Indonesia**



Gambar 2.1 Pandangan PNPM Mandiri Perkotaan tentang Akar Penyebab Kemiskinan

Sumber: Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2010)

Dari bermacam faktor penyebab kemiskinan tersebut secara garis besar kemiskinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan, pilihan, perilaku/sikap/cara pandang serta nilai-nilai universal yang mendasarinya, demikian pula sikap mental terhadap goncangan. Sedangkan faktor eksternal mencakup budaya, keluarga serta struktur sosial yang menyebabkan penduduk miskin tidak mendapat akses yang cukup terhadap sumber-sumber ekonomi.

### 2.3. Ukuran Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini merupakan metode resmi yang digunakan oleh pemerintah untuk menghitung



kemiskinan. (Maksum, 2004). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah gariskemiskinan. (<http://www.bps.go.id>). Metode ini disebut pula *head-count index method. Basic need approach* (pendekatan berdasarkan kebutuhan dasar seseorang) yaitu perhitungan uang yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi konsumsi setara 2100 kalori per kapita per hari, di tambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya, seperti sandang, kesehatan, pendidikan dan transportasi. Dengan pengertian tersebut, maka garis kemiskinan menjadi berubah sangat cepat, seiring dengan perubahan inflasi seperti pada masa krisis, ternyata terjadi perubahan yang sangat drastis pada angka garis kemiskinan. Tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang hanya sekitar Rp. 38.246 perkapita perbulan untuk penduduk perkotaan dan Rp. 27.413 bagi penduduk perdesaan. (Mafruhah, 2009). Angka terbaru garis kemiskinan Indonesiapada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 233.740 perkapita perbulan. (Berita Resmi Statistik No.45/07/Th.XVI, 1 Juli 2011). Hal ini mengandung arti bahwa seorang kepala rumah tangga dengan 4 (empat) orang anggota minimal harus mempunyai pendapatan sebesar Rp. 934.960 per bulan untuk dapat dikatakan sudah melewati garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 adalah Rp. 209.611 perkapita perbulan. (Berita Resmi Statistik No.31/07/33/Th.V, 1 Juli 2011).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan

dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Rumus Penghitungan :

$$\mathbf{GK = GKM + GKBM} \quad (2.1)$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKBM = Garis Kemiskinan Bukan Makanan

*Head-count index* hanya menghitung jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sen (1976) mengatakan bahwa *head-count index* tidak dapat menjelaskan seberapa parah kemiskinan dan jumlah penduduk miskin akan tetap sama walaupun si miskin menjadi lebih miskin. (Maksum, 2004). Oleh karena itu penting juga mengukur jurang atau kedalaman kemiskinan (*poverty gap*) dan keparahan kemiskinan (*poverty severity*). Ukuran kemiskinan yang meliputi ketiganya dikenal dengan FGT (Foster, Greer dan Thorbecke) index. Selain *head-count index* juga meliputi *poverty gap index* yang mengukur seberapa jauh tingkat konsumsi penduduk miskin dari garis kemiskinan atau berapa jarak rata-rata konsumsi penduduk miskin dengan garis kemiskinan serta *poverty severity index* yang mengukur kesenjangan tingkat konsumsi di antara penduduk miskin. Rumus penghitungan FGT index adalah sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha} \quad (2.2)$$

Dimana:

$z$  = garis kemiskinan.

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

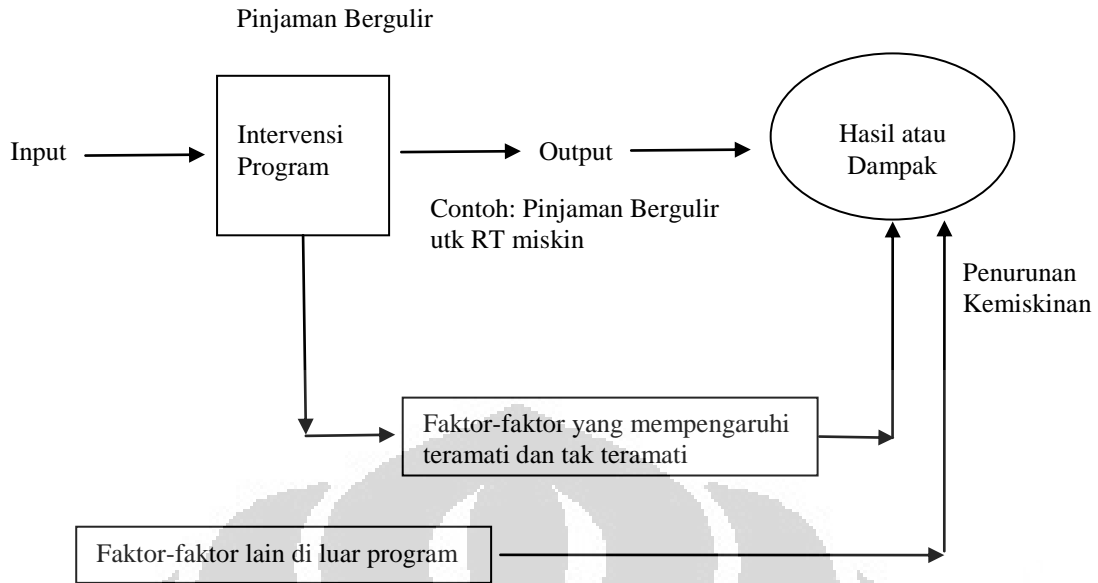
$n$  = jumlah penduduk

sehingga  $(z-y_i)/z$  adalah *poverty gap ratio*. Sedangkan tiga ukuran  $\alpha$  adalah sebagai berikut:

1.  $\alpha = 0$  adalah *head-count index*. Mengindikasikan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan  $P_0 = q/n$ . Misalkan 30% penduduk dikategorikan miskin, maka  $P_0 = 0,3$ .
2.  $\alpha = 1$  adalah *poverty gap index*. Menunjukkan proporsi dari garis kemiskinan,  $P_1 = 1/n \sum (z - y_i)/z$ . Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Misal  $P_1 = 0,2$  hal itu menunjukkan bahwa jarak antara rata-rata konsumsi penduduk miskin adalah 20% dari garis kemiskinan.  $P_1/P_0 = 1/n \sum (z - y_i)/z$  adalah arti jurang (jarak) kemiskinan sebagai proporsi dari garis kemiskinan.
3.  $\alpha = 2$  adalah *poverty severity index*. memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

#### 2.4. Evaluasi Dampak

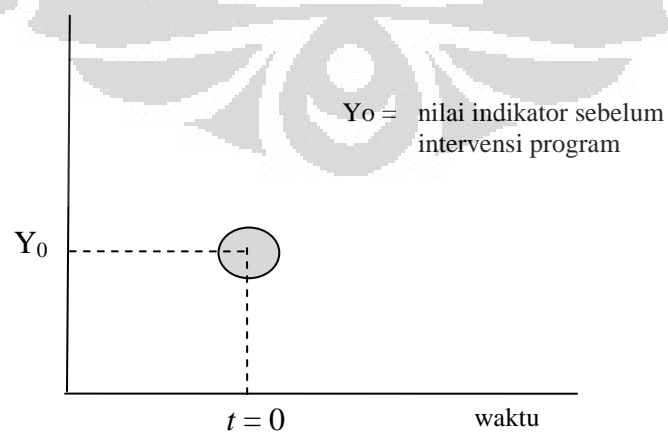
Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan. (Suharyadi). Salah satu kriteria yang digunakan pada penilaian dalam evaluasi adalah hasil (*outcomes*) yaitu apakah terjadi perubahan indikator-indikator utama tujuan program (membaik atau tidak), berapa banyak perubahannya, serta apakah perubahan tersebut disebabkan oleh program. Evaluasi dampak dilakukan untuk mengkaji apakah suatu program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, masyarakat, dan kelembagaan. Lebih lanjut konsep mengenai evaluasi dampak seperti terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.2 Konsep Evaluasi Dampak  
Sumber: Ezemenari dkk. Telah diolah kembali.

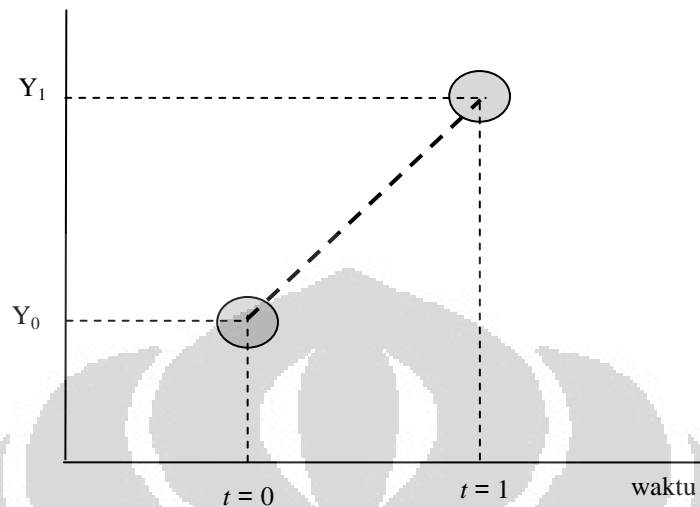
#### 2.4.1. Pengukuran Dampak

Dampak adalah perbedaan antara indikator hasil dengan program dan indikator hasil tanpa program. Tetapi, sulit untuk melihat seseorang atau sesuatu dalam keadaan yang berbeda pada saat yang bersamaan. Jadi, meskipun indikator hasil setelah program dapat diamati, indikator hasil tanpa program, yang biasa disebut sebagai kontra-fakta (*counter-factual*), tidak dapat diamati. (Suharyadi). Ilustrasi berikut ini menggambarkan suatu indikator sebelum suatu program dijalankan.



Gambar 2.3 Indikator Sebelum Intervensi Program  
Sumber: Bappenas

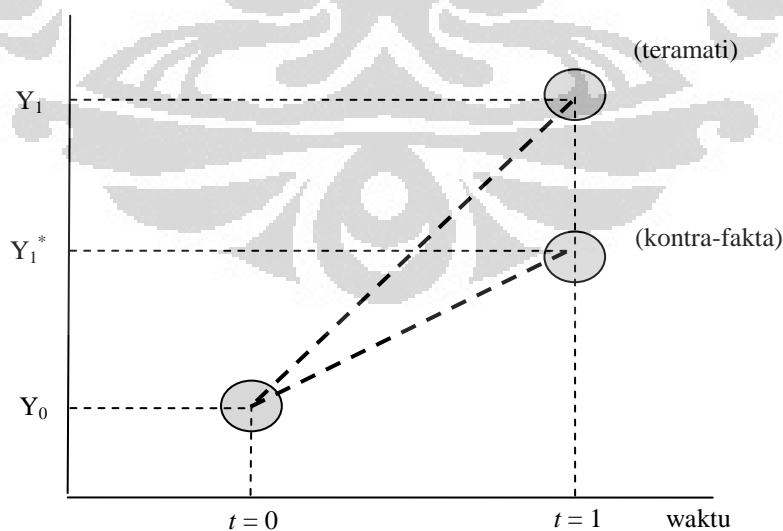
Setelah mendapat intervensi program, keadaan indikator program meningkat seperti gambar berikut ini:



Gambar 2.4 Indikator Setelah Intervensi Program

Sumber: Bappenas

$Y_1$  adalah nilai indikator setelah adanya program. Namun peningkatan ini bukan serta merta disebabkan oleh program, karena adanya faktor eksternal yang mempengaruhi, baik yang teramati maupun tidak teramati. Untuk memastikan bahwa peningkatan indikator terjadi karena dampak program, diperlukan kontra-fakta yaitu nilai indikator seandainya program tidak dijalankan.

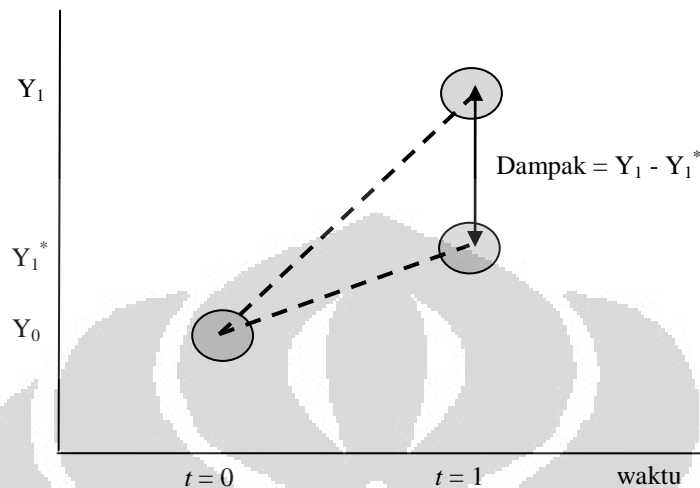


Gambar 2.5 Perbandingan dengan Kontra-fakta

Sumber: Bappenas

Universitas Indonesia

$Y_1^*$  adalah nilai indikator seandainya program tidak dijalankan (kontra-fakta). Sehingga dampak dihitung sebagai selisih antara  $Y_1$  dan  $Y_1^*$



Gambar 2.6 Pengukuran Dampak dengan Kontra-fakta

Sumber: Bappenas

Pengukuran kontra-fakta ini seringkali sulit dilakukan, karena tidak semata-mata membandingkan antara individu atau suatu keadaan sebelum dan sesudah intervensi program, juga tidak hanya membandingkan antara penerima manfaat dan bukan penerima manfaat program. Perbandingan semacam itu sangat bias terhadap faktor-faktor di luar program yang mungkin mempengaruhi hasil pengukuran sehingga menjadikannya tidak valid. Untuk mengukur kontra-fakta secara tepat, diperlukan proses *netting out* yaitu mencari suatu kelompok pembanding (*control group*) yang setara dan terpercaya, yakni kelompok bukan penerima program yang memiliki karakteristik yang persis sama dengan kelompok penerima program atau kelompok aksi (*treatment group*), sebagai pembanding. (Suharyadi), (Ezemenari dkk, 1999). Penentuan kedua kelompok ini, *control group* dan *treatment group*, merupakan kunci dalam mengidentifikasi apa yang akan terjadi bila intervensi tidak ada.

Salah satu metode yang digunakan dalam mengukur evaluasi dampak ini, adalah Selisih-dalam-selisih/Selisih ganda (*Difference-in-difference/Double difference*). Dalam metode ini data awal (*baseline*) kelompok penerima manfaat (*treatment group* atau Kelompok Aksi) dan kelompok bukan penerima manfaat

(*control group*) sebelum adanya intervensi program dikumpulkan. Data dikumpulkan lagi setelah adanya intervensi program. Kemudian untuk masing-masing kelompok, nilai data setelah intervensi program dikurangi dengan data awal sebelum intervensi program. Setelah itu kurangkan kedua selisih (ini asal istilah selisih-dalam-selisih). Nilai yang didapat merupakan perkiraan dampak program.

## **2.5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan)**

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. ([www.pnpm-perkotaan.org.id](http://www.pnpm-perkotaan.org.id)) Konsep pembangunan masyarakat miskin perkotaan yang dikembangkan dengan P2KP merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam konteks P2KP diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya, yaitu:

1. Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection*); dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.
2. Pengembangan Masyarakat (*Social Development*); tiap langkah kegiatan P2KP harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya

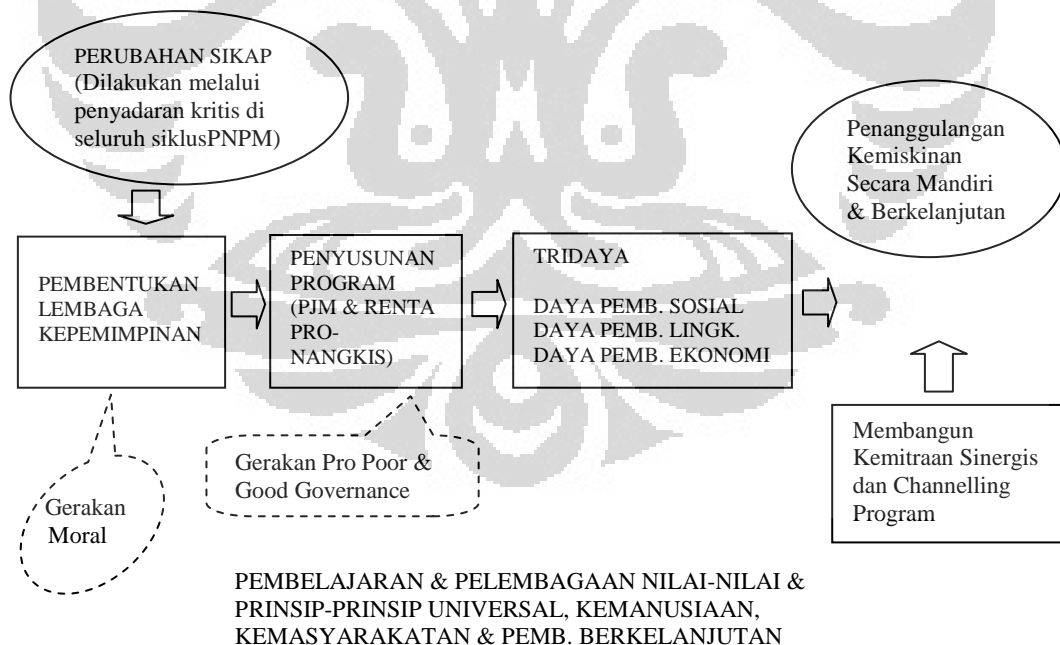
**Universitas Indonesia**

untuk meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable groups*) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat;

3. Pengembangan Ekonomi (*Economic Development*); dalam upaya menyerasikan kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan atau penganggur perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial.

Adopsi P2KP sebagai bagian dari PNPM Mandiri mulai dirintis tahun 2007. Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan.

Cara pandang PNPM Mandiri Perkotaan dalam memfasilitasi upaya penggulungan akar persoalan kemiskinan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:



Gambar 2.7 Penanganan Akar Kemiskinan oleh Masyarakat Melalui PNPM Mandiri Perkotaan

Sumber: Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2010)



Sebagai program pemberdayaan yang melibatkan pelaku pembangunan di daerah, kelompok sasaran dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah:

Tabel 2.1 Kelompok Sasaran dan Penerima Manfaat PNPM Mandiri Perkotaan

Uraian Kelompok Sasaran	Bantuan Teknik/Pendampingan	Bantuan Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat warga kelurahan peserta PNPM Mandiri Perkotaan</li> <li>▪ LKM/Lembaga Keswadayaan Masyarakat</li> <li>▪ KSM/Kelompok Keswadayaan Masyarakat</li> </ul>	Warga kelurahan yang miskin menurut kriteria kemiskinan setempat yang disepakati warga, termasuk yang telah lama miskin, yang penghasilannya menjadi tidak berarti karena inflasi, yang kehilangan sumber penghasilannya
Pemerintah Kota/Kabupaten, TKPP dan TKPK Daerah	Perangkat pemerintah kota/kabupaten s/dengan kelurahan/desa yang terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, anggota TKPP dan TKPK Daerah	
Para Pemangku Kepentingan Terkait	Perorangan atau asosiasi profesi, asosiasi usaha sejenis, perguruan tinggi, LSM, Bank, notaris, auditor publik, media masa (radio, tv, dsb) yang peduli dengan kemiskinan	

Sumber: Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2010)

Bantuan dana diberikan dalam bentuk dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). BLM bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan pada PJM (Perencanaan Jangka Menengah) dan Renta Pronangkis (Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan). Dana BLM dapat digunakan secara cukup luwes dengan berpedoman pada PJM Pronangkis, pembelajaran aspek Tridaya dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga dapat benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di kelurahan/desa bersangkutan. Jadi, alokasi dana BLM pada tiap desa/kelurahan tidak sama, karena disesuaikan dengan kondisi, prioritas kebutuhan dan kesepakatan warga desa/kelurahan tersebut. Ada desa/kelurahan yang mengalokasikan dana BLM

**Universitas Indonesia**

seluruhnya untuk Lingkungan, ada pula yang mengalokasikan untuk semua komponen Daya, yaitu Lingkungan, Ekonomi dan Sosial, dengan persentase yang bervariasi. Namun demikian penggunaan dana BLM tersebut harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Ketentuan Sifat Penggunaan Dana BLM

Komponen Kegiatan	Sifat Kemanfaatan Kegiatan	Contoh Jenis Kegiatan yang dibiayai BLM	Status Pemanfaatan BLM
Komponen Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan yang secara langsung memberikan dampak/manfaat secara kolektif pada peningkatan akses melalui peningkatan kualitas lingkungan &amp; pemukiman yang sehat, tertib, aman dan teratur</li> <li>▪ Diutamakan kegiatan yang bersifat lintas wilayah (lintas RT atau RW atau Dusun dst)</li> <li>▪ Menumbuhkan modal sosial, gotong royong, integritas, dsb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan infrastruktur yang langsung berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah (irigasi, bengkel konstruksi, pasar lokal tingkat komunitas, dll)</li> <li>▪ Pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, bagi kepentingan masyarakat miskin maupun kepentingan masyarakat secara umum (rumah kumuh, sanitasi, ar bersih, jalan setapak, drainase, pengelolaan sampah, taman hijau, dll)</li> <li>▪ Pengelolaan kegiatan bergulir untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman seperti arisan MCK, jalan setapak, perbaikan rumah, dll)</li> </ul>	Sebagai dana stimulan yang harus digunakan secara arif dan cermat dan ditetapkan berdasarkan prioritas kebutuhan. Diharapkan dana ini dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk mampu memberi kontribusi (tenag/dana) agar kegiatan ini lebih besar manfaatnya.
Komponen Sosial	<p>Kegiatan yang secara langsung mampu menumbuhkan kembali modal sosial di masyarakat seperti terjalinnya kembali budaya gotong royong, tolong menolong antar warga, integritas, etos kerja, kewirausahaan, dll</p> <p>Seluruh ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan sosial ini harus sesuai menurut kesepakatan warga dan tertuang dalam kebijakan LKM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan KSM untuk pengembangan kapasitas/penguatan organisasi. Penyiapan dan penciptaan peluang usaha melalui pelatihan dan praktik ketrampilan usaha bagi warga-warga miskin ya belum produktif</li> <li>▪ Program sosial yang sifatnya bantuan yang diupayakan berkelanjutan seperti program penuntasan wajib belajar 9 tahun, dll</li> </ul>	Sebagai dana stimulan dan diharapkan dapat menggugah partisipasi warga lainnya untuk ikut dalam gerakan amal bagi kaum miskin.
Komponen Ekonomi	<p>Kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat dan peningkatan pendapatan bagi individu/keluarga maupun kelompok dan sekaligus membangun modal sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usaha ekonomi produktif</li> <li>▪ Pengembangan modal ekonomi keluarga, yang bermfaat langsung bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin</li> <li>▪ Usaha kelompok usaha bagi warga miskin yang tidak memiliki ijasah</li> </ul>	Sebagai pinjaman kepada KSM dan harus dikembalikan kepada UP

Sumber: Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2010)

### 2.5.1. Indikator Keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan

Indikator Keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan mengacu pada Indikator Keberhasilan PNPM Mandiri sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri yang diterbitkan Kantor Menko Kesra. Selain itu Indikator Keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan juga didasarkan pada *Project Management Guideline* yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Indikator Keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan ini menjadi rujukan bagi semua pihak dalam menilai capaian dampak maupun hasil program, baik Departemen Pekerjaan Umum sebagai *Executive Agency*, konsultan, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, lembaga donor serta pihak lainnya.

Tabel 2.3 Indikator Keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan

Tujuan Akhir	Indikator Dampak	Kegunaan dari Informasi Dampak
Masyarakat miskin di lokasi PNPM Mandiri Perkotaan mendapat manfaat dari perbaikan sosial ekonomi dana tata pemerintahan setempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan angka pengeluaran keluarga atau perbaikan akses ke pelayanan ekonomi dan sosial di 80% kelurahan.</li> <li>▪ Prasarana lebih murah 20% dibandingkan dengan yang dibangun dengan pola yang tidak bertumpu pada masyarakat, di 80% kelurahan.</li> <li>▪ Tingkat kepuasan pemanfaat terhadap perbaikan pelayanan dan tata pemerintahan setempat mencapai 80%.</li> </ul>	Menetapkan apakah PNPM memberikan dampak kesejahteraan sosial dan ekonomi sesuai dengan yang diharapkan.
Hasil Antara	Indikator Hasil	Kegunaan Pemantauan Hasil
<p><b>Komponen 1:</b></p> <p>a. Masyarakat yang terorganisasi dengan kebutuhan yang meningkat untuk menyuarakan pendapatnya.</p> <p>b. Pemerintah kota/kab menyediakan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat miskin.</p>	<p><b>Komponen 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Min. 40% kehadiran kaum miskin dan rentan dalam pertemuan<sup>2</sup> perencanaan dan pengambilan keputusan.</li> <li>▪ Min. 40% tingkat kehadiran perempuan dalam pertemuan<sup>2</sup> perencanaan dan pengambilan keputusan.</li> <li>▪ Min. 30% penduduk dewasa mengikuti LKM di tingkat RT/komunitas basis.</li> <li>▪ LKM terbentuk di minimum 90% kelurahan.</li> <li>▪ Min. 90% dari kelurahan telah menyelesaikan PJM Pronangkis dan telah diratifikasi dalam musyawarah warga.</li> </ul>	<p><b>Komponen 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menilai apakah rancangan pembentukan LKM dan PJM Pronangkis perlu diperbaiki.</li> <li>▪ Menetapkan bilamana proses pemilihan LKM dan sosialisasi perlu diperbaiki.</li> </ul>

(Sambungan tabel 2.3)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Min. 80% Pemerintah kota/kab menyediakan dana pendukung: 20% untuk Pemkot/kab dengan kapasitas fiskal rendah dan 50% untuk Pemkot/kab dengan kapasitas sedang, tinggi dan sangat tinggi.</li> </ul>	
<p><b>Komponen 2:</b> LKM menyediakan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat miskin</p>	<p><b>Komponen 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah dari setiap kegiatan prasarana, ekonomi dan sosial yang diselesaikan di 80% kelurahan.</li> <li>▪ Min 70% dari prasarana yang dinilai memiliki kualitas baik.</li> <li>▪ Min 90% kelurahan dengan program dana bergulir memiliki pinjaman beresiko (LAR) <math>\geq 3</math> bulan <math>&lt; 10\%</math>.</li> <li>▪ Min 90% kelurahan dengan program dana bergulir memiliki rasio pendapatan dan biaya <math>&gt; 125\%</math>.</li> <li>▪ Min 90% kelurahan dengan program dana bergulir dengan tingkat pengembalian modal tahunan <math>&gt; 10\%</math>.</li> <li>▪ Min 30% anggota KSM adalah perempuan.</li> </ul>	<p><b>Komponen 2:</b> Menentukan apakah dibutuhkan tambahan bantuan teknik di bidang tertentu.</p>
<p><b>Komponen 3:</b> Konsultan menyediakan bantuan teknik dan dukungan dalam pelaksanaan proyek</p>	<p><b>Komponen 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 90% KMW menyediakan data secara akurat dan tepat waktu melalui SIM.</li> <li>▪ 70% LKM telah menyelesaikan audit keuangan tahunan.</li> </ul>	<p><b>Komponen 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menilai apakah bantuan teknik dan dukungan pelaksanaan perlu diperbaiki/ditingkatkan.</li> <li>▪ Menyediakan data akurat yang tepat waktu untuk pengambilan keputusan di tingkat manajemen.</li> </ul>

Sumber: Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2010)

## 2.6. Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Meskipun demikian PNPM bukanlah program keuangan mikro dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM hanya membangun dasar-dasar solusi yang

**Universitas Indonesia**

berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan. PNPM Mandiri Perkotaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari LKM. Masyarakat sendiri harus terlibat untuk menentukan masa depan UPK.

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/desa LKM/UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin PS2. Indikator tercapainya sasaran tersebut meliputi:

1. Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam daftar PS2.
2. Minimal 30% peminjam adalah perempuan.
3. Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khusus untuk kegiatan ini beranggotakan minimal 5 orang.
4. Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembaliannya baik terjamin keberlanjutannya baik melalui dana BLM maupun melalui dana hasil *chanelling* dengan kebijakan pinjaman yang jelas

Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengarahkan kegiatan pinjaman bergulir sebagai akses pinjaman masyarakat miskin yang saat ini belum mempunyai akses pinjaman ke lembaga keuangan lain melalui:

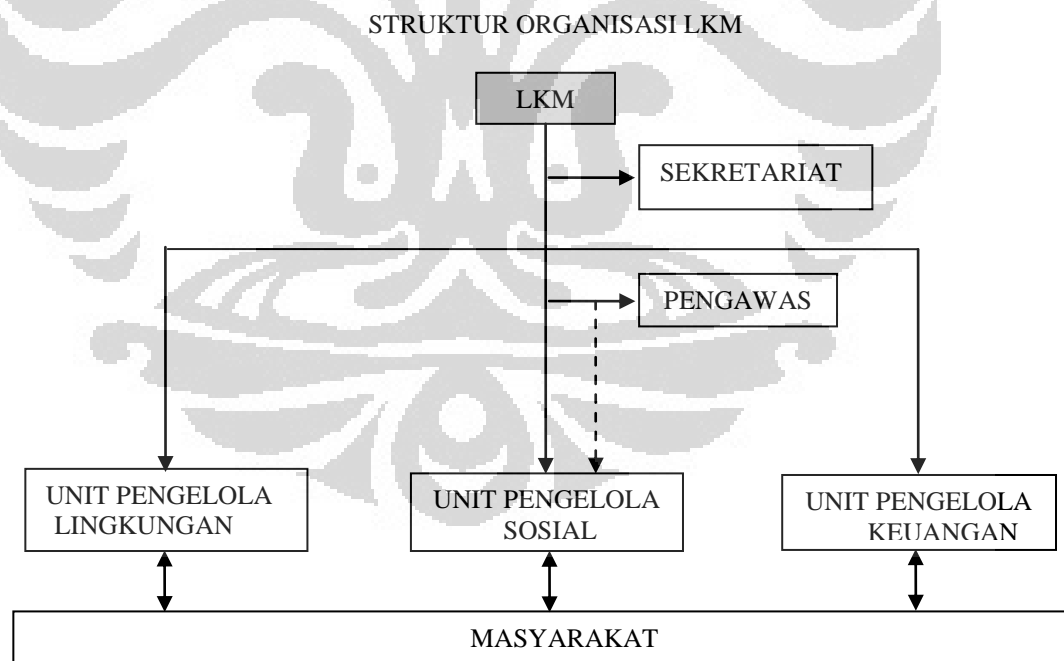
1. Kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan di tingkat kelurahan, dikelola secara profesional untuk menjaga keberlangsungan akses pinjaman bagi masyarakat miskin.
2. Transparansi atas pengelolaan dan kinerja UPK serta monitoring partisipatif oleh warga masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat.
3. Penyediaan akses pinjaman yang jumlahnya maupun tingkat bunganya hanya menarik bagi kelompok masyarakat miskin.
4. Menggunakan sistem tanggung renteng kelompok sebagai alat kontrol pengelola (UPK) maupun kelompok peminjam (KSM).

5. Meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan ekonomi rumah tangga, kewirausahaan dan pembukuan sederhana.

Beberapa aturan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan berikut ini dibuat agar pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, antara lain adalah aturan mengenai kelayakan lembaga pengelola Pinjaman Bergulir, kelayakan peminjam serta Dana Pinjaman Bergulir (DPB), skim Pinjaman Bergulir, tahapan pemberian Pinjaman Bergulir, monitoring Pinjaman Bergulir, penyelesaian pinjaman bermasalah, pelaporan Pinjaman Bergulir serta monitoring dan evaluasi.

1. Kelayakan lembaga pengelola Pinjaman Bergulir

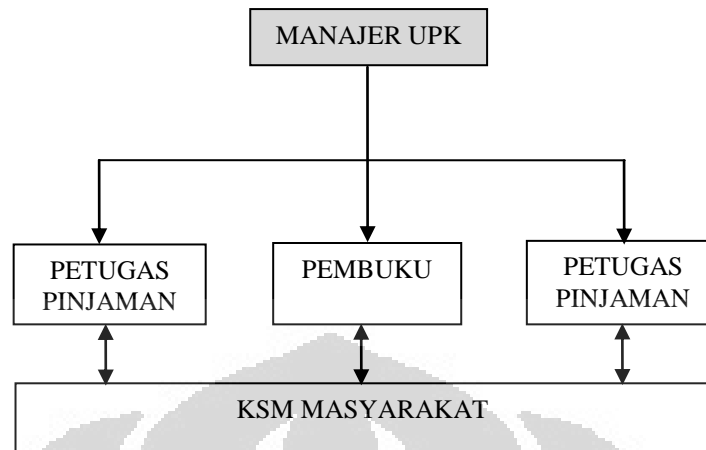
Lembaga yang langsung mengelola kegiatan Pinjaman Bergulir adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK adalah salah satu Unit Pengelola dari 3 Unit Pengelola yang berada di bawah LKM. Dua Unit Pengelola lainnya adalah Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Struktur lengkap LKM sebagai berikut:



Gambar 2.8 Struktur Organisasi LKM

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Bergulir

## STRUKTUR ORGANISASI UPK



Gambar 2.9 Struktur Organisasi UPK

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Bergulir

## a. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

LKM yang akan mengelola kegiatan Pinjaman Bergulir harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

- 1) LKM telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan dan memiliki Anggaran Dasar yang didalamnya antara lain menyatakan bahwa:
  - a) Kegiatan Pinjaman Bergulir akan dijalankan sebagai salah satu penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
  - b) Dana Pinjaman Bergulir hanya diperuntukkan untuk kegiatan Pinjaman Bergulir saja.
  - c) Pendapatan UPK hanya untuk membiayai kegiatan operasional UPK dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lainnya, termasuk biaya LKM dan Pengawas. Pengawas hanya bisa dibiayai dari laba bersih tahunan UPK.
- 2) LKM telah mengangkat Pengawas UPK (2-3 orang) dan petugas UPK (minimal 2 orang). Semua telah memperoleh pelatihan dari PNPM Mandiri Perkotaan dan telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab.
- 3) LKM dengan persetujuan masyarakat telah membuat aturan dasar Pinjaman Bergulir yang memuat kriteria KSM dan anggotanya yang boleh

menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besar jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman dan sistem angsuran pinjaman serta ketentuan mengenai tanggung renteng anggota KSM.

4) Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP):

- a) Kinerja Pinjaman Bergulir yang dijalankan mencapai kriteria memuaskan: pinjaman beresiko (LAR) < 10%, pinjaman beresiko (PAR) < 10%, rasio pendapatan biaya (CCr) > 125% dan hasil investasi (ROI) > 10%.
- b) Bersedia melakukan perbaikan kelembagaan antara lain:
  - Membentuk pengawas UPK.
  - LKM telah menerima pelatihan dari PNPM Mandiri Perkotaan
  - Telah memiliki rekening atas LKM dengan kewenangan menandatangani 3 orang.

b. Pengawas UPK

Pengawas UPK yang bertugas mengawasi kegiatan UPK dalam mengelola Pinjaman Bergulir telah memenuhi kriteria minimal antara lain:

- 1) Telah diangkat oleh LKM dengan persetujuan masyarakat sebanyak 2-3 orang, memenuhi unsur laki-laki dan perempuan.
- 2) Telah memiliki uraian tugas yang mencakup tugas dan tanggung jawab pengawas.
- 3) Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan.

c. Unit pengelola Keuangan (UPK)

Unit Pengelola Keuangan yang akan mengelola dana Pinjaman Bergulir telah memenuhi kriteria minimal sebagai berikut:

- 1) Telah diangkat oleh LKM sebanyak minimal 2 orang (ideal 4 orang).
- 2) Telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab.
- 3) Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan.
- 4) Telah memahami aturan dasar Pinjaman Bergulir.
- 5) Telah memiliki sistem pembukuan yang berlaku di PNPM Mandiri Perkotaan.



6) Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan):

- a) Kinerja Pinjaman Bergulir yang dijalankan mencapai kriteria memuaskan: pinjaman beresiko (LAR) < 10%, pinjaman beresiko (PAR) < 10%, rasio pendapatan biaya (CCr) > 125% dan hasil investasi (ROI) > 10%.
- b) Kinerja pembukuan UPK minimal memadai.

## 2. Kelayakan Peminjam

KSM Peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat pinjaman bergulir dari UPK. Hanya KSM dan anggota yang memenuhi kriteria kelayakan yang dapat dilayani oleh LKM/UPK. Dengan kata lain KSM Peminjam dan anggotanya yang tidak atau belum memenuhi kriteria kelayakan tidak dapat dilayani dan harus ada pendampingan terlebih dahulu sampai KSM Peminjam tersebut memenuhi kriteria sebagai calon peminjam.

### a. Kriteria Kelayakan KSM

- 1) KSM telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar PS2 serta seluruh anggota telah memperoleh pembekalan tentang pembukuan KSM, pinjaman bergulir (persyaratan peminjam, skim peminjam, tanggung renteng, dan tahapan peminjaman), PERT, kewirausahaan serta telah melakukan kegiatan menabung diantara anggota KSM.
- 2) KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan kekuatan modal sosial;
- 3) KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan;
- 4) Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh LKM/Masyarakat;
- 5) Jumlah anggota KSM minimal 5 orang;
- 6) Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan;
- 7) Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan;

- 8) Semua anggota KSM menyetujui sistem tanggung renteng dan dituangkan secara tertulis dalam Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng;
- 9) Semua anggota KSM telah memperoleh dari fasilitator dan LKM/UPK.

b. Kriteria Kelayakan Anggota KSM

- 1) Anggota KSM adalah warga masyarakat dan telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat;
- 2) Termasuk dalam kategori keluarga miskin daftar PS2 sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat;
- 3) Dapat dipercaya dan dapat bekerja sama dengan anggota KSM lain;
- 4) Semua anggota KSM telah mempunyai tabungan minimal 5% dari pinjaman yang diajukan dan bersedia menambah tabungan minimal 5% selama jangka waktu pinjaman dan tidak akan mengambil tabungan tersebut sebelum pinjamannya lunas;
- 5) Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya;
- 6) Belum pernah mendapat pelayanan dari lembaga keuangan yang ada.

Proses pembentukan KSM Peminjam mengacu kepada proses pembentukan KSM pada umumnya, hanya tujuan KSM Peminjam disini adalah untuk memperoleh pinjaman bergulir dari UPK.

3. Sumber Dana Pinjaman Bergulir

Sumber dana untuk kegiatan pinjaman bergulir, dapat berasal dari:

- a. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang merupakan sumber dana utama;
- b. Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Dana yang berasal dari pihak swasta;
- d. Dana dari sumber lainnya

Dana dari sumber lain berupa *channeling* atau pinjaman dari Lembaga Keuangan formal baik bank maupun koperasi di sekitar lokasi LKM berada. Tujuan dana *channelling* atau pinjaman tersebut adalah untuk menyediakan akses pinjaman bagi KSM yang sudah memenuhi batas maksimal pemberian pinjaman baik dari sisi jumlah pinjaman (telah mencapai Rp. 2.000.000,-)

**Universitas Indonesia**

atau dari sisi frekuensi peminjaman (sudah mencapai 4 kali pinjam). Diharapkan dengan dana *channelling* maupun pinjaman dari Lembaga Keuangan formal tersebut nantinya KSM dan anggotanya dapat memperoleh akses pinjaman lebih lanjut dari lembaga tersebut

#### 4. Skim Pinjaman Bergulir

Skim Pinjaman yang diatur dalam Pinjaman Bergulir antara lain:

- a. Peminjam adalah KSM dan anggotanya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan;
- b. Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang sudah ada maupun untuk menciptakan peluang usaha;
- c. Besar pinjaman pertama kali maksimal Rp. 500.000,- namun disesuaikan dengan usaha peminjam. Pinjaman selanjutnya maksimal Rp. 2.000.000,- (Diluar jumlah maksimal tersebut peminjam dapat diberikan pinjaman dengan pola *channelling* dengan Lembaga Keuangan/bank lainnya). Frekuensi pinjaman maksimal 4 kali;
- d. Jangka waktu pinjaman 3-12 bulan, tergantung dari perputaran usaha peminjam;
- e. Angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa *grace period* (tenggang waktu);
- f. Jasa pinjaman 1,5% s/d 3% per bulan, dihitung dari pokok pinjaman semula. Jasa pinjaman minimal harus menutup seluruh biaya operasional UPK.

#### 5. Tahapan Pemberian Pinjaman Bergulir

Dalam pemberian pinjaman bergulir, diatur kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap tahapan sebagai berikut:

##### a. Tahap Pengajuan Pinjaman

Calon peminjam mempersiapkan segala keperluan yang dipersyaratkan untuk memperoleh pinjaman, baik pelatihan, pembentukan simpanan, maupun kelengkapan dokumen dan pengisian blanko pengajuan pinjaman. Pada tahap pengajuan UPK wajib menjelaskan ketentuan Pinjaman Bergulir termasuk bahwa pinjaman itu sifatnya hutang yang harus dibayar kembali, bukan hibah.

b. Tahap Pemeriksaan Pinjaman

Petugas pinjaman UPK memeriksa dokumen pengajuan pinjaman yang diajukan KSM beserta anggotanya baik secara administratif maupun kunjungan lapangan menganalisis dan membuat usulan/rekomendasi kepada Manager UPK atas permohonan pinjaman dimaksud.

c. Tahap Putusan Pinjaman

Manajer UPK memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh KSM didasarkan pada hasil analisis petugas pinjaman UPK.

d. Tahap Realisasi Pinjaman

Permohonan pinjaman KSM yang telah disetujui oleh Manajer UPK disiapkan dokumen untuk pencairan, kemudian direalisasikan / dicairkan pembayarannya kepada KSM dan anggotanya. Pada tahap realisasi petugas UPK juga wajib kembali menegaskan dan menjelaskan semua ketentuan bahwa pinjaman bergulir adalah hutang yang wajib dibayar kembali dan bukan hibah.

e. Tahap Pembinaan Pinjaman

Minimal 1 bulan setelah pinjaman direalisasi petugas UPK wajib memantau keadaan peminjam, perkembangan usaha dan penggunaan pinjaman apakah digunakan sesuai tujuan semula. Pada tahapan ini petugas juga wajib mengingatkan peminjam tentang kewajiban angsuran yang harus dilakukan dan juga mengingatkan kembali bahwa pinjaman ini adalah hutang bukan hibah.

f. Tahap Pembayaran Kembali Pinjaman

Peminjam melakukan pembayaran kembali atas pinjamannya. Agar tidak sampai terjadi keterlambatan atau tunggakan, maka petugas UPK beberapa hari sebelum waktu pembayaran wajib mengingatkan peminjam atas kewajibannya. Dalam melaksanakan tugas ini petugas UPK dapat dibantu oleh relawan, aparat kelurahan/desa, tokoh masyarakat maupun Pengawas UPK.

#### 6. Monitoring Pinjaman Bergulir

Dalam kegiatan monitoring pinjaman diuraikan secara rinci kegiatan untuk mencapai kinerja pinjaman bergulir yang memuaskan dengan cara memantau secara administratif dan kunjungan kepada peminjam di lapangan.

#### 7. Penyelesaian Pinjaman Bermasalah

Dalam kegiatan penyelesaian pinjaman bermasalah, dibahas mengenai penyebab dan upaya penyelesaian pinjaman yang bermasalah (tunggakan) baik melalui penagihan secara intensif, maupun dengan penyelamatan pinjaman bermasalah.

#### 8. Pelaporan Pinjaman Bergulir

Dalam kegiatan ini diuraikan mengenai laporan yang harus dibuat oleh UPK baik laporan bulanan maupun khusus atau yang tidak terjadwal, baik neraca laba/rugi maupun untuk aplikasi SIM dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban UPK atas kinerja Pinjaman Bergulir yang dikelola.

### 2.6.1. Indikator Keberhasilan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Bergulir, monitoring serta evaluasi Pinjaman Bergulir didasarkan pada kerangka logis (*logical framework*) yang telah dirumuskan dan terdiri dari 31 indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk menguji apakah tujuan serta 4 output / hasil dari strategi pendukung telah tercapai. Monitoring kinerja Pinjaman Bergulir secara umum didasarkan pada kerangka logis yang terdiri dari satu tujuan umum, satu tujuan pinjaman bergulir, 4 (empat) output/hasil Pinjaman Bergulir dan 31 indikator kinerja sebagaimana tertera di bawah ini:

Tabel 2.4 Kerangka Logis Strategi Pengembangan Pinjaman Bergulir

Hirarki Tujuan	Indikator Kinerja	Jun 08	Des 08	Jun 09	Des 09	Des 10
<p><i>Tujuan Umum:</i></p> <p>Keadaan ekonomi dari masyarakat golongan miskin telah meningkat,</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya omzet usaha, pendapatan, dan modal sendiri bagi warga miskin kelompok sasaran proyek.</li> <li>2. Meningkatnya aset, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, bagi warga miskin kelompok sasaran proyek.</li> <li>3. Kegiatan sistem Pinjaman Bergulir tidak merusak tatanan lembaga keuangan mikro yang sudah ada.</li> </ol>					

Universitas Indonesia

(Sambungan tabel 2.4)

Hirarki Tujuan	Indikator Kinerja	Jun 08	Des 08	Jun 09	Des 09	Des 10
<i>Tujuan pinjaman mikro:</i> UPK telah meningkatkan jangkauan pelayanannya kepada kelompok masyarakat miskin dengan pinjaman bergulir yang sehat untuk memperbaiki ekonominya dan membangun pengalaman memanfaatkan pinjaman yang layak	4. UPK yang telah seluruh peminjamnya berasal dari keluarga miskin / berpenghasilan rendah.	70%	75%	80%	90%	90%
	5. % UPK yang KSM peminjamnya beranggotakan minimal 30% perempuan.	20%	40%	50%	70%	70%
	6. % KSM yang telah selesai dengan periode pinjaman bergulir UPK dan telah menabung ke lembaga keuangan formal.	20%	40%	50%	70%	70%
	7. %UPK dengan KSM Peminjam yang mendapat pinjaman kembali (berulang) > 25%	20%	40%	50%	70%	70%
	8. Peminjam dengan catatan pinjaman yang bagus berlanjut akses pinjamannya.	-	-	80%	90%	90%
	9. UPK dengan kinerja memuaskan.	2.000	3.000	3.500	4.000	4.000
	10. UPK yang memenuhi standar pelayanan minimal	60%	65%	75%	85%	85%
<i>Output/hasil 1:</i> Sedikitnya 70% UPK telah mencapai kinerja keuangan yang memuaskan	11. %UPK dengan LAR $\geq$ 3 bulan kurang dari 10%	30%	50%	55%	60%	70%
	12. %UPK dengan PAR $\geq$ 3 bulan kurang dari 10%	35%	70%	80%	90%	90%
	13. % UPK Dengan CCR lebih dari 125%	35%	50%	80%	90%	90%
	14. %UPK dengan ROI lebih dari 10%	35%	50%	80%	90%	90%
	15. %UPK yang memiliki jasa pinjaman lebih tinggi dari BRI untuk kredit mikronya	80%	90%	90%	90%	90%
<i>Output/hasil 2:</i> Semua UPK secara operasional terpisah dari LKM dan berfungsi secara memuaskan	16. %UPK yang telah memiliki tanggung jawab penuh dan mengelola kegiatannya sehari-hari	10%	40%	75%	100%	100%
	17. %UPK yang secara keuangan terpisah dari LKM	10%	40%	75%	100%	100%
	18. %UPK yang kinerjanya "Sangat Baik" dalam evaluasi bulanan	10%	30%	50%	75%	75%
	19. %UPK yang menyerahkan Laporan Keuangan Bulanan tepat waktu kepada Pengawas	60%	70%	80%	90%	90%
	20. % UPK yang menyerahkan data keuangan tepat waktu kepada PNPM melalui sistem pelaporan <i>on-line</i>	10%	40%	100%	100%	100%
<i>Output/hasil 3:</i> LKM telah memiliki pengawasan yang memadai ke UPK	21. %LKM memenuhi persyaratan kelayakan untuk mengelola pinjaman bergulir	10%	30%	65%	70%	70%
	22. %LKM telah memiliki landasan hukum yang dipersyaratkan (AD /ART)	10%	40%	75%	90%	90%
	23. %LKM yang memiliki UPK dan telah memiliki sistem pengawasan	10%	40%	75%	90%	90%
	24. %LKM yang memiliki UPK telah memiliki laporan pemeriksaan terakhir termasuk risalahnya.	10%	30%	50%	75%	75%

(Sambungan tabel 2.4)

Hirarki Tujuan	Indikator Kinerja	Jun 08	Des 08	Jun 09	Des 09	Des 10
<u>Output/hasil 4:</u>  PNPM telah menyediakan pelatihan yang memadai, dukungan teknis dan monitoring ke masyarakat	25. TA Pinjaman Mikro telah dimobilisir, TA Pinjaman Bergulir Nasional telah dibentuk dan aktif	Feb 2008				
	26. Fasilitator khusus kredit mikro telah dilatih dan telah siap aktif	X				
	27. Sistem Klasifikasi UPK telah dibentuk dan semua UPK telah dibuat rankingnya	Siap	75%	100%		
	28. UPK telah diaudit tahunan	20%	50%	50%	90%	90%
	29. %UPK yang tertunda karena RR < 75%		40%		70%	70%
	30. Pedoman Teknis untuk LKM dan UPK telah selesai.	X				
31. Rencana Tahunan untuk pelaksanaan telah lengkap dan telah dimonitor.	X					

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Bergulir

## 2.7. Gambaran Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Kecamatan Petarukan adalah salah satu kecamatan perkotaan di wilayah Kabupaten Pemalang. Kecamatan Petarukan terletak di dataran rendah dengan ketinggian 7 meter di atas permukaan laut, dengan jarak dari barat ke timur kurang lebih 9 km dan jarak dari utara ke selatan kurang lebih 14 km. Jarak ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten kurang lebih 7 km dan terletak pada jalan utama pantura Jawa. Kecamatan Petarukan terdiri dari 1 kelurahan dan 19 desa dengan kemiskinan hampir merata di semua wilayah kelurahan dan desa tersebut. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk dan penduduk miskin di Kecamatan Petarukan pada tahun 2007.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin di Wilayah Kecamatan Petarukan Tahun 2007

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (KK)	Persentase Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (KK)
1	Bulu	5.671	1.417	2.327	665	41,03	46,93
2	Iser	4.203	840	2.725	548	64,83	65,24
3	Kalirandu	9.739	3.140	3.809	1.258	39,11	40,06
4	Karangasem	4.219	1.070	1.536	480	36,41	44,86

Universitas Indonesia

(Sambungan tabel 2.5)

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (KK)	Persentase Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (KK)
5	Kendaldoyong	12.318	2.603	6.560	1.515	53,26	58,20
6	Kendalrejo	6.497	1.806	2.289	1.806	35,23	100
7	Kendalsari	12.246	2.445	3.000	750	24,50	30,67
8	Klareyan	11.980	2.995	6.960	1.740	58,10	58,10
9	Loning	8.946	2.273	4.552	1.517	50,88	66,74
10	Nyamplungsari	6.047	1.676	3.079	775	50,92	46,24
11	Panjunan	3.719	877	2.108	525	56,68	59,84
12	Pegundan	12.647	2.328	5.142	953	40,66	40,94
13	Pesucen	8.099	2.024	4.440	1.110	54,82	54,84
14	Petanjungan	5.358	1.457	1.960	595	36,58	40,84
15	Petarukan	18.720	4.382	7.888	1.972	42,14	45
16	Serang	7.642	1.900	2.760	553	36,12	29,11
17	Sirangkang	3.329	832	1.350	535	40,55	64,30
18	Tegalmlati	6.682	1.655	3.193	864	47,79	52,21
19	Temuireng	6.263	1.564	2.071	515	33,07	32,93
20	Widodaren	8.331	1.667	7.500	1.500	90,03	89,98
<b>Jumlah</b>		<b>162.656</b>	<b>38.951</b>	<b>75.249</b>	<b>20.176</b>	<b>46,26</b>	<b>51,80</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang.

PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kecamatan Petarukan yang dilaksanakan sejak tahun 2007, meliputi tiga daya atau bidang (Tridaya) yaitu daya pembangunan Sosial, daya pembangunan Lingkungan dan daya pembangunan Ekonomi. Keseluruhan dana yang dikucurkan untuk tiga bidang tersebut adalah Rp. 3.181.943.250,-. Sedangkan dana yang dialokasikan khusus untuk daya/bidang pembangunan ekonomi yaitu Pinjaman Bergulir sebesar Rp. 1.330.275.000,-.



## 2.8. Studi Terdahulu Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) atau PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP)

Beberapa studi tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) atau PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh:

- 1) Radiana Mahaga pada tahun 2009 tentang Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahap 2 (P2KP-2) di Jawa Barat terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat.
- 2) Ratnaniengsih, tahun 2003, berjudul Evaluasi Peran BKM pada Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Studi Tentang Perubahan Perilaku Masyarakat. Studi kasus di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
- 3) Heru Widiatoro, tahun 2003, Kajian Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). (Studi kasus pelaksanaan P2KP di Kelurahan Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DIY)
- 4) Imam Prakoso, tahun 2003, Pengaruh Bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) terhadap Pendapatan Penerima Bantuan di Kelurahan Kalibaru.
- 5) Sonti Pangaribuan, 2005, Evaluasi Program P2KP Studi Kasus BKM Bina Budi Mulia Kelurahan Pancoran Mas.

Dari beberapa hasil sudi tersebut sebagian besar penelitian terhadap P2KP menitikberatkan pada proses kelembagaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, seperti peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), perilaku masyarakat, pengaruh variabel-variabel dalam P2KP seperti peran fasilitator program dan sebagainya, serta peran P2KP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Hanya satu studi yang membahas tentang evaluasi dampak P2KP terhadap tingkat konsumsi masyarakat yaitu dilakukan oleh Radiana Mahaga di Provinsi Jawa Barat. Studi tersebut meneliti dampak P2KP secara keseluruhan meliputi daya Lingkungan, Sosial dan Ekonomi. Sedangkan penulis tertarik untuk meneliti dampak PNPM Mandiri Perkotaan terhadap tingkat konsumsi masyarakat di daerah tempat penulis tinggal dan bekerja yaitu di Kabupaten Pematang, khususnya dari segi Pengembangan Ekonomi berupa Pinjaman Bergulir. Karena menurut hemat penulis Daya Ekonomi berupa kegiatan Pinjaman

**Universitas Indonesia**

Bergulir inilah yang berdampak langsung terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Selain itu penelitian ini juga dilakukan karena evaluasi dampak kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan terhadap tingkat konsumsi masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Pemalang belum pernah dilakukan, padahal penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebagai pelaksana program di daerah, juga bagi *stakeholder* lainnya untuk mengetahui sejauh mana indikator-indikator tujuan program dapat dicapai. Hasil dari penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengetahui apakah desain program sudah tepat, apakah sumberdaya digunakan secara efisien dan apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan indikator hasil yang diharapkan.



## **BAB 3**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Analisis**

Kemiskinan, menjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang tidak berubah dari 22% - 25% antara tahun 2005 – 2009, bahkan selalu lebih tinggi dari rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang berada di posisi terendah ke-2 atau ranking 34 dari 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kemiskinan perkotaan tetap berada di kisaran 8% sejak tahun 2006 hingga 2010. Sementara itu, salah satu dampak dari kemiskinan, yaitu munculnya anak jalanan, jumlahnya tidak berubah dari 5.800 – 5.900an sejak tahun 2005 hingga 2010. Permasalahan ekonomi yang dihadapi warga miskin di Kecamatan Petarukan antara lain adalah rendahnya pendapatan, terbatasnya kesempatan kerja yang bisa dimasuki, rendahnya kepemilikan aset sehingga membatasi mereka untuk melakukan kegiatan usaha atau produksi, ketiadaan modal serta ketiadaan akses ke lembaga keuangan formal.

Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan. Program ini merupakan suatu program pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dengan sasaran program adalah masyarakat, pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya. Masyarakat berperan aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program, mulai dari identifikasi (pemetaan) kemiskinan di daerahnya, membentuk suatu lembaga keswadayaan masyarakat sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka, mengidentifikasi prioritas kebutuhan serta melaksanakan program dengan pendampingan dari pemerintah daerah. Peran Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak terbatas sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di daerah, namun juga mengalokasikan dana APBD untuk DDUPB (Dana Daerah Untuk Program Bersama). DDUPB ini adalah dana pendamping dari pemerintah daerah untuk mendukung melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan.

Pinjaman Bergulir merupakan salah satu kegiatan dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang berdasarkan sifat kemanfaatan kegiatan adalah kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat dan peningkatan pendapatan bagi individu/keluarga maupun kelompok dan sekaligus membangun modal sosial. Pinjaman Bergulir ini merupakan upaya untuk mengatasi masalah ekonomi yang dialami oleh warga miskin berupa rendahnya pendapatan, ketiadaan modal serta ketiadaan akses ke lembaga keuangan formal. Pinjaman Bergulir menyediakan akses layanan keuangan bagi rumah tangga miskin untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Pelaksanaan Pinjaman Bergulir setelah menjadi PNPM Mandiri Perkotaan diperbaiki antara lain dengan menerapkan kriteria yang ketat bagi rumah tangga atau KSM penerima program, sehingga kesalahan sasaran seperti yang terjadi pada Pinjaman Bergulir saat P2KP (sebelum PNPM) dapat diminimalisir.

Pendekatan analisis dalam penelitian ini adalah dengan strategi pelaksanaan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, persiapan pelaksanaan program yang lebih baik dibandingkan sebelum PNPM, partisipasi masyarakat serta pemerintah daerah, seyogyanya salah satu indikator keberhasilan program membaik, yaitu meningkatnya pengeluaran rumah tangga miskin sasaran proyek.

### **3.2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada masyarakat miskin perkotaan serta mengevaluasi dampak kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dalam peningkatan pengeluaran rumah tangga penerima manfaat. Karena itu pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah melakukan penelitian survai ke lokasi/kelompok penerima Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan (*treatment group* atau Kelompok Aksi) dan ke kelompok masyarakat dengan karakteristik kemiskinan yang sama tetapi tidak menerima proyek Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan (*control group* atau Kelompok Kontrol). Menurut Singarimbun (1989) penelitian survai adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian survai dapat digunakan untuk maksud: (1)

penjajagan (eksploratif); (2) deskriptif; (3) penjelasan (*explanatory* atau *confirmatory*), yakni menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa; (4) evaluasi; (5) prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang akan datang; (6) penelitian operasional; dan (7) pengembangan indikator-indikator sosial. Dalam tujuannya untuk evaluasi, pertanyaan pokok adalah sampai seberapa jauh tujuan yang digariskan pada awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai.

Selain penelitian survai, pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian eksperimen. Menurut Singarimbun (1989) penelitian eksperimen sangat sesuai untuk pengujian hipotesa tertentu dan dimaksudkan untuk mengetahui hubungan sebab akibat variabel penelitian. Eksperimen dapat dilakukan tanpa atau dengan kelompok pembanding (*control group*). Dalam penelitian eksperimen yang tidak menggunakan kelompok kontrol hasil penelitian tersebut diragukan keabsahannya, karena beberapa variabel yang mengancam atau yang melemahkan validitas penelitian tidak terkontrol. Karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan kelompok kontrol yaitu kelompok masyarakat miskin perkotaan yang memiliki karakteristik sama namun tidak memperoleh manfaat dari kegiatan Pinjaman Bergilir PNPM Mandiri Perkotaan .

Indikator untuk mengukur dampak program Pinjaman Bergulir adalah Indikator Keberhasilan yang telah ditetapkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Tujuan akhir PNPM Mandiri Perkotaan dan tujuan umum Pinjaman Bergulir adalah sama yaitu keadaan ekonomi masyarakat golongan miskin meningkat, dimana salah satu indikatornya adalah meningkatnya angka pengeluaran rumah tangga penerima proyek. Untuk mengukur pengeluaran rumah tangga, penulis menggunakan konsep pengukuran pengeluaran menurut BPS sebagai pengukuran resmi yang digunakan oleh pemerintah. Data pengeluaran yang digunakan adalah data pengeluaran dengan metode dari SUSENAS yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan. Konsumsi makanan merupakan nilai makanan yang dikonsumsi dalam satu minggu terakhir baik yang diperoleh dari membeli sendiri. Sedangkan konsumsi bukan makanan terbagi dalam dua bagian yaitu pengeluaran bulanan untuk fasilitas rumah tangga seperti tagihan listrik dan air, dan aneka barang dan jasa untuk keperluan sehari-hari seperti sabun mandi, alat kecantikan, transportasi dan pengeluaran tahunan seperti

sewa rumah, biaya pendidikan, pajak dan asuransi. Lebih jelasnya jenis konsumsi makanan dan bukan makanan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Konsumsi Makanan

<b>Konsumsi untuk makanan selama satu minggu terakhir</b>
1. <b>Padi-padian</b> (beras, jagung, terigu,, tepung beras, tepung jagung, dll)
2. <b>Umbi-umbian</b> (ketela pohon, ketela rambat, kentang, gaplek, talas, sagu, dll)
3. <b>Ikan</b> (ikan segar, ikan diawetkan/asin, udang, dll)
4. <b>Daging</b> (daging sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ayam, jeroan, ati, limpa, abon, dendeng, dll)
5. <b>Telur dan susu</b> (telur ayam/itik/puyuh, susu segar, susu kental, susu bubuk, dll)
6. <b>Sayur-sayuran</b> (bayam, kangkung, ketimun, wortel, kacang panjang, buncis, bawang, cabe, tomat, dll)
7. <b>Kacang-kacangan</b> (kacang tanah/hijau/kedele/merah/tunggak, mete, tahu, tempe, tauco, oncom, dll)
8. <b>Buah-buahan</b> (jeruk, mangga, apel, durian, rambuta, salak, duku, nanas, semangka, pisang, pepaya, dll)
9. <b>Minyak dan lemak</b> (minyak kelapa/goreng, kelapa, mentega, dll)
10. <b>Bahan minuman</b> (gula pasir, gula merah, teh, kopi, coklat, sirup, dll)
11. <b>Bumbu-bumbuan</b> (garam, kemiri, ketumbar, merica, terasi, kecap, dll)
12. <b>Konsumsi lanilla</b> (kerupuk, eming, mie, bihun, makaroni, dll)
13. <b>Makanan dan minuman jadi</b> (roti, biskuit, kue basah, bubur, bakso, es sirop, limun, gado-gado, nasi rames, dll)
14. <b>Minuman mengandung alkohol</b> (bir, anggur, dan minuman keras lainnya)
15. <b>Tembakau dan sirih</b> (rokok kretek, rokok putih, cerutu, tembakau, sirih, pinang, dll)

Sumber: BPS

Tabel 3.2 Konsumsi Bukan makanan

<b>Konsumsi Bukan makanan</b>
<p><b>1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga</b></p> <p>a. Sewa, perkiraan harga sewa jika rumah sendiri, bebas sewa, dinas, kontrak, dll.</p> <p>b. Rekening listrik, rekening telepon, gas, minyak tanah, air, kayu bakar, dll.</p> <p>c. Pemeliharaan rumah dan perbaikan ringan.</p>
<p><b>2. Aneka barang dan jasa</b> (sabun mandi, alat kecantikan, pengangkutan, bacaan, pembuatan KTP/SIM, rekreasi, kartu telepon, benda pos, dll)</p>
<p><b>3. Biaya pendidikan</b> (uang pendaftaran, SPP, POMG/BP3, uang pangkal, daftar ulang, pramuka, prakarya, kursus, dll)</p>
<p><b>4. Biaya kesehatan</b> (rumah sakit, puskesmas, dokter praktek, dukun, obat-obatan, dll)</p>
<p><b>5. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala</b> (bahan pakaian, pakaian jadi, sepatu, topi, sabun cuci, dll)</p>
<p><b>6. Barang tahan lama</b> (alat rumah tangga, perkakas, alat dapur, alat hiburan/elektronik, alat olah raga, perhiasan, kendaraan, payung, arloji, kamera, pasang telepon, pasang listrik, barang elektronik, dll)</p>
<p><b>7. Pajak dan asuransi</b></p> <p>a. Pajak (PBB, kendaraan)</p> <p>b. Asuransi (asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan)</p>
<p><b>8. Keperluan pesta dan upacara</b> (perkawinan, khitanan, ulang tahun, perayaan hari agama, upacara adat, dll)</p>

Sumber: BPS

Disamping kedua pendekatan penelitian di atas penulis juga menggunakan data sekunder, berupa data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka meliputi profil daerah tujuan penelitian maupun angka-angka pencapaian program yang terdapat dalam laporan proyek PNPM Mandiri Perkotaan.

### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono; 2006). Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila

populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Dalam penelitian ini sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*, dimana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. (Sugiyono; 2006). Teknik ini dilakukan karena anggota populasi (penerima dan bukan penerima manfaat Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan) adalah homogen. Sampel diambil dari dua kelompok masyarakat yaitu rumah tangga penerima manfaat dan bukan penerima manfaat (kontrol) dalam periode waktu sebelum dan setelah intervensi program. Untuk menentukan sampel rumah tangga penerima manfaat (Kelompok Aksi) penulis menggunakan beberapa kriteria yaitu:

1. Apabila sampel dari satu desa/kelurahan berjumlah 5 KK, maka diambil dari satu KSM yang sama dan bila jumlah sampel lebih dari 5 KK misalnya 7 KK, maka 2 sisa lebihnya itu diambil dari KSM lain, tapi keduanya berada dalam KSM yang sama.
2. Untuk desa/kelurahan yang kegiatan Pinjaman Bergulir mencapai 1 dan 2 kali perguliran, sampel adalah KSM yang semua anggotanya telah melunasi pinjaman pada perguliran tersebut. Untuk desa yang telah mencapai 4 kali perguliran maka sampel adalah KSM yang telah melunasi 3 kali perguliran dan pada saat penelitian sedang berada di periode perguliran ke-4.
3. Sampel diambil pada KSM yang jumlah maupun personel anggotanya tidak mengalami perubahan sejak perguliran pertama sampai dengan perguliran saat dilakukan penelitian.
4. Sampel adalah rumah tangga miskin yang menerima BLM Pinjaman Bergulir namun tidak menerima bantuan program pemerintah untuk masyarakat miskin lainnya yaitu raskin.



Sedangkan untuk menentukan sampel kelompok kontrol dilakukan dengan memperhatikan kriteria:

1. Rumah tangga miskin yang menjadi sampel adalah rumah tangga miskin yang mempunyai tingkat kemiskinan sama dengan rumah tangga miskin penerima manfaat kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Kesamaan tingkat kemiskinan dilihat dari tingkat konsumsi perkapita perbulan pada tahun 2007 (*baseline*).
2. Rumah tangga miskin sebagai sampel kelompok kontrol bertempat tinggal di luar wilayah Kecamatan Petarukan untuk menghindari kemungkinan transfer dana Pinjaman Bergulir dari rumah tangga miskin penerima Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan.
3. Rumah tangga miskin kelompok kontrol tidak/belum pernah menerima bantuan baik BLT maupun raskin.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sebagai *treatment group* adalah seluruh penerima manfaat program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di seluruh desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang pada tahun 2007. Berikut ini adalah jumlah KK penerima manfaat dana Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Ekonomi (BLM E) berupa Pinjaman Bergulir dan besaran dana BLM E di tiap desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Petarukan pada tahun 2007.

Tabel 3.3 Populasi Kelompok Aksi

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Dana BLM Ekonomi	Jumlah KK Miskin	Jumlah KK Miskin Penerima Manfaat	Persentase
1	Bulu	58.500.000	665	126	18,95
2	Iser	58.500.000	548	132	24,09
3	Kalirandu	61.500.000	1.258	123	9,78
4	Karangasem	58.500.000	480	117	24,38
5	Kendaldoyong	98.000.000	1.515	226	14,92
6	Kendalrejo	58.700.000	1.806	129	7,14
7	Kendalsari	98.000.000	750	203	27,07
8	Klareyan	98.000.000	1.740	252	14,48
9	Loning	58.500.000	1.517	152	10,02
10	Nyamplungsari	58.500.000	775	153	19,74
11	Panjunan	58.500.000	525	117	22,29
12	Pegundan	98.000.000	953	199	20,88
13	Pesucen	56.000.000	1.110	112	10,09

Universitas Indonesia

(Sambungan tabel 3.3)

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Dana BLM Ekonomi	Jumlah KK Miskin	Jumlah KK Miskin Penerima Manfaat	Persentase
14	Petanjungan	13.775.000	595	31	5,21
15	Petarukan	101.500.000	1.972	202	10,24
16	Serang	58.500.000	553	115	20,88
17	Sirangkang	61.500.000	535	123	22,99
18	Tegalmlati	58.500.000	864	132	15,28
19	Temuireng	58.800.000	515	145	28,16
20	Widodaren	58.500.000	1.500	131	8,73
<b>Total</b>		<b>1.330.275.000</b>	<b>20.176</b>	<b>2.920</b>	<b>14,47</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang. Telah diolah.

Dari tabel di atas diketahui bahwa populasi penerima manfaat (Kelompok Aksi) adalah sebesar 2.920 KK (Kepala Keluarga). Untuk menentukan besarnya sampel yang akan diteliti digunakan penghitungan berdasarkan rumus Slovin, dan sampel diambil secara acak. Rumus Slovin sebagaimana dinyatakan dalam Pengantar Metode Penelitian; Sevilla et al. (2006) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (3.1)$$

dimana:

$n$  = *Number of samples* (jumlah sampel)

$N$  = *Total population* (jumlah seluruh anggota populasi)

$e$  = *Error tolerance* yaitu nilai (kritis batas ketelitian) yang diinginkan

Dengan *error tolerance* sebesar 10% maka berdasarkan penghitungan dengan rumus slovin, jumlah sampel yang diambil adalah 96,69 KK. Karena jumlahnya pecahan maka jumlah sampel dibulatkan ke atas menjadi 110 KK, sebab semakin besar sampel maka semakin baik. Dengan demikian jumlah sampel yang diambil adalah seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Sampel Kelompok Aksi

No	Desa/Kelurahan	Jumlah KK Penerima Manfaat (Populasi)	Persentase Sampel	Jumlah Sampel
1	Bulu	126	4,32	5
2	Iser	132	4,52	5
3	Kalirandu	123	4,21	5

Universitas Indonesia

(Sambungan tabel 3.4)

No	Desa/Kelurahan	Jumlah KK Penerima Manfaat (Populasi)	Persentase Sampel	Jumlah Sampel
4	Karangasem	117	4,01	5
5	Kendaldoyong	226	7,74	8
6	Kendalrejo	129	4,42	5
7	Kendalsari	203	6,95	7
8	Klareyan	252	8,63	9
9	Loning	152	5,21	6
10	Nyamplungsari	153	5,24	6
11	Panjunan	117	4,01	5
12	Pegundan	199	6,82	7
13	Pesucen	112	3,84	4
14	Petanjungan	31	1,06	2
15	Petarukan	202	6,92	7
16	Serang	115	3,94	4
17	Sirangkang	123	4,21	5
18	Tegalmlati	132	4,52	5
19	Temuireng	145	4,97	5
20	Widodaren	131	4,49	5
<b>Total</b>		<b>2.920</b>	<b>100</b>	<b>110</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang. Telah diolah.

Kelompok kontrol (*control group*) adalah penduduk miskin yang tidak menerima manfaat Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan tetapi mempunyai karakteristik yang sama dengan penerima manfaat kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Kesamaan karakteristik dilihat pada kesamaan tingkat konsumsi perkapita perbulan pada tahun 2007 sebelum adanya intervensi program. Data ini didapat dari data PS2 yaitu data penduduk yang memenuhi kriteria miskin di wilayah Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Populasi kelompok kontrol tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Populasi Kelompok Kontrol

No	Desa/Kelurahan	Jumlah KK Miskin
1	Ambowetan	614
2	Blendung	1.124
3	Botekan	851
4	Bumirejo	1.274
5	Kaliprau	1.624
6	Kertosari	619
7	Ketapang	1.457

Universitas Indonesia

(Sambungan tabel 3.5)

No	Desa/Kelurahan	Jumlah KK Miskin
8	Limbangan	1.343
9	Mojo	680
10	Padek	447
11	Pagergunung	785
12	Pamutih	1.021
13	Pesantren	613
14	Rowosari	1.661
15	Samong	528
16	Sukorejo	808
17	Tasikrejo	743
18	Wiroyowetan	1.340
<b>Total</b>		<b>17.532</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang

Dari tabel di atas, jumlah populasi untuk *control group* adalah 17.532 KK. Dengan perhitungan rumus Slovin, maka sampel yang diambil sebanyak 99,43 KK. Sama halnya sampel pada *treatment group* maka sampel pada *control group* ini juga dibulatkan menjadi 110 KK sehingga diperoleh jumlah sampel seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Sampel Kelompok Kontrol

No	Desa/Kelurahan	Jumlah KK Miskin	Presentase	Jumlah Sampel
1	Ambowetan	614	3,12	4
2	Blendung	1.124	6,58	7
3	Botekan	851	4,93	6
4	Bumirejo	1.274	7,47	8
5	Kaliprau	1.624	9,72	10
6	Kertosari	619	3,17	4
7	Ketapang	1.457	8,62	9
8	Limbangan	1.343	7,91	8
9	Mojo	680	3,60	4
10	Padek	447	2,36	3
11	Pagergunung	785	4,37	5
12	Pamutih	1.021	5,78	6
13	Pesantren	613	3,27	4
14	Rowosari	1.661	9,84	10
15	Samong	528	2,39	3

Universitas Indonesia

(Sambungan tabel 3.6)

No	Desa/Kelurahan	Jumlah KK Miskin	Presentase	Jumlah Sampel
16	Sukorejo	808	4,68	6
17	Tasikrejo	743	4,24	5
18	Wiroyawetan	1.340	7,93	8
<b>Total</b>		<b>17.532</b>	<b>100,00</b>	<b>110</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang. Telah diolah.

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. (Sugiyono, 2006). Sumber sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam hal ini penulis menggunakan data yang dikeluarkan oleh Bappeda Kabupaten Pemalang sebagai satuan kerja perangkat daerah penanggung jawab proyek PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pemalang. Data tersebut antara lain adalah:

- 1) Pengembangan Informasi Profil Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Semester II;
- 2) Kabupaten Pemalang Dalam Angka Tahun 2010;
- 3) Kecamatan Petarukan Dalam Angka Tahun 2010;
- 4) Kecamatan Ulujami Dalam Angka Tahun 2010;
- 5) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007;
- 6) Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016;
- 7) Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pemalang Tahun 2010;
- 8) Data kemiskinan Propinsi Jawa Tengah tahun 2010;
- 9) Perda Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- 10) Keputusan Bupati Pemalang Nomor 050/220.B/BPP tentang Perubahan Atas keputusan Bupati Pemalang Tanggal 10 November 2009 Nomor: 050/311/BPP

tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pematang Jaya;

- 11) Evaluasi Pelaksanaan P2KP Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2006;
- 12) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PNPM-P2KP Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2009; serta
- 13) Laporan-laporan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2007.

Sedangkan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. (Sugiyono, 2006). Data yang didapat dari sumber primer merupakan data primer, dalam hal ini penulis mencari data langsung dari masyarakat berupa kuesioner konsumsi makanan dan bukan makanan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat (Kelompok Aksi) dan kelompok masyarakat bukan penerima manfaat (Kelompok Kontrol) yang terdiri dari data konsumsi sebelum intervensi (data *baseline*) dan sesudah intervensi / pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (data *impact*). Selain kuesioner, untuk memperdalam pemahaman terhadap masalah yang sedang diteliti, penulis juga melakukan wawancara (interview) pada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya, antara lain dengan: Kepala Bappeda Kabupaten Pematang Jaya dan jajarannya, Koordinator Kabupaten beserta *crew* (para fasilitator dan pengolah data), masyarakat baik UPK (Unit Pelaksana Keuangan) di desa/kelurahan, anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) maupun masyarakat miskin penerima dan bukan penerima manfaat PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2007.

### 3.5. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah data dikumpulkan adalah analisa data. Analisa data harus dilakukan dengan cara yang tepat agar dapat ditarik kesimpulan yang akurat dari fenomena sosial yang diteliti sehingga hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan pendekatan evaluasi dampak. Sugiyono (2006) mengatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Termasuk dalam statistika deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, *pictogram*, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase.

Untuk mengetahui apakah kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Menghasilkan dampak sesuai dengan yang diharapkan yaitu meningkatnya tingkat konsumsi rumah tangga penerima manfaat, metode yang digunakan untuk mengukurnya adalah *impact evaluation* (evaluasi dampak). Dengan metode *impact evaluation* dilakukan pengukuran nilai indikator sebelum dan setelah intervensi program pada dua kelompok yaitu kelompok yang mendapat intervensi program (Kelompok Aksi) dan kelompok yang tidak mendapat intervensi program (Kelompok Kontrol). Indikator yang akan diukur adalah tingkat konsumsi perkapita perbulan. Indikator sebelum intervensi program adalah tingkat konsumsi perkapita perbulan pada tahun 2007 (*baseline*) dan indikator setelah intervensi program adalah tingkat konsumsi perkapita perbulan tahun 2011 (*impact*). Pada masing-masing kelompok dilakukan penghitungan selisih nilai indikator pada saat *impact* dan *baseline*. Setelah itu kurangkan kedua selisih (selisih dalam selisih), sehingga diperoleh nilai dampak yang dihasilkan dari intervensi program.

Rumus penghitungan:

$$\Delta Y = (Y_{A1} - Y_{A0}) - (Y_{K1} - Y_{K0}) \quad (3.2)$$

Dimana:

A0 = konsumsi perkapita perbulan rumah tangga Aksi sebelum intervensi program

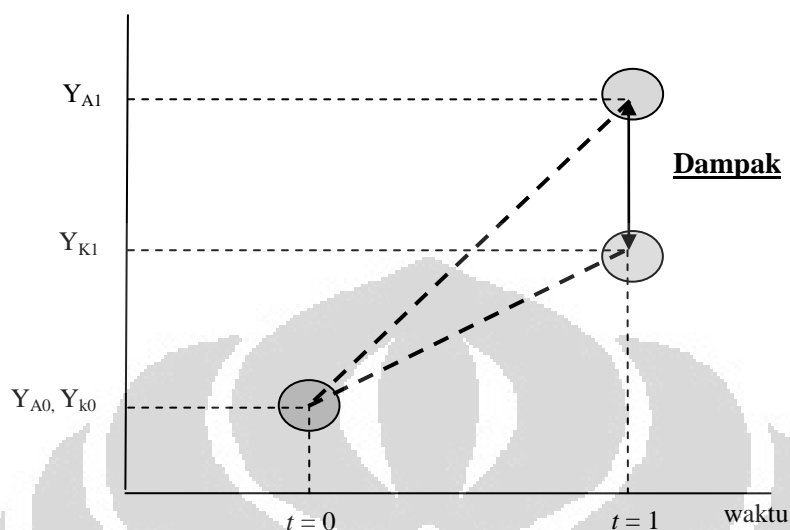
A1 = konsumsi perkapita perbulan rumah tangga Aksi setelah intervensi program

K0 = konsumsi perkapita perbulan rumah tangga Kontrol sebelum periode program

K1 = konsumsi perkapita perbulan rumah tangga Kontrol setelah periode program

Sumber: Mahaga (2009).

Apabila digambar, maka pengukuran dampak Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan seperti berikut ini:



Gambar 3.1 Pengukuran Dampak dengan Kelompok Kontrol

Sumber: Bappenas

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan uji  $t$  pada sampel Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kesamaan rata-rata tingkat konsumsi perkapita perbulan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol sebelum periode intervensi program, yaitu tahun 2007 sebagai tahun *baseline*. Apabila sama, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Apabila tidak sama maka dilakukan pemilihan sampel kembali sampai hasil uji  $t$  menghasilkan kesamaan rata-rata konsumsi perkapita perbulan pada kedua kelompok.

Rumus uji  $t$  pada pengujian rerata 2 sampel adalah:

$$t = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{S_A^2}{n_A} + \frac{S_B^2}{n_B}}} \quad (3.3)$$

Dimana

$X_A$  = rerata skor kelompok eksperimen

$X_B$  = rerata skor kelompok kontrol

Universitas Indonesia



$S_A^2$  = variance kelompok eksperimen

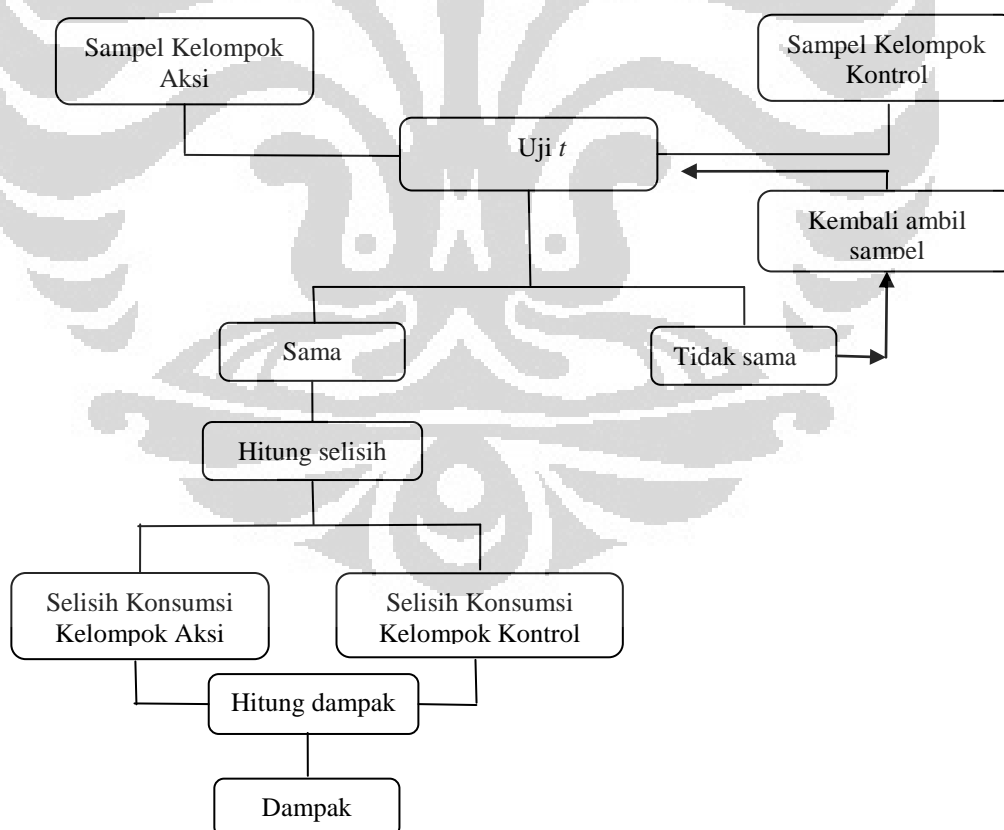
$S_B^2$  = variance kelompok kontrol

$n_A$  = banyaknya sampel pada kelompok eksperimen

$n_B$  = banyaknya sampel pada kelompok kontrol

Sumber: Sudjana (1996).

2. Melakukan penghitungan dampak dengan cara:
  - a. Menghitung selisih rata-rata konsumsi perkapita perbulan Kelompok Aksi sebelum dan sesudah intervensi program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan;
  - b. Menghitung selisih rata-rata konsumsi perkapita perbulan Kelompok Kontrol pada periode yang sama dengan penghitungan pada Kelompok Aksi;
  - c. Menghitung selisih hasil pada poin a dan b.
 Apabila digambarkan, maka langkah-langkah tersebut di atas seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2 Langkah-langkah dalam Evaluasi Dampak

Untuk mengukur kemiskinan, penulis menggunakan ukuran Garis Kemiskinan menurut BPS. Adapun garis kemiskinan perkotaan Propinsi Jawa Tengah tahun 2007 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Garis Kemiskinan Propinsi Jawa Tengah

Tahun	2007	2011
Garis Kemiskinan (Rp)	154.111	209.611

Sumber: BPS (<http://www.bps.go.id>)

Berdasarkan proporsi terhadap garis kemiskinan tersebut di atas selanjutnya BPS membagi status kemiskinan menjadi: Miskin, Hampir Miskin, Hampir Tidak Miskin, dan Tidak miskin seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Status Kemiskinan BPS

Miskin	< GK (Garis Kemiskinan)
Hampir miskin	1,00 – 1,25 GK
Hampir tidak miskin	1,25 – 1,50 GK
Tidak miskin	> 1,50 GK

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 47 / IX / 1 September 2006

Selain itu untuk mengetahui jarak rata-rata tingkat konsumsi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dihitung P1 (*poverty gap index*) dan untuk mengetahui penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin dihitung dengan P2 (*poverty severity index*).

## BAB 4 PEMBAHASAN

### 4.1. Uji $t$ pada Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol Sebelum Periode Intervensi Program

Untuk mengetahui apakah pemilihan kelompok kontrol sudah tepat yaitu memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok aksi, dilakukan pengujian pada rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga kelompok aksi dan kelompok kontrol sebelum periode intervensi program (*baseline*). Hipotesis yang akan diuji adalah rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga kelompok aksi sama dengan rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga pada kelompok kontrol. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Merumuskan hipotesis, yaitu:

$$H_0 : A = B$$

$$H_1 : A \neq B$$

Dimana: A adalah rata-rata konsumsi perkapita perbulan kelompok penerima manfaat (kelompok aksi)

B adalah rata-rata konsumsi perkapita perbulan kelompok bukan penerima manfaat (kelompok kontrol)

2. Menentukan daerah penolakan

Tolak  $H_0$  jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$

Terima  $H_0$  jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$

3.  $t\text{-hitung} = 0,5713$ ;  $t\text{-tabel} = 1,960$ ;

4. Kesimpulan

Dengan tingkat signifikansi 95% dan *Degree of freedom* 218 diperoleh  $t\text{-hitung}$  sebesar 0,5713. Karena  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  maka hipotesa  $H_0$  diterima, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% secara statistik rata-rata tingkat konsumsi rumah tangga pada kelompok aksi sama dengan rata-rata tingkat konsumsi rumah tangga pada kelompok kontrol.

## 4.2. Perhitungan Selisih Rata-rata Tingkat Konsumsi Pada Kelompok Aksi

Setelah diperoleh kesamaan rata-rata konsumsi perkapita perbulan melalui uji  $t$  langkah berikutnya adalah menghitung selisih rata-rata tingkat konsumsi perkapita perbulan pada Kelompok Aksi. Selisih diperoleh dengan cara mengurangkan rata-rata konsumsi perkapita perbulan pada saat *impact* (setelah intervensi program) yaitu tahun 2011 dengan rata-rata konsumsi perkapita perbulan pada saat *baseline* (sebelum intervensi program) yaitu tahun 2007. Data konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan rumah tangga pada Kelompok Aksi terdapat pada Lampiran 2. Dari tabel tersebut dilakukan pengukuran perubahan nilai indikator yaitu tingkat konsumsi perkapita perbulan pada Kelompok Aksi. Status kemiskinan diperoleh dengan cara membandingkan rata-rata konsumsi perkapita perbulan dengan Garis Kemiskinan. Untuk memperluas analisa, pengukuran perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan dan status kemiskinan dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan, pemanfaatan Dana Bergulir, frekuensi perguliran, jumlah Dana Bergulir, serta jumlah tanggungan keluarga, masing-masing rumah tangga penerima manfaat.

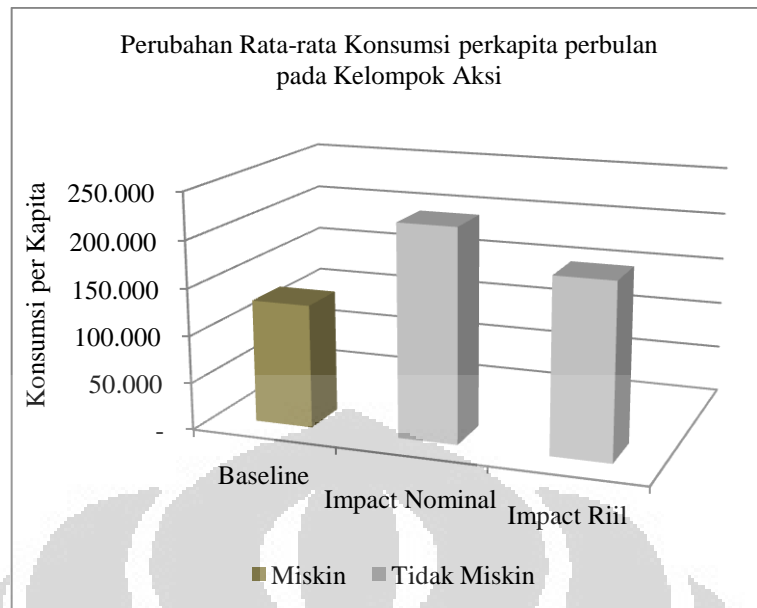
### 4.2.1. Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan pada Kelompok Aksi

Intervensi kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan terhadap perubahan rata-rata konsumsi rumah tangga penerima manfaat dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 4.1 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan pada Kelompok Aksi

Baseline	Impact		Perubahan			
	Nominal	Riil	Nominal		Riil	
			Rp	%	Rp	%
130.439	223.931	183.542	93.482	71,67	53.103	40,71

Sumber: Data Primer. Telah diolah.

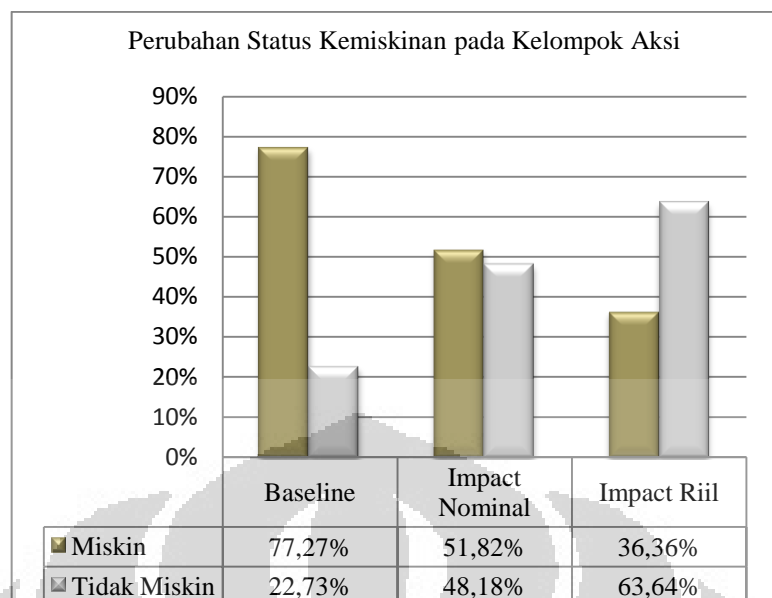


Gambar 4.1 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita  
perbulan pada Kelompok Aksi

Dari tabel dan grafik tersebut intervensi kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan mengakibatkan peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan sebanyak Rp. 93.482,- atau **71,67%**. Untuk memperoleh gambaran riil perubahan konsumsi, diperhitungkan pula inflasi efektif dari tahun 2008 sampai Juli 2011 saat pelaksanaan penelitian, yaitu 22%. (BPS). Dengan demikian, dibandingkan dengan keadaan tahun 2007 maka rata-rata konsumsi perkapita perbulan meningkat sebesar Rp.53.103,- atau sekitar 40,71%.

#### **4.2.2. Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Pergeseran Status Kemiskinan Kelompok Aksi**

Dengan mempertimbangkan Garis Kemiskinan Jawa Tengah tahun 2007 sebesar Rp.154.111,- dan Garis Kemiskinan Jawa Tengah tahun 2011 sebesar Rp.209.611,- maka perubahan status kemiskinan rumah tangga Kelompok Aksi adalah sebagai berikut:

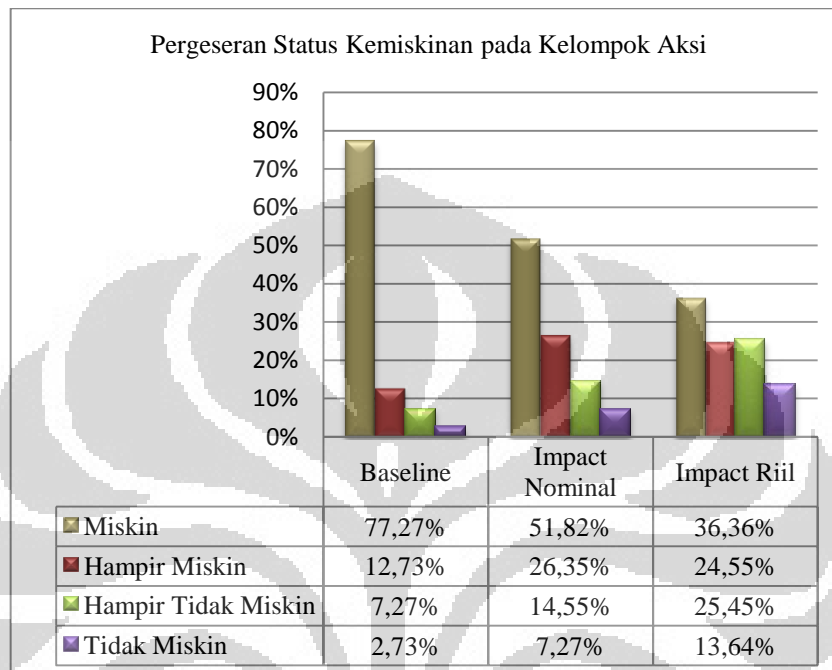


Gambar 4.2 Perubahan Status Kemiskinan pada Kelompok Aksi

Sebelum adanya intervensi kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelompok Aksi menunjukkan kemiskinan sebesar 77,27% atau sebanyak 85 rumah tangga memiliki konsumsi perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Sedangkan 22,73% atau 25 rumah tangga berstatus Tidak Miskin dimana konsumsi perkapita perbulan di atas Garis Kemiskinan. Setelah mendapat intervensi program, proporsi rumah tangga Miskin di daerah penelitian turun sebesar **25,45%**, atau berkurang sebanyak 28 rumah tangga, sehingga rumah tangga dengan status Miskin menjadi 51,82% dan rumah tangga Tidak Miskin 48,18%.

Dengan mempertimbangkan inflasi sebesar 22% (BPS), dapat diketahui perubahan status kemiskinan secara riil setelah intervensi program dibandingkan dengan kondisi awal (*baseline*). Secara riil kemiskinan pada Kelompok Aksi turun menjadi 36,36% atau sebanyak 40 rumah tangga masih berstatus Miskin, berkurang sebanyak 45 rumah tangga dari kondisi awal. Sedangkan rumah tangga Tidak Miskin bertambah menjadi 70 responden atau 63,64%. Tingkat kemiskinan turun lebih banyak apabila dihitung secara riil, karena Garis Kemiskinan dari Tahun 2007 ke Tahun 2011 naik sebesar 36% (dari Rp.154.111,- menjadi Rp.209.611,-), sementara inflasi efektif hanya 22%.

Apabila rumah tangga dengan kategori Tidak Miskin *displit* lagi dalam beberapa sub kategori berdasarkan proporsi konsumsi perkapita perbulan terhadap Garis Kemiskinan, maka diperoleh pergeseran status kemiskinan sebagai berikut:

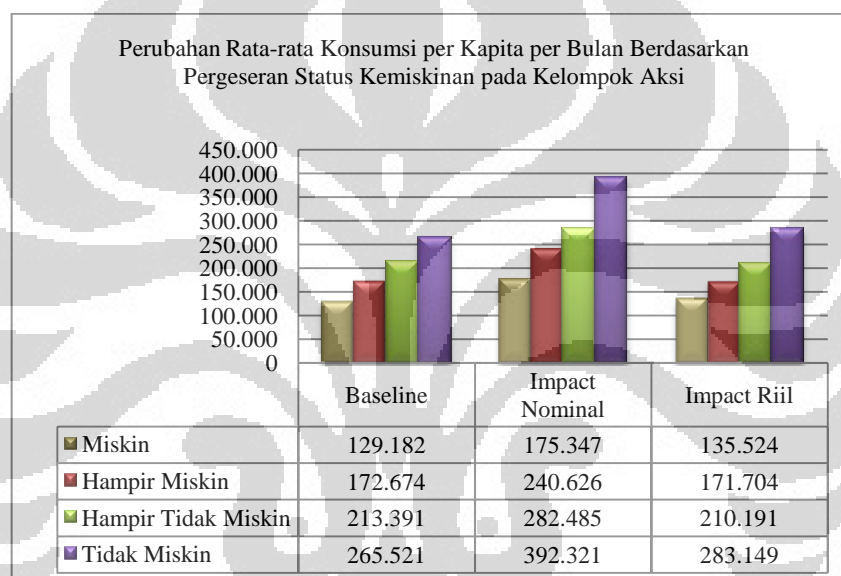


Gambar 4.3 Pergeseran Status Kemiskinan pada Kelompok Aksi

Sebelum intervensi program rumah tangga berstatus Hampir Miskin dengan konsumsi antara 1 GK dan 1,25 GK sebanyak 14 responden atau 12,73%, Hampir Tidak Miskin dengan konsumsi antara 1,25 GK dan 1,50 GK sebanyak 8 responden atau 7,27% dan rumah tangga Tidak Miskin dengan konsumsi di atas 1,50 GK sebesar 2,73% atau 3 responden. Setelah intervensi rumah tangga dengan status Hampir Miskin mengalami pertambahan paling banyak, yaitu 15 responden, menjadi 29 responden atau 26,35%. Rumah tangga dengan status Hampir Tidak Miskin bertambah 8 responden, menjadi 16 responden atau 14,55% dan rumah tangga dengan status Tidak Miskin mengalami penambahan sebanyak 5 responden, menjadi 8 responden atau 7,27%. Secara riil, rumah tangga Tidak Miskin sebanyak 70 responden di-*split* lagi menjadi rumah tangga Hampir Miskin sebanyak 27 responden atau 24,55%, bertambah sebanyak 13 responden dari kondisi awal, rumah tangga Hampir Tidak Miskin sebanyak 28 responden atau 25,45%, bertambah 20 responden

dari kondisi awal. Sedangkan rumah tangga Tidak Miskin menjadi 15 responden atau 13,64%, bertambah 12 responden dari kondisi awal.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa intervensi kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan mengurangi kemiskinan pada rumah tangga penerima manfaat sebesar **25,45%**. Dalam kelompok rumah tangga berstatus Tidak Miskin terjadi pergeseran status kemiskinan dimana rumah tangga dengan status Hampir Miskin mempunyai proporsi lebih besar daripada saat *baseline*. Perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan berdasarkan pergeseran status kemiskinan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan Berdasarkan Pergeseran Status Kemiskinan pada Kelompok Aksi

Secara riil, rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga dengan kategori Hampir Miskin dan Hampir Tidak Miskin justru mengalami penurunan setelah adanya intervensi program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Sedangkan perubahan paling besar terjadi pada rumah tangga dengan status Tidak Miskin. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara rata-rata intervensi kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan mengakibatkan peningkatan konsumsi perkapita perbulan paling besar pada rumah tangga yang status kemiskinannya adalah Tidak Miskin.



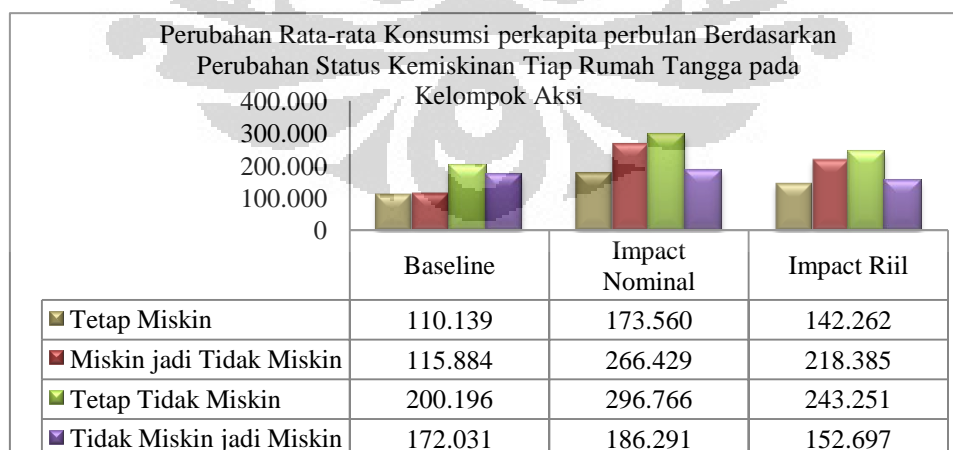
Apabila dibandingkan dengan status kemiskinan tiap rumah tangga penerima manfaat, kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan menghasilkan perubahan yang berbeda pada bagi tiap rumah tangga tersebut. Dari 110 sampel, sebanyak 49 rumah tangga tetap Miskin setelah mendapat intervensi program, 36 rumah tangga berubah menjadi Tidak Miskin, 17 rumah tangga tetap Tidak Miskin dan sebanyak 8 rumah tangga mengalami perubahan negatif dari Tidak Miskin menjadi Miskin, seperti tabel berikut:

Tabel 4.2 Perubahan Status Kemiskinan Tiap Rumah Tangga pada Kelompok Aksi

Baseline	Impact		
	Miskin	Tidak Miskin	Jumlah
Miskin	49	36	85
Tidak Miskin	8	17	25
Jumlah	57	53	110

Sumber: Data primer. Telah diolah.

Pada tiap kelompok rumah tangga, baik yang Tetap Miskin, Miskin menjadi Tidak Miskin, tetap Tidak Miskin dan Tidak Miskin menjadi Miskin, rata-rata konsumsi perkapita perbulan mengalami kenaikan. Berdasarkan perubahan status kemiskinan tersebut dapat dilihat perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan sebelum dan setelah intervensi kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan sebagai berikut:



Gambar 4.5 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan Berdasarkan Perubahan Status Kemiskinan Tiap Rumah Tangga pada Kelompok Aksi

Universitas Indonesia

Dari grafik di atas, peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan paling besar terjadi pada rumah tangga yang mengalami perubahan status dari Miskin menjadi Tidak Miskin. Rumah tangga yang tidak mengalami perubahan status pun sama-sama mengalami peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan, yaitu pada rumah tangga yang tetap Miskin dan rumah tangga yang tetap Tidak Miskin, namun peningkatannya lebih besar pada rumah tangga yang tetap Tidak Miskin. Sedangkan penurunan rata-rata konsumsi perkapita perbulan dialami oleh 8 rumah tangga mengakibatkan perubahan status dari Tidak Miskin menjadi Miskin.

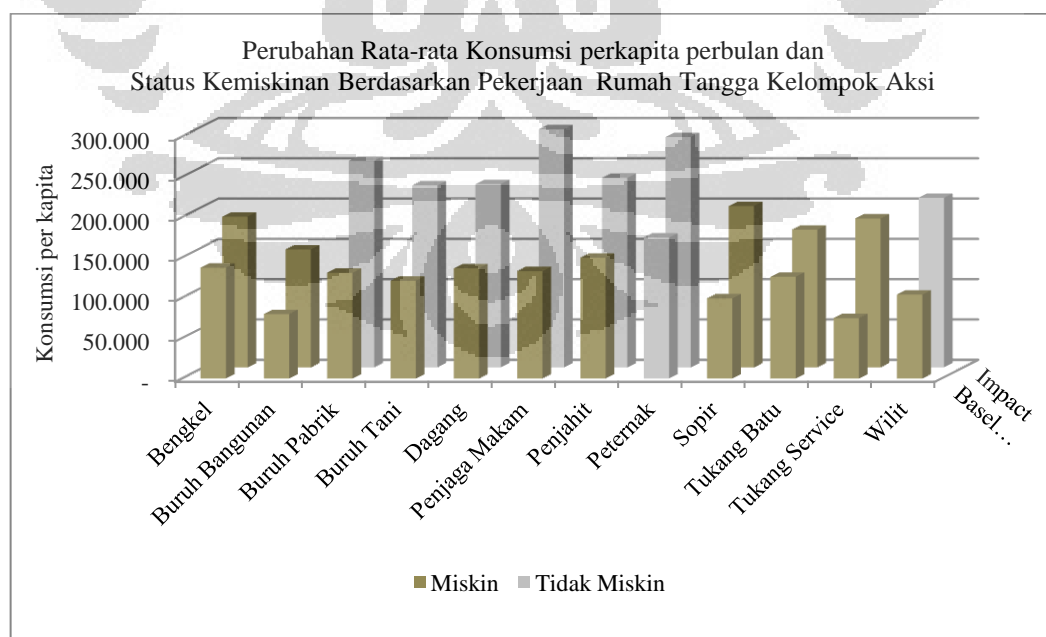
#### **4.2.3. Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Aksi**

Rumah tangga penerima Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan berlatar belakang berbagai profesi, dengan profesi terbanyak dalam sampel penelitian adalah Dagang, yaitu 68 responden atau 61,82%, terdiri dari pedagang kecil semacam pedagang mie ayam, barang bekas (rongsok), pedagang sayur, pedagang pecel, pedagang krupuk, pedagang ayam, pedagang tempe, pedagang ikan, pedagang kelontong kecil-kecilan dan sebagainya. Buruh tani menempati urutan kedua dengan jumlah responden 22 rumah tangga atau 20% dari keseluruhan sampel. Dalam kategori Buruh Tani ini adalah petani kecil yang tidak memiliki lahan, bekerja sebagai buruh di sawah atau mempunyai usaha pertanian dengan cara menyewa lahan. Selebihnya adalah rumah tangga dengan profesi sebagai buruh bangunan, buruh pabrik, penjahit, sopir, peternak, tukang batu, tukang service, wilit dan penjaga makam. Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan mengakibatkan perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan dan status kemiskinan yang berbeda pada masing-masing profesi seperti pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 4.3 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Aksi

No	Pekerjaan	Rumah Tangga		Baseline		Impact		Perubahan	
		Jml	%	Rata-rata kons/kap/bl	Status	Rata-rata kons/kap/bl	Status	Rp	%
1	Bengkel	1	0,91	137.500	Miskin	187.095	Miskin	49.595	36,07
2	Buruh Bangunan	1	0,91	80.000	Miskin	146.513	Miskin	66.513	83,14
3	Buruh Pabrik	2	1,82	131.250	Miskin	256.361	Tidak Miskin	125.111	95,32
4	Buruh Tani	22	20	121.394	Miskin	225.966	Tidak Miskin	104.572	86,14
5	Dagang	68	61,82	136.815	Miskin	227.502	Tidak Miskin	90.687	66,28
6	Penjaga Makam	1	0,91	133.333	Miskin	295.671	Tidak Miskin	162.337	121,75
7	Penjahit	2	1,82	150.000	Miskin	235.336	Tidak Miskin	85.336	56,89
8	Peternak	1	0,91	175.000	Tidak Miskin	285.885	Tidak Miskin	110.885	63,36
9	Sopir	5	4,55	99.500	Miskin	200.225	Miskin	100.725	101,23
10	Tukang Batu	4	3,64	126.250	Miskin	171.048	Miskin	44.798	35,48
11	Tukang Service	1	0,91	75.000	Miskin	184.896	Miskin	109.896	146,53
12	Wilit	2	1,82	104.167	Miskin	210.563	Tidak Miskin	106.396	102,14
	Jumlah	110							

Sumber: Data primer. Telah diolah.



Gambar 4.6 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Aksi

Universitas Indonesia

Setelah mendapat intervensi program Rumah tangga dengan jenis pekerjaan Bengkel, Buruh Bangunan, Sopir, Tukang Batu dan Tukang Service secara rata-rata konsumsi perkapita perbulan tetap berada di bawah Garis Kemiskinan, sehingga tetap berstatus Miskin.

1. Rumah tangga dengan profesi Bengkel.

Responden dengan profesi Bengkel hanya ada satu, mempunyai usaha bengkel sepeda, telah mendapat dua kali perguliran, total sebesar Rp.1.000.000,- dan mempunyai jumlah tanggungan sebanyak 4 orang. Rumah tangga ini tidak menggunakan Dana Bergulir yang diterimanya untuk menambah modal atau memulai usaha produktif baru namun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

2. Rumah tangga dengan profesi sebagai Buruh Bangunan.

Responden dengan profesi sebagai Buruh Bangunan hanya ada 1 rumah tangga, telah mendapat 2 kali perguliran total Dana Bergulir Rp.1000.000,-, dengan jumlah tanggungan sebanyak 5 orang. Rumah tangga ini tidak menggunakan Dana Bergulir untuk memulai usaha baru, tapi untuk kebutuhan konsumsi dan konsumsi perkapita perbulan pada *baseline* Rp.80.000,- sangat jauh dari Garis Kemiskinan.

3. Rumah tangga dengan profesi sebagai Sopir.

Responden dengan profesi sebagai Sopir sebanyak 5 responden dengan rata-rata jumlah tanggungan keluarga sebanyak 5 orang. Semuanya telah memperoleh dua kali perguliran, dengan besaran antara Rp.1.000.000,- sampai Rp.1.500.000,- dan berstatus Miskin pada saat *baseline*. Dua rumah tangga menggunakan Dana Bergulir untuk kegiatan konsumsi dan tetap Miskin. Tiga rumah tangga lainnya menggunakan Dana Bergulir untuk memulai usaha produktif baru yaitu berdagang. Dua dari 3 rumah tangga itu menjadi Tidak Miskin setelah intervensi program dan 1 rumah tangga tetap Miskin. Rumah tangga yang tetap Miskin tersebut mempunyai jumlah tanggungan 9 orang dengan konsumsi perkapita perbulan pada *baseline* hanya Rp.50.000,- sangat jauh dari Garis Kemiskinan.

4. Rumah tangga dengan profesi sebagai Tukang Batu.

Rumah tangga dengan profesi sebagai Tukang Batu ada 4 responden, dengan rata-rata jumlah tanggungan keluarga sebanyak 5 orang dan mendapat dua kali perguliran, dengan besaran Dana Bergulir Rp.1.250.000,- dan Rp.1.500.000,-

**Universitas Indonesia**

namun tetap Miskin, bahkan pada 2 responden berdampak negatif dari Tidak Miskin menjadi Miskin setelah intervensi program. Dalam kelompok Tukang Batu hanya 1 rumah tangga menggunakan Dana Bergulir yang untuk memulai usaha produktif baru yaitu berdagang, namun karena kondisi awalnya sangat miskin dengan konsumsi perkapita perbulan Rp.50.000,- jauh di bawah Garis Kemiskinan, dan jumlah tanggungan keluarga relatif banyak yaitu 6 orang, dalam jangka pendek sulit bagi rumah tangga ini untuk beranjak dari kemiskinan.

5. Rumah tangga dengan profesi sebagai Tukang Service.

Rumah tangga dengan profesi sebagai Tukang Service elektronik hanya 1 responden, jumlah tanggungan sebanyak 4 orang, mendapat 2 kali perguliran total sebesar Rp.1.250.000,-. Rumah tangga ini menggunakan Dana Bergulir untuk menambah modal usaha membeli peralatan baru, namun belum beranjak dari kemiskinan. Konsumsi perkapita perbulan pada saat *baseline* Rp.75.000,- jauh di bawah Garis Kemiskinan.

Sedangkan rumah tangga dengan profesi Buruh Pabrik, Buruh Tani, Pedagang, Penjaga Makam, Penjahit, Peternak, Tukang Service, Wilit rata-rata konsumsi perkapita perbulan setelah mendapat intervensi program meningkat hingga di atas Garis Kemiskinan Jawa Tengah tahun 2011, sehingga berubah status menjadi Tidak Miskin.

6. Rumah tangga dengan profesi sebagai Penjaga Makam.

Rumah tangga dengan profesi sebagai Penjaga Makam ada 1 responden, dengan jumlah tanggungan 3 orang, menerima perguliran sebanyak 2 kali dengan total sejumlah Rp.1.250.000,-. Rumah tangga ini mengalami peningkatan rata-rata konsumsi per kapita paling besar yaitu 121,75%, dengan konsumsi perkapita perbulan setelah intervensi program sebesar Rp.295.671,-. Dana Bergulir yang diterimanya digunakan untuk mengembangkan usaha baru sebagai pengumpul bunga kamboja kering. Sejak 2 tahun terakhir jumlah tanggungan keluarga ini berkurang karena 1 anaknya bekerja di luar kota, namun tidak ada transfer penghasilan dari anak tersebut.

7. Rumah tangga dengan profesi sebagai Buruh Pabrik.

Rumah tangga dengan profesi sebagai Buruh Pabrik ada 2 responden, dengan rata-rata jumlah tanggungan sebanyak 5 orang, mendapat 2 kali perguliran sebesar Rp.1250.000,- dan Rp.1.500.000. Secara rata-rata rumah tangga ini mengalami peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan sebesar 95,32% dengan besar rata-rata konsumsi perkapita perbulan setelah intervensi program Rp.256.361,-. Kedua rumah tangga ini menggunakan Dana Bergulir untuk memulai dan mengembangkan usaha produktif baru yaitu berdagang.

8. Rumah tangga dengan profesi sebagai Buruh Tani.

Dalam sampel yang diambil peneliti, rumah tangga Buruh Tani merupakan sampel terbesar kedua setelah Dagang. Terdapat 22 responden dengan profesi sebagai Buruh Tani.

a. Terdapat 2 responden dengan jumlah tanggungan 6 orang, semuanya baru mendapat 1 kali perguliran sebesar Rp.500.000,-, dan tetap Miskin. Dengan Dana Bergulir yang relatif kecil sulit bagi kedua rumah tangga ini menggunakannya untuk memulai usaha produktif di bidang pertanian.

b. Satu rumah tangga dengan jumlah tanggungan 2 orang, telah mendapat 4 kali perguliran, total sebesar Rp.3.000.000,-, menggunakan Dana Bergulir untuk menambah modal bercocok tanam padi dan tetap berstatus Tidak Miskin.

c. Sisanya, sebanyak 19 rumah tangga mendapat 2 kali perguliran dengan besaran Dana Bergulir antara Rp.1.000.000,- hingga Rp.1.500.000,-. Dari 19 rumah tangga tersebut:

1) Terdapat 4 rumah tangga menggunakan Dana Bergulir untuk menutupi kebutuhan konsumsi. Keempatnya tetap Miskin.

2) Sebanyak 15 rumah tangga menggunakan Dana Bergulir untuk usaha bercocok tanam padi.

- Dua dari 15 rumah tangga itu tetap Miskin. Hal ini dapat dimengerti mengingat kondisi rata-rata konsumsi perkapita perbulan mereka pada saat *baseline* sangat rendah, yaitu Rp.71.667 dengan rata-rata jumlah tanggungan keluarga sebanyak 6 orang.

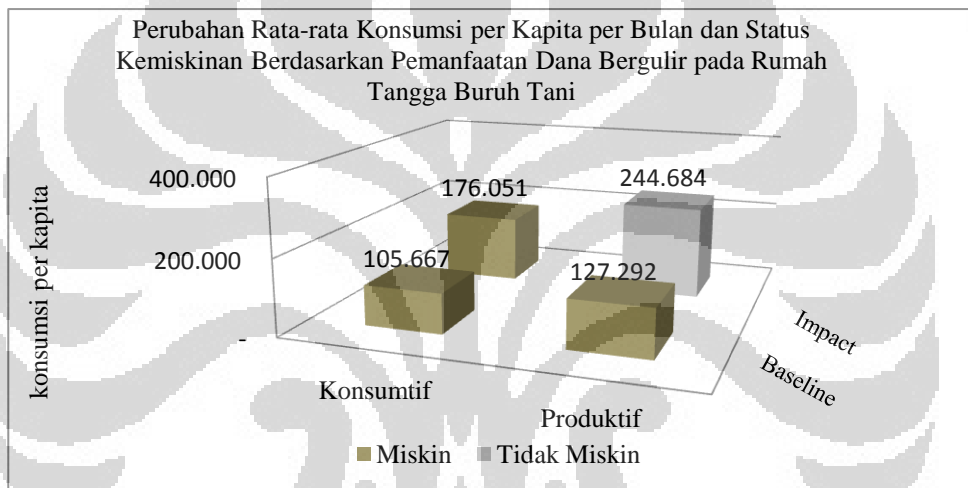
- Rumah tangga Buruh Tani yang mengalami perubahan negatif dari Tidak Miskin menjadi Miskin ada 2 responden dikarenakan serangan

**Universitas Indonesia**

hama berturut-turut pada tanaman padi selama 2 musim tanam.

- Dua rumah tangga tetap berstatus Tidak Miskin setelah intervensi program.
- Sembilan sisanya berubah status dari Miskin menjadi Tidak Miskin.

Untuk melihat dengan jelas dampak kegiatan Pinjaman Bergulir pada rumah tangga Buruh Tani berdasarkan pemanfaatan Dana Bergulir dapat dilihat pada Lampiran 3 Tabel Perubahan Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Buruh Tani Berdasarkan Penggunaan Dana Bergulir dan grafik berikut ini:



Gambar 4.7 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Pemanfaatan Dana Bergulir pada Rumah Tangga Buruh Tani

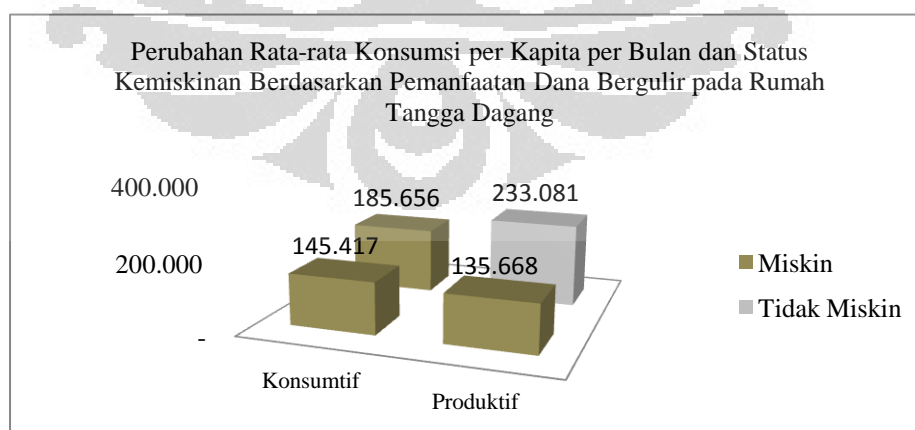
Dari 22 rumah tangga Buruh Tani, sebanyak 6 rumah tangga menggunakan Dana Bergulir untuk menutup kebutuhan konsumsi dan 16 rumah tangga menggunakannya untuk berusaha di bidang pertanian. Secara rata-rata rumah tangga yang menggunakan Dana Bergulir untuk usaha pertanian mengalami peningkatan konsumsi perkapita perbulan hingga melewati Garis Kemiskinan, sehingga berstatus Tidak Miskin, sementara rumah tangga yang menggunakan Dana Bergulir untuk konsumsi tetap Miskin. Namun secara rata-rata kegiatan Pinjaman Bergulir mengurangi kemiskinan sebesar **44,44%** yaitu dari 18 rumah tangga Miskin menjadi 10 rumah tangga Miskin.

9. Rumah tangga dengan profesi Dagang.

Secara rata-rata status kemiskinan rumah tangga Dagang sebelum intervensi program adalah Miskin dengan konsumsi perkapita perbulan Rp.136.815,- dan menjadi Tidak Miskin setelah mendapat intervensi dengan kenaikan rata-rata konsumsi perkapita perbulan sebesar 66,28% menjadi Rp.227.502,-.

- a. Sebanyak 13 responden baru mendapat satu kali perguliran sebesar Rp.500.000,-.
- b. Satu responden mendapat 4 kali perguliran dengan total dana Rp.3.000.000,- namun rumah tangga ini belum beranjak dari kemiskinan walaupun menggunakan Dana Bergulir untuk menambah modal usahanya.
- c. Sisanya sebanyak 54 rumah tangga memperoleh 2 kali perguliran, dengan besaran antara Rp.1.000.000,- hingga Rp.1.500.000,-.
  - 1) Berdasarkan wawancara, sebanyak 8 responden tidak menggunakan Dana Bergulir untuk menambah modal usaha, namun untuk kebutuhan konsumsi.
  - 2) Sebanyak 46 rumah tangga menggunakan Dana Bergulir untuk menambah modal usaha dagangnya.

Dampak kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan terhadap perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan dan status kemiskinan pada rumah tangga dengan usaha produktif dagang berdasarkan penggunaan Dana Bergulir terlihat pada tabel di Lampiran 4 dan grafik di bawah ini:



Gambar 4.8 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Pemanfaatan Dana Bergulir pada Rumah Tangga Dagang



Pada rumah tangga Pedagang, rumah tangga yang memanfaatkan Dana Bergulir untuk menambah modal usaha secara rata-rata konsumsi perkapita perbulan meningkat sebesar 71,80% dari Rp.135.668 pada saat *baseline* menjadi Rp.233.081,- sehingga berubah status menjadi Tidak Miskin. Sedangkan rumah tangga yang tidak menggunakan Dana Bergulir untuk menambah modal usahanya tetap Miskin dengan rata-rata konsumsi perkapita perbulan hanya meningkat sebesar 27,67% dari Rp.145.147,- menjadi Rp.185.656,-. Dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah intervensi Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan tingkat kemiskinan pada rumah tangga Dagang secara rata-rata sebesar **30,77%**, dari 52 menjadi 36 rumah tangga Miskin.

10. Rumah tangga dengan profesi sebagai Penjahit.

Rumah tangga dengan profesi Penjahit ada dua. Keduanya mendapat dua kali perguliran sebesar Rp.1.250.000,- dan Rp.1.500.000,- yang dimanfaatkan untuk menambah modal usahanya. Intervensi Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan pada keluarga ini berhasil mengentaskan mereka dari kemiskinan.

11. Rumah tangga dengan usaha produktif ternak.

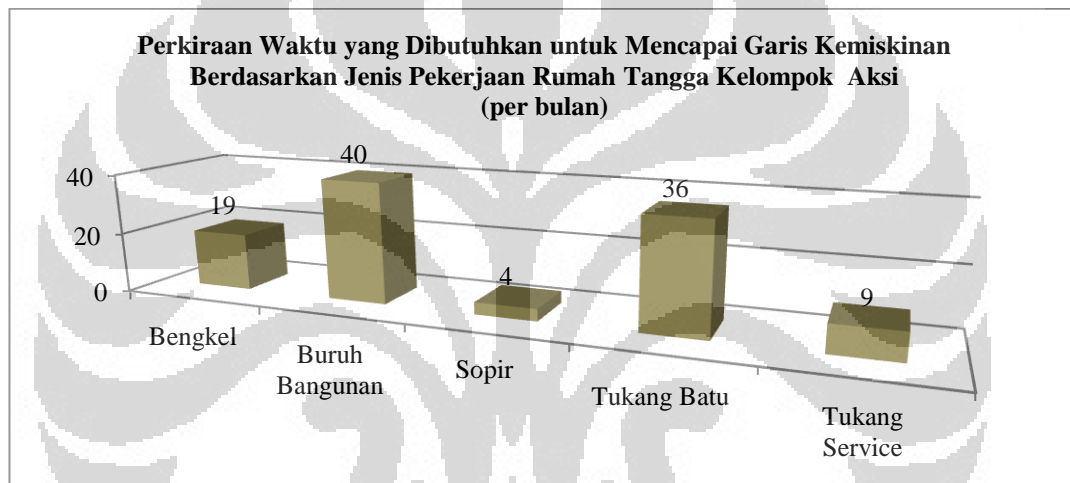
Rumah tangga dengan usaha produktif Ternak ada 1 responden. Rumah tangga ini telah mendapat 2 kali perguliran dengan jumlah dana Rp.1500.000,- yang digunakan untuk menambah modal usaha.

12. Rumah tangga dengan usaha produktif Wilit.

Rumah tangga bermatapencarian Wilit, yaitu membuat atap rumah dari daun bulung ada 2 responden. Keduanya mendapat 2 kali perguliran masing-masing sebesar Rp.1.250.000,-. Satu rumah tangga masih berstatus miskin setelah mendapat intervensi program, karena kondisi awal sangat miskin dengan konsumsi perkapita perbulan Rp.75.000,-, sedangkan satu rumah tangga lainnya dengan konsumsi perkapita perbulan Rp.133.333,- berhasil lepas dari kemiskinan.

#### 4.2.3.1. Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Aksi

Berdasarkan jenis pekerjaan, rumah tangga yang mempunyai usaha Bengkel, Buruh Bangunan, Sopir, Tukang Batu dan Tukang Service secara rata-rata masih berstatus Miskin setelah mendapat intervensi program. Artinya rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga tersebut masih berada di bawah Garis Kemiskinan Jawa Tengah tahun 2011. Berdasarkan rata-rata peningkatan konsumsi perkapita perbulan yang dihitung sejak tahun 2007, perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh rumah tangga- rumah tangga tersebut untuk mencapai Garis Kemiskinan adalah:



Gambar 4.9 Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Aksi

Dari gambar 4.9 di atas terlihat bahwa rumah tangga dengan pekerjaan sebagai Buruh Bangunan membutuhkan waktu paling lama untuk mencapai Garis Kemiskinan yaitu 40 bulan secara rata-rata, atau 3 tahun 4 bulan. Terdapat 1 Rumah tangga Buruh Bangunan dalam sampel, telah mendapat 2 kali perguliran total Dana Bergulir Rp.1000.000,-, dengan jumlah tanggungan sebanyak 5 orang. Rumah tangga ini tidak menggunakan Dana Bergulir untuk memulai usaha baru, tapi untuk kebutuhan konsumsi dan konsumsi perkapita perbulan pada *baseline* Rp.80.000,- sangat jauh dari Garis Kemiskinan. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan rumah tangga ini membutuhkan waktu paling lama untuk mencapai Garis Kemiskinan dibandingkan rumah tangga miskin lainnya.

Universitas Indonesia

Rumah tangga Tukang Batu membutuhkan waktu 36 bulan (3 tahun) untuk mencapai Garis Kemiskinan. Dalam sampel yang diambil ada 4 rumah tangga dengan pekerjaan sebagai Tukang Batu namun hanya 1 rumah tangga yang memanfaatkan Dana Bergulir untuk kegiatan usaha, tapi karena kondisi awalnya sangat miskin dengan konsumsi perkapita perbulan Rp.50.000,- sangat jauh di bawah Garis Kemiskinan 2007, maka secara rata-rata rumah tangga Tukang Batu membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai Garis Kemiskinan.

Terdapat satu rumah tangga dengan jenis pekerjaan Bengkel dan membutuhkan waktu 19 bulan (1 tahun 7 bulan) untuk mencapai Garis Kemiskinan. Rumah tangga ini tidak menggunakan Dana Bergulir untuk menambah modal namun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Rumah tangga Tukang Service membutuhkan waktu 9 bulan untuk mencapai Garis Kemiskinan. Sampel untuk rumah tangga ini hanya satu, menggunakan Dana Bergulir untuk menambah modal usaha, namun konsumsi perkapita perbulan pada saat *baseline* Rp.75.000,- sehingga masih diperlukan waktu bagi rumah tangga ini untuk mencapai Garis Kemiskinan.

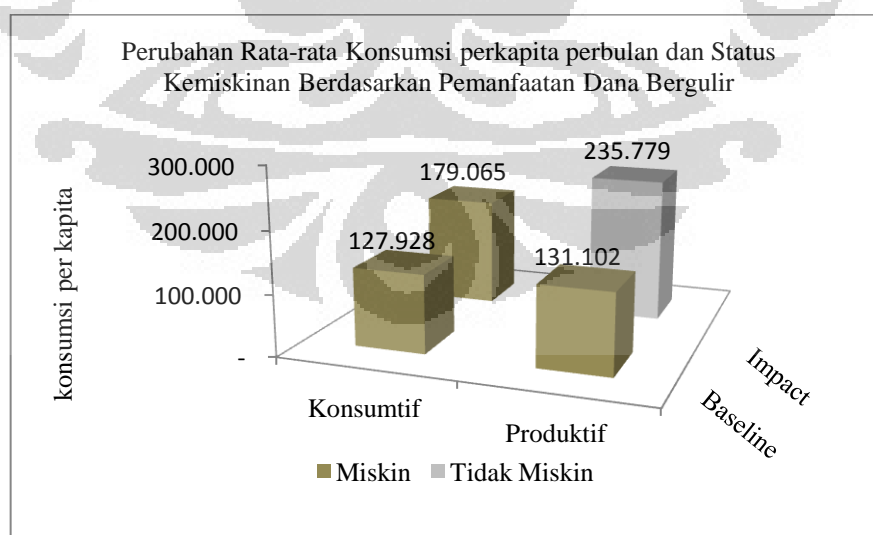
Rumah tangga yang membutuhkan waktu paling sedikit untuk mencapai Garis Kemiskinan adalah Sopir yaitu 4 bulan.

#### **4.2.4. Perubahan Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Pemanfaatan Dana Bergulir**

Tidak semua rumah tangga penerima manfaat Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan menggunakan Dana Bergulir yang diterimanya untuk memulai atau mengembangkan usaha produktif. Karena parahnya kemiskinan, kurangnya semangat berwira usaha dan kebutuhan hidup yang mendesak, banyak rumah tangga menggunakan Dana Bergulir untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Akibatnya harapan Dana Bergulir sebagai stimulan untuk menggerakkan perekonomian rumah tangga Miskin sehingga dapat mengentaskan mereka dari kemiskinan sulit tercapai. Hal ini dilihat dari hasil penelitian bahwa rumah tangga yang tidak memanfaatkan Dana Bergulir untuk usaha produktif secara rata-rata masih berstatus Miskin. Keadaan sebaliknya terjadi pada rumah tangga yang memanfaatkan Dana Bergulir untuk memulai dan mengembangkan usaha produktif. Dari 110 sampel yang diambil

**Universitas Indonesia**

peneliti, sebanyak 23 responden memanfaatkan Dana Bergulir untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, walaupun rumah tangga-rumah tangga tersebut pada saat *baseline* telah menjalankan usaha produktif seperti Bengkel, Dagang dan Tukang Service. Pada beberapa rumah tangga sedikitnya Dana Bergulir yang diterima mempersulit mereka untuk memulai usaha baru. Seperti yang terjadi pada 3 rumah tangga Buruh Tani. Dengan Dana Bergulir sebesar Rp.500.000,- tidak memungkinkan mereka memulai usaha cocok tanam padi, karena untuk Buruh Tani yang notabene tanpa kepemilikan lahan, biaya produksi menanam padi bukan hanya biaya pengolahan lahan dan pupuk, tapi juga biaya sewa lahan. Sementara itu 87 responden lainnya menggunakan Dana Bergulir untuk memulai atau mengembangkan usaha produktif yang telah dijalankan. Tidak semua responden dalam kelompok ini berhasil lepas dari kemiskinan. Sebanyak 34 rumah tangga atau 39% masih berstatus Miskin. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka tetap Miskin antara lain sedikitnya Dana Bergulir yang diterima, kondisi keparahan kemiskinan pada saat *baseline*, besarnya jumlah tanggungan keluarga, kegagalan panen pada rumah tangga Buruh Tani, dan sebagainya. Selebihnya, sebanyak 53 atau 61% rumah tangga berubah status menjadi Tidak Miskin. Perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan dan status kemiskinan berdasarkan pemanfaatan Dana Bergulir seperti pada tabel di Lampiran 5 dan grafik berikut ini:



Gambar 4.10 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Pemanfaatan Dana Bergulir

Rumah tangga yang tidak memanfaatkan Dana Bergulir untuk kegiatan usaha produktif sebanyak 23 responden atau 21% dan tetap dalam status Miskin. Namun demikian rata-rata konsumsi perkapita perbulan mengalami peningkatan sebesar 40% dari Rp.127.928,- saat *baseline* menjadi Rp.179.065 saat *impact*. Rumah tangga yang menggunakan Dana Bergulir untuk memulai atau mengembangkan usaha produktif secara rata-rata menjadi Tidak Miskin dan mengalami peningkatan konsumsi perkapita perbulan sebesar 80% dari Rp.131.102,- saat *baseline* menjadi Rp.235.779,- saat *impact*.

#### **4.2.4.1. Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan Pemanfaatan Dana Bergulir**

Berdasarkan penggunaan Dana Bergulir, rumah tangga yang menggunakan Dana Bergulir bukan untuk memulai atau mengembangkan usaha produktif masih berstatus Miskin, artinya secara rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga tersebut masih di bawah Garis Kemiskinan. Mengacu pada rata-rata peningkatan konsumsi perkapita perbulan rumah tangga-rumah tangga tersebut sejak tahun 2007, maka perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Garis Kemiskinan adalah 25 bulan.

#### **4.2.5. Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Frekuensi Putaran Pinjaman Bergulir**

PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Petarukan diselenggarakan sejak tahun 2007 dengan agenda pada tahun awal adalah pembentukan dan penguatan kelembagaan. Jadi selama tahun 2007 kegiatan yang dilakukan antara lain adalah pemetaan swadaya serta persiapan, pembentukan dan penguatan kelembagaan PNPM Mandiri Perkotaan di desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Petarukan. Adapun Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) baik untuk Lingkungan, Sosial dan Ekonomi baru cair di awal tahun 2008. BLM Ekonomi (BLM E) untuk kegiatan Pinjaman Bergulir pertama kali dialokasikan oleh Desa Pesucen pada April 2008 kemudian diikuti oleh desa/kelurahan lainnya. Sejak April 2008 hingga saat penelitian dilakukan (Juli 2011) sebanyak 2 desa baru menjalankan 1 kali putaran Pinjaman Bergulir, 17 desa/kelurahan 2 kali dan 1 desa telah berhasil menjalankan empat kali

putaran Pinjaman Bergulir. Kesemuanya dengan periode waktu putaran yang berbeda. Perguliran kembali dilakukan dengan mempertimbangkan modal UPK serta pengembalian pinjaman atau *Repayment Rate* (RR). Dalam *Repayment Rate* ini terdapat beberapa komponen indikator penilaian kegiatan Pinjaman Bergulir. Berikut ini adalah indikator-indikator tersebut beserta kategori penilaiannya.

Tabel 4.4 Kriteria Kinerja Pinjaman Bergulir

No	Indikator	Penghitungan	Memuaskan	Minimum	Penundaan
1	Pinjaman berisiko <i>Loans at Risk (LAR)</i>	Jumlah peminjaman (KSM) yang menunggak $\geq 3$ bulan / Jumlah peminjaman (KSM)	$< 10\%$	$< 20\%$	$\geq 20\%$
2	Pinjaman Berisiko <i>Portofolio at Risk (PAR)</i>	Pinjaman yang mengandung tunggakan $> 3$ bulan /realisasi	$< 10\%$	$< 20\%$	$\geq 20\%$
3	Rasio pendapatan biaya <i>Cost Coverage Ratio (CCR)</i>	Jumlah pendapatan tunai / Jumlah pengeluaran tunai	$>125\%$	$>100$	$\leq 100\%$
4	Hasil investasi <i>Return on Investment (ROI)</i>	Laba bersih / nilai modal yang diinvestasikan	$>10\%$	$> 0\%$	$\leq 0\%$

Sumber: Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2010)

Kebijakan pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir di Kecamatan Petarukan dilakukan dengan ketentuan *Repayment Rate* sebagai berikut:

1.  $RR > 90\%$  (Memuaskan)

Berarti UPK dapat memperoleh tambahan modal dari BLM PNPM Mandiri Perkotaan serta dapat menggulirkan dana kepada KSM.

2.  $90\% > RR > 80\%$  (Minimum)

Berarti UPK tidak dapat memperoleh tambahan modal dari BLM PNPM Mandiri Perkotaan, hanya dapat menggulirkan dana ke KSM.

3.  $RR < 80\%$  (Penundaan)

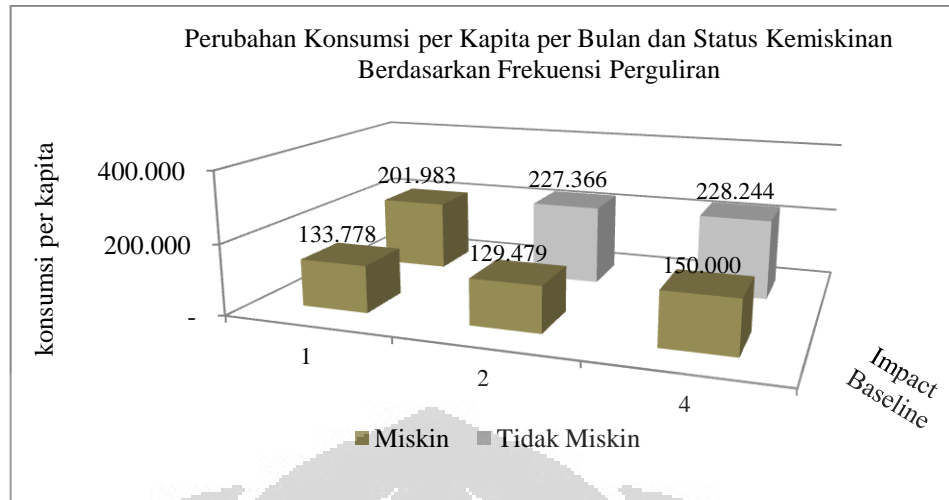
Berarti UPK tidak dapat memperoleh tambahan modal dari BLM PNPM Mandiri Perkotaan serta tidak dapat mencairkan Pinjaman Bergulir lagi ke KSM. Kegiatan yang dilakukan adalah menyelesaikan lebih dulu tunggakan sampai paling tidak mencapai Minimum sebagai syarat untuk dapat menggulirkan kembali Dana Bergulir kepada KSM.

Dengan ketentuan seperti itu menyebabkan waktu yang relatif lama bagi UPK untuk menjalankan perguliran yang kedua dan seterusnya pada sebagian besar desa/kelurahan. Terutama pada perguliran pertama dimana *mind set* masyarakat terhadap kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan belum terbentuk. Pengaruh program sebelumnya yaitu Bantuan Langsung Tunai sebagai program pengalihan subsidi BBM bagi warga miskin, dimana penerima BLT tidak diwajibkan untuk melunasi karena bersifat hibah membentuk *mindset* masyarakat bahwa program-program bantuan dari pemerintah adalah sama, artinya tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk melunasi Pinjaman Bergulir yang diterimanya. Tingginya LAR pada perguliran pertama juga disebabkan kebiasaan buruk menunggak pinjaman yang menular dari satu rumah tangga ke rumah tangga lainnya. Ketiadaan *punishment* pada rumah tangga yang menunggak membuat rumah tangga lainnya juga ikut-ikutan untuk menunggak. Berikut ini disajikan tabel dan grafik dampak Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan berdasarkan frekuensi perguliran:

Tabel 4.5 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Frekuensi Putaran Pinjaman Bergulir

No	Perguliran	Rumah Tangga		Baseline		Impact		Perubahan	
		Jml	%	Rata-rata kons/kap/bl	Status	Rata-rata kons/kap/bl	Status	Rp	%
1	1	15	13,64	133.778	Miskin	201.983	Miskin	68.205	50,98
2	2	93	84,54	129.479	Miskin	227.366	Tidak Miskin	97.887	75,60
3	4	2	1,82	150.000	Miskin	228.244	Tidak Miskin	78.244	52,16
	Jumlah	110	100						

Sumber: Data primer. Telah diolah.



Gambar 4.11 Perubahan Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Frekuensi Perguliran

Berdasarkan frekuensi perguliran yang diterima oleh rumah tangga miskin, diperoleh hasil bahwa setelah adanya intervensi program, rumah tangga yang hanya satu kali menerima perguliran rata-rata konsumsi perkapita perbulan masih berada di bawah Garis Kemiskinan, oleh karena itu tetap berstatus Miskin. Sedangkan secara rata-rata rumah tangga yang menerima 2 dan 4 kali perguliran berubah status menjadi Tidak Miskin. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan berdampak positif bagi pengentasan kemiskinan pada rumah tangga penerima manfaat apabila frekuensi pergulirannya makin banyak.

#### 4.2.5.1. Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan Frekuensi Putaran Pinjaman Bergulir

Berdasarkan frekuensi putaran Pinjaman Bergulir, rumah tangga yang baru mendapat satu kali perguliran secara rata-rata masih berstatus Miskin, artinya konsumsi perkapita perbulan rumah tangga tersebut masih di bawah Garis Kemiskinan. Mengacu pada rata-rata peningkatan konsumsi perkapita perbulan rumah tangga-rumah tangga tersebut sejak tahun 2007, maka perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Garis Kemiskinan adalah 5 bulan.



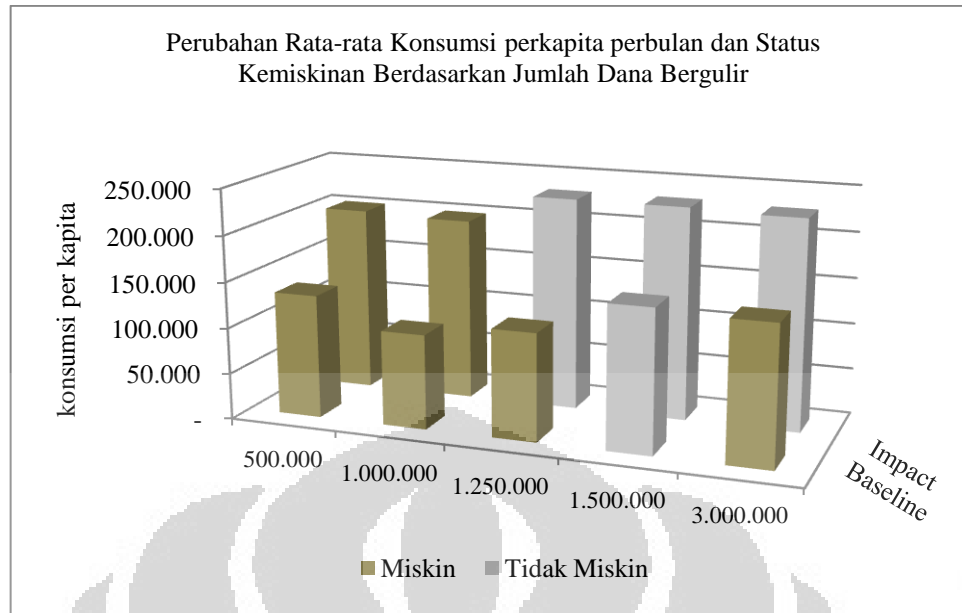
#### 4.2.6. Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Dana Bergulir

Dalam sampel Kelompok Aksi ini dana Pinjaman Bergulir yang diterima rumah tangga miskin pada perguliran yang pertama semua sama yaitu sebesar Rp.500.000,- per anggota KSM. Namun untuk perguliran yang kedua dan seterusnya bervariasi tergantung beberapa hal seperti jenis usaha peminjam, kemampuan melunasi pinjaman, analisa hasil usaha peminjam dan sebagainya. Berikut ini adalah perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan dan status kemiskinan apabila dilihat dari besarnya Dana Bergulir yang diterima oleh peminjam.

Tabel 4.6 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Dana Bergulir

No	Jumlah Dana Bergulir (Rp)	Rumah Tangga		Baseline		Impact		Perubahan	
		Jml	%	Rata-rata kons/kap/bl	Status	Rata-rata kons/kap/bl	Status	Rp	%
1	500.000	15	13,64	133.778	Miskin	201.983	Miskin	68.205	50,98
2	1.000.000	11	10,00	102.652	Miskin	198.980	Miskin	96.328	93,84
3	1.250.000	46	41,82	116.538	Miskin	231.262	Tidak Miskin	114.724	98,44
4	1.500.000	36	32,73	154.213	Tidak Miskin	231.061	Tidak Miskin	76.848	49,83
5	3.000.000	2	1,82	150.000	Miskin	228.244	Tidak Miskin	78.244	52,16
	Jumlah	110	100						

Sumber: Data primer. Telah diolah.



**Gambar 4.12 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Dana Bergulir**

Rumah tangga yang memperoleh Dana Bergulir sebesar Rp.500.000,- sama dengan rumah tangga yang baru menerima hanya satu kali perguliran sebagaimana telah diungkapkan di atas. Demikian juga untuk rumah tangga yang memperoleh Dana Bergulir sebesar Rp.3.000.000,- adalah sama dengan rumah tangga yang telah mendapat perguliran sebanyak 4 kali. Dari tabel dan grafik di atas diketahui bahwa rumah tangga yang mendapat Dana Bergulir 4 kali dengan Dana Bergulir paling besar di antara yang lainnya justru menunjukkan peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan tidak sebesar rumah tangga lainnya yang memperoleh Pinjaman Bergulir dengan frekuensi dan jumlah yang lebih sedikit. Sampel untuk rumah tangga ini adalah 2 orang dengan profesi Pedagang dan Buruh Tani (Petani Penggarap). Rumah tangga yang berprofesi sebagai pedagang menunjukkan peningkatan konsumsi perkapita perbulan yang signifikan setelah mendapat intervensi program yaitu sebesar 97%. Sedangkan rumah tangga dengan profesi sebagai Buruh Tani hanya meningkat sebesar 30%. Berdasarkan wawancara yang dilakukan hal tersebut disebabkan karena kegagalan panen pada periode perguliran yang ke-3 dan 4 akibat serangan hama yaitu tikus dan wereng sehingga Buruh Tani tersebut mengalami kerugian.

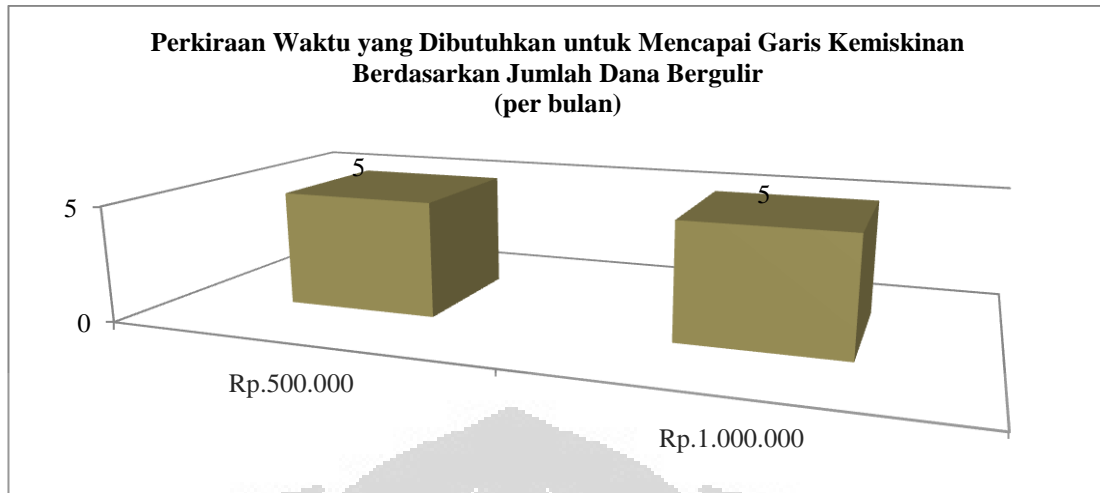
Pada kelompok rumah tangga miskin yang memperoleh Dana Bergulir sebesar Rp.1000.000,- secara rata-rata tidak menunjukkan perubahan status kemiskinan. Hal itu ditunjukkan oleh rata-rata konsumsi perkapita perbulan setelah adanya intervensi program yang masih berada di bawah Garis Kemiskinan. Responden untuk kelompok ini adalah 11 rumah tangga miskin yang pekerjaannya meliputi Tukang Bengkel, Buruh Bangunan, Buruh Tani, Sopir, (masing-masing 1 responden) dan Pedagang sebanyak 5 responden.

Untuk kelompok rumah tangga yang memperoleh Dana Bergulir sebesar Rp.1.250.000,- menunjukkan perubahan status dari Miskin sebelum intervensi kegiatan Pinjaman Bergulir menjadi Tidak Miskin setelah adanya intervensi. Responden untuk kelompok ini terdiri dari 46 rumah tangga dengan profesi Buruh Pabrik, Penjaga Makan, Penjahit, Sopir (masing-masing 1 responden); Tukang Batu dan Wilit (masing-masing 2 responden); Buruh Tani (9 responden); dan Pedagang (28 responden).

Rumah tangga yang mendapat Dana Bergulir sebesar Rp.1.500.000,- rata-rata konsumsi perkapita perbulan sebelum intervensi program nyaris mendekati Garis Kemiskinan, demikian pula setelah adanya intervensi program, hanya sedikit di atas Garis Kemiskinan. Responden untuk kelompok ini sebanyak 36 rumah tangga yang terdiri dari: Buruh Pabrik, Penjahit, Peternak (masing-masing 1 responden); Tukang Batu (2 responden); Sopir (3 responden); Buruh Tani (7 responden); serta Pedagang (21 responden). Berdasarkan jumlah Dana Bergulir yang dapat ditarik kesimpulan bahwa secara rata-rata kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan mengakibatkan perubahan positif bagi status kemiskinan apabila jumlah Dana Bergulir yang diterima rumah tangga  $\geq$  Rp.1.250.000,-.

#### **4.2.6.1. Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Dana Bergulir**

Berdasarkan jumlah Dana Bergulir, rumah tangga yang mendapat Dana Bergulir sebesar Rp.500.000,- dan Rp.1.000.000,- secara rata-rata masih berstatus Miskin. Perkiraan waktu yang dibutuhkan rumah tangga ini untuk mencapai Garis Kemiskinan secara rata-rata sama yaitu 5 bulan sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.13 Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Dana Bergulir

#### **4.2.7. Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga Kelompok Aksi**

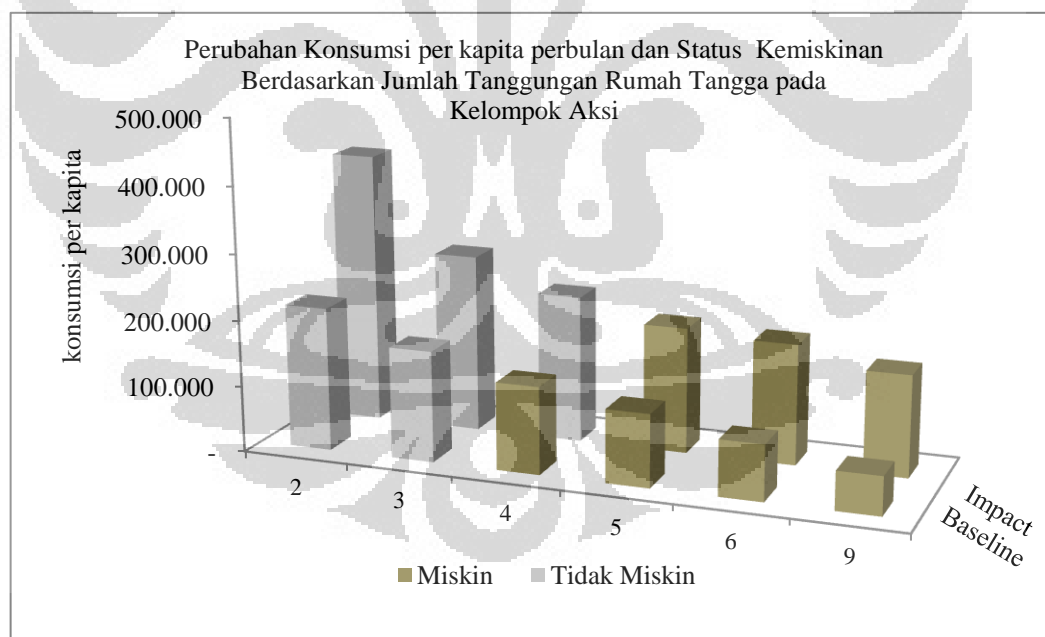
Jumlah tanggungan keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Termasuk dalam tanggungan adalah anggota keluarga atau kerabat yang secara ekonomi masih bergantung pada responden (peminjam Dana Bergulir) serta responden itu sendiri. Pada Kelompok Aksi sampel yang diambil peneliti terdiri dari rumah tangga dengan jumlah tanggungan bervariasi mulai dari 2 hingga 9 orang. Terdapat 3 rumah tangga dengan jumlah tanggungan 2 orang; 20 rumah tangga dengan jumlah tanggungan 3 orang; 49 rumah tangga dengan jumlah tanggungan 4 orang, merupakan jumlah terbanyak dalam sampel; 28 rumah tangga dengan jumlah tanggungan 5 orang, 8 rumah tangga dengan jumlah tanggungan 6 orang; dan 2 rumah tangga dengan jumlah tanggungan 9 orang. Karena mempengaruhi konsumsi perkapita perbulan pada sebuah rumah tangga, pada akhirnya jumlah tanggungan pada sebuah rumah tangga juga berpengaruh pada tercapainya indikator keberhasilan kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan yaitu meningkatkan pengeluaran rumah tangga penerima manfaat.

Perubahan konsumsi perkapita perbulan dan status kemiskinan berdasarkan jumlah tanggungan rumah tangga pada Kelompok Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.7 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga pada Kelompok Aksi

No	Jumlah Tangg.	Rumah Tangga		Baseline		Impact		Perubahan	
		Jml	%	Rata-rata kons/kap/bl	Status	Rata-rata kons/kap/bl	Status	Rp	%
1	2	3	2,73	216.667	Tidak Miskin	411.950	Tidak Miskin	195.283	90,13
2	3	20	18,18	167.667	Tidak Miskin	269.881	Tidak Miskin	102.215	60,96
3	4	49	44,55	132.066	Miskin	222.392	Tidak Miskin	90.326	68,39
4	5	28	25,45	110.071	Miskin	190.512	Miskin	80.441	73,08
5	6	8	7,27	84.375	Miskin	182.324	Miskin	97.949	116,09
6	9	2	1,82	58.333	Miskin	153.815	Miskin	95.482	163,68
	Jumlah	110	100						

Sumber: Data primer. Telah diolah.



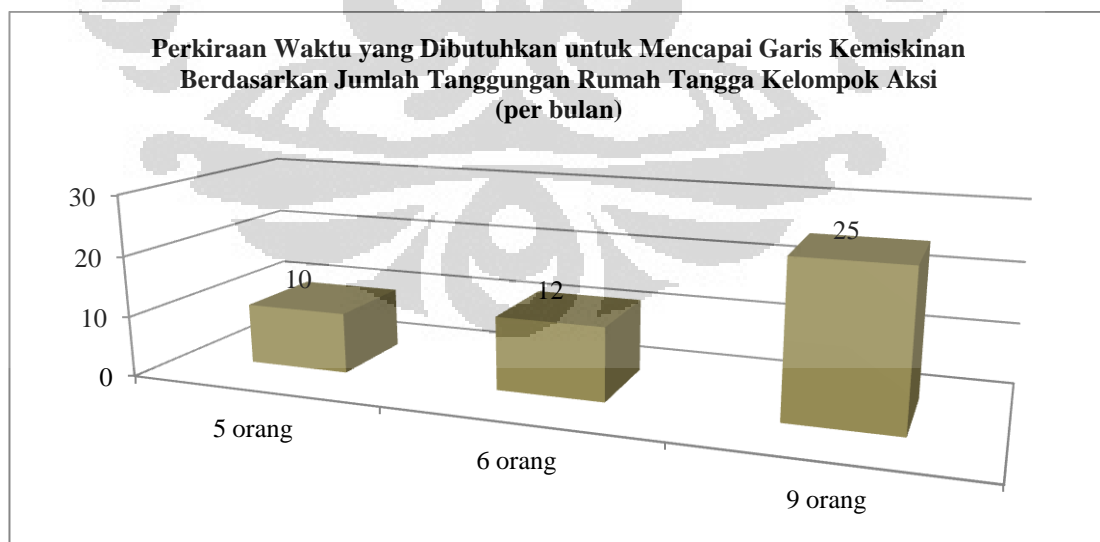
Gambar 4.14 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga pada Kelompok Aksi

Dari tabel di atas rata-rata konsumsi perkapita perbulan pada rumah tangga penerima Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dengan jumlah tanggungan sebesar 6

dan 9 orang mengalami peningkatan di atas 100 %. Namun status kemiskinannya tetap Miskin. Perubahan status kemiskinan dialami oleh rumah tangga dengan jumlah tanggungan sebanyak 4 orang, setelah mendapat intervensi program rata-rata konsumsi perkapita perbulan meningkat di atas Garis Kemiskinan sehingga menjadi Tidak Miskin. Sedangkan rumah tangga dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 dan 3 orang tetap berada dalam status Tidak Miskin dan sama-sama mengalami peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah intervensi Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan rumah tangga dengan jumlah tanggungan keluarga  $\leq 4$  orang mengalami perubahan status menjadi Tidak Miskin. Pada rumah tangga miskin semakin banyak jumlah tanggungan semakin kecil konsumsi per kapita dan semakin sulit bagi mereka untuk beranjak dari kemiskinan.

#### 4.2.7.1. Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

Rumah tangga dengan jumlah tanggungan 5, 6 dan 9 masih berstatus Miskin setelah mendapat intervensi program sebagaimana disebutkan di atas. Perkiraan rata-rata waktu yang dibutuhkan rumah tangga-rumah tangga tersebut untuk mencapai Garis Kemiskinan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.15 Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga Kelompok Aksi

Dari gambar di atas diketahui bahwa makin rumah tangga dengan jumlah tanggungan 9 orang membutuhkan waktu paling lama untuk mencapai Garis Kemiskinan yaitu 25 bulan secara rata-rata (2 tahun 1 bulan), diikuti oleh rumah tangga dengan jumlah tanggungan 6 orang yaitu 12 bulan (1 tahun) dan rumah tangga dengan jumlah tanggungan 5 orang yaitu 10 bulan. Dari gambaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makin banyak jumlah tanggungan makin lama waktu yang dibutuhkan oleh rumah tangga miskin untuk mencapai Garis Kemiskinan.

### **4.3. Perhitungan Selisih Rata-rata Konsumsi Pada Kelompok Kontrol**

Kelompok kontrol adalah rumah tangga miskin yang tidak memperoleh manfaat kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dengan karakteristik kemiskinan sama dengan rumah tangga pada Kelompok Aksi yang diukur berdasarkan kesamaan rata-rata konsumsi perkapita perbulan pada periode sebelum intervensi program atau *Baseline* (tahun 2007). Untuk meminimalkan kemungkinan adanya transfer Dana Bergulir dari rumah tangga penerima manfaat kepada rumah tangga bukan penerima manfaat, sampel untuk rumah tangga kontrol diambil dari wilayah kecamatan lain yaitu Kecamatan Ulujami, yang berjarak  $\pm 15$  km dari Kecamatan Petarukan. Sama halnya dengan analisa yang dilakukan terhadap Kelompok Aksi, pada rumah tangga Kelompok Kontrol juga dihitung perubahan konsumsi perkapita perbulan antara tahun *baseline* (2007) dan tahun *impact* (2011) serta dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Jawa Tengah 2007 dan 2011 untuk mengetahui perubahan status kemiskinannya. Kemudian dilakukan penghitungan perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan dan status kemiskinan berdasarkan jenis pekerjaan dan jumlah tanggungan keluarga untuk dibandingkan dengan Kelompok Aksi. Lampiran 6 adalah rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga Kelompok Kontrol.

#### **4.3.1. Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan pada Kelompok Kontrol**

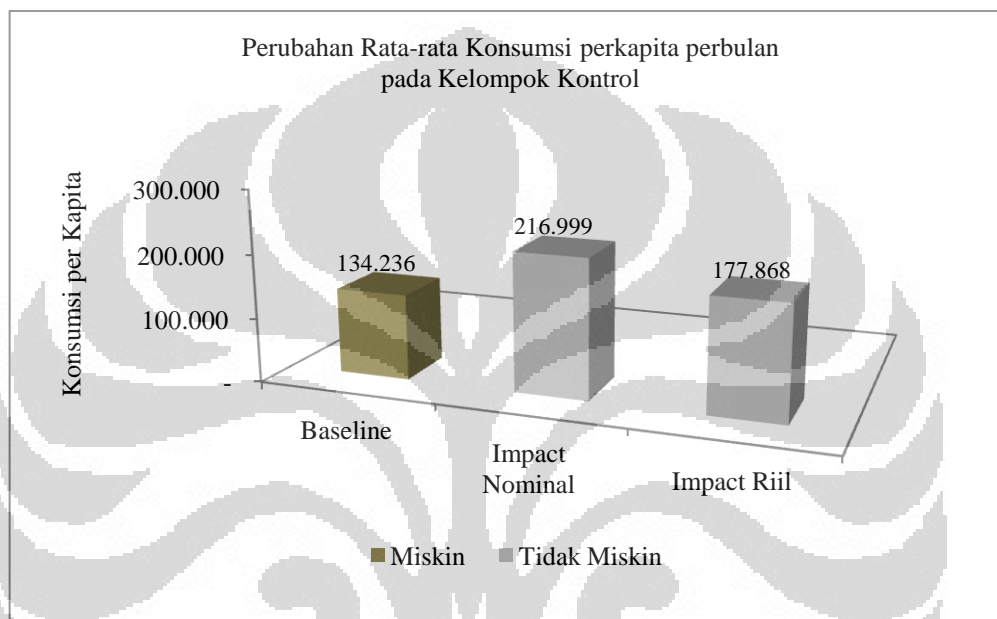
Seperti halnya pada Kelompok Aksi pada rumah tangga Kelompok Kontrol juga terjadi perubahan konsumsi perkapita perbulan dari periode 2007 sampai 2011, seperti pada tabel dan grafik berikut ini:

**Universitas Indonesia**

Tabel 4.8 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan pada Kelompok Kontrol

Baseline	Impact		Perubahan			
			Nominal		Riil	
	Nominal	Riil	Rp	%	Rp	%
134.236	216.999	177.868	82.762,85	61,65	43.632	32,50

Sumber: Data primer. Telah diolah.



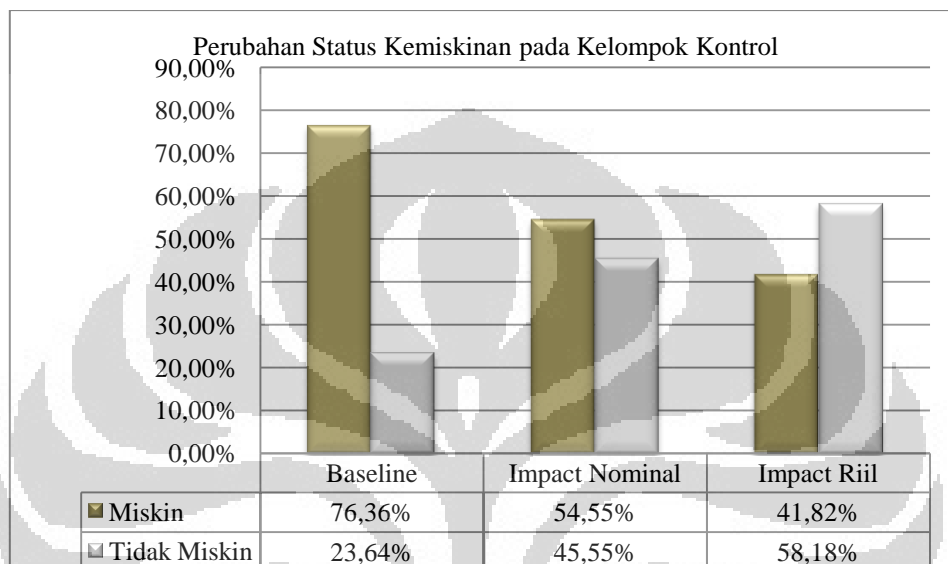
Gambar 4.16 Perubahan Rata-rata Konsumsi per kapita per bulan pada Kelompok Kontrol

Pada tahun 2007 rata-rata konsumsi perkapita perbulan adalah sebesar Rp.134.236,- artinya secara rata-rata masyarakat pada Kelompok Kontrol tergolong Miskin karena konsumsi perkapita perbulan berada di bawah Garis Kemiskinan Jawa Tengah tahun 2007 yaitu Rp.154.111,- Pada tahun 2011 rata-rata konsumsi perkapita perbulan meningkat sebesar Rp.82.762,85 atau sebesar 61,65 % menjadi Rp.216.999,- sehingga dikategorikan Tidak Miskin karena secara rata-rata konsumsi perkapita perbulan berada di atas Garis Kemiskinan Jawa Tengah tahun 2011 yaitu Rp.206.611,-. Untuk melihat perubahan secara riil terhadap kondisi awal, dilakukan penghitungan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi efektif sebesar 22% sehingga diperoleh perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan sebesar Rp.43.632,- atau sebesar 32,50 %.



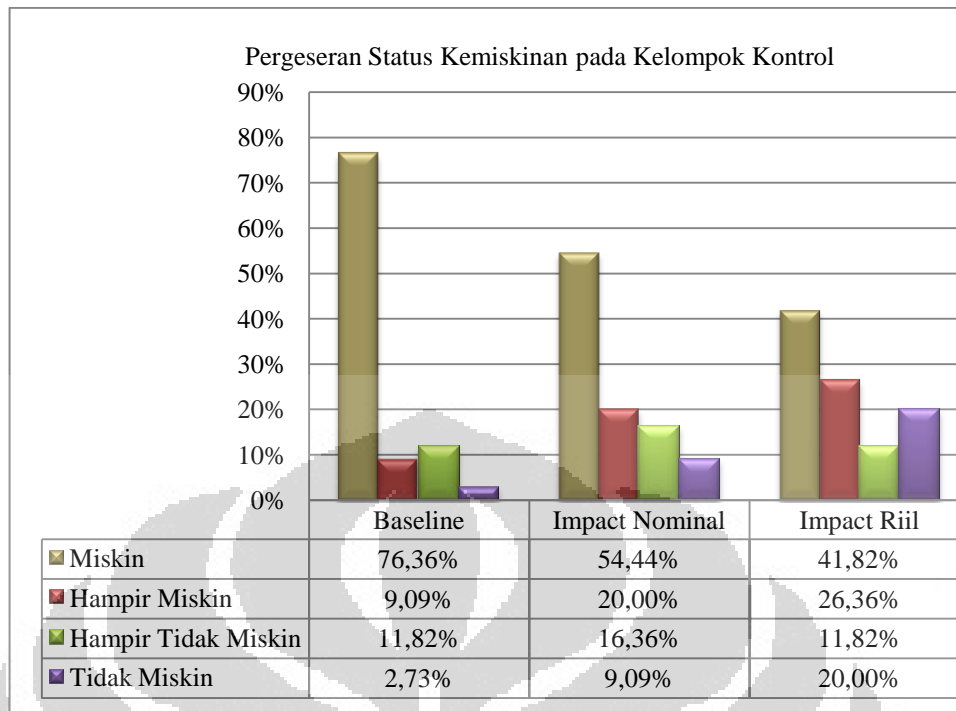
#### 4.3.2. Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Pergeseran Status Kemiskinan Kelompok Kontrol

Dengan mempertimbangkan Garis Kemiskinan Jawa Tengah tahun 2007 dan 2011, diperoleh data status kemiskinan rumah tangga pada Kelompok Kontrol dan perubahannya selama periode tahun 2007 dan 2011 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.17 Perubahan Status Kemiskinan pada Kelompok Kontrol

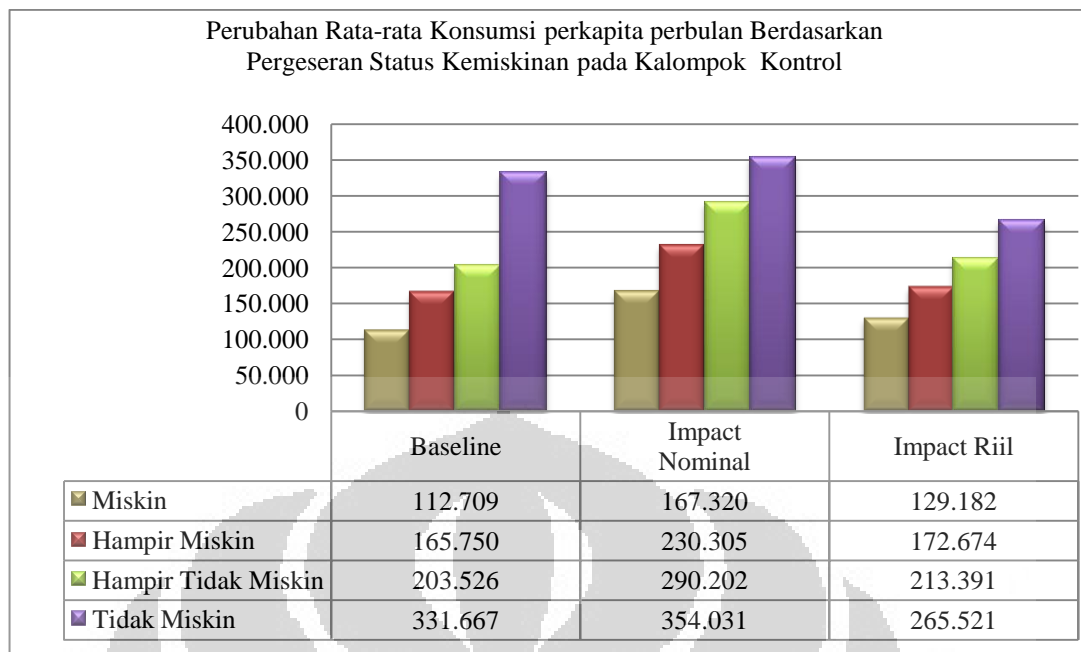
Jumlah rumah tangga Miskin pada Kelompok Kontrol tahun 2007 adalah 84 dan pada tahun 2011 turun menjadi 60 atau mengalami penurunan **21,81%**. Apabila memperhitungkan tingkat inflasi selama kurun waktu 2008 hingga Juli 2011 sebesar 22 %, maka jumlah rumah tangga miskin turun menjadi 46, atau mengalami penurunan sebesar 35,54 %. Apabila rumah tangga dengan status Tidak Miskin *displit* maka pergeseran status kemiskinan pada Kelompok Kontrol adalah sebagai berikut:



Gambar 4.18 Pergeseran Status Kemiskinan pada Kelompok Kontrol

Dari tabel tersebut rumah tangga dengan status Hampir Miskin, Hampir Tidak Miskin dan Tidak Miskin bertambah pada tahun 2011, sehingga dapat dikatakan bahwa pergeseran dalam status kemiskinan pada Kelompok Kontrol menunjukkan perubahan yang positif.

Secara rata-rata konsumsi perkapita perbulan pada tiap status kemiskinan menunjukkan peningkatan pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2007. Rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga miskin pada Kelompok Kontrol berdasarkan pergeseran status kemiskinan adalah:



Gambar 4.19 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan Berdasarkan Pergeseran Status Kemiskinan pada Kelompok Kontrol

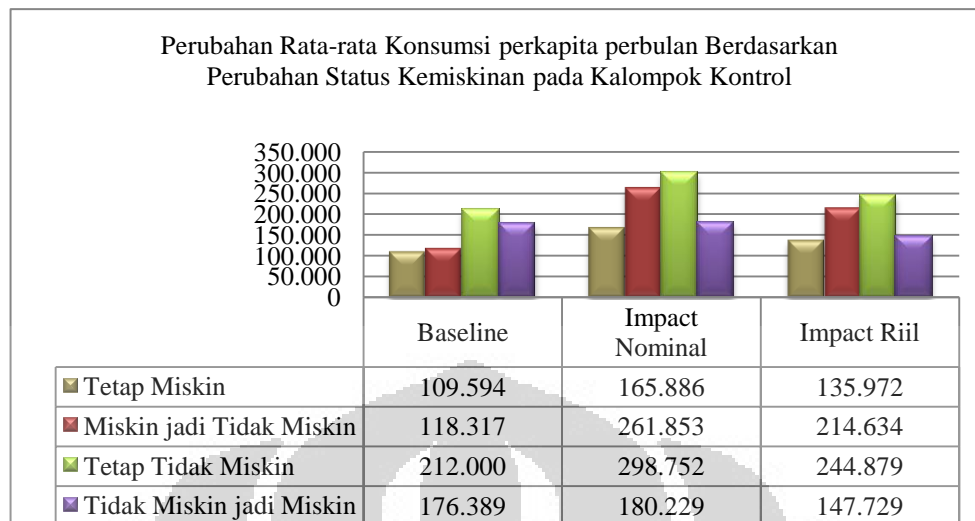
Rumah tangga pada tiap status kemiskinan menunjukkan perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan. Pada rumah tangga dengan status Miskin, Hampir Miskin, dan Hampir Tidak Miskin mengalami peningkatan konsumsi perkapita perbulan di tahun 2011, hanya rumah tangga dengan kategori Tidak Miskin yang secara riil mengalami penurunan rata-rata konsumsi perkapita perbulan.

Apabila melihat status kemiskinan pada pada tahun 2007, masing-masing rumah tangga mengalami perubahan status yang berbeda pada tahun 2011, ada yang tetap Miskin, tetap Tidak Miskin, Miskin menjadi Tidak Miskin dan dari Tidak Miskin menjadi Miskin.

Tabel 4.9 Perubahan Status Kemiskinan Tiap Rumah Tangga pada Kelompok Kontrol

Baseline	Impact		
	Miskin	Tidak Miskin	Jumlah
Miskin	54	30	84
Tidak Miskin	6	20	26
Jumlah	60	50	110

Sumber: Data primer. Telah diolah.



Gambar 4.20 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan Berdasarkan Perubahan Status Kemiskinan pada Kelompok Kontrol

Dari tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa rumah tangga yang mengalami peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan paling besar adalah rumah tangga yang mengalami perubahan status dari Miskin menjadi Tidak Miskin.

#### 4.3.3. Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Kontrol

Jenis pekerjaan adalah salah satu faktor yang menentukan pendapatan rumah tangga. Pada rumah tangga miskin besarnya pendapatan dapat dilihat dari tingkat konsumsinya, karena sebagian besar (semua) pendapatan yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Sebagaimana pada Kelompok Aksi seperti telah disebutkan di atas, pada rumah tangga miskin yang tidak mendapat intervensi kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan rata-rata konsumsi perkapita perbulan juga mengalami perubahan. Dalam periode waktu yang sama dengan Kelompok Aksi yaitu tahun 2007 ke tahun 2011 rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga pada Kelompok Kontrol mengalami peningkatan.

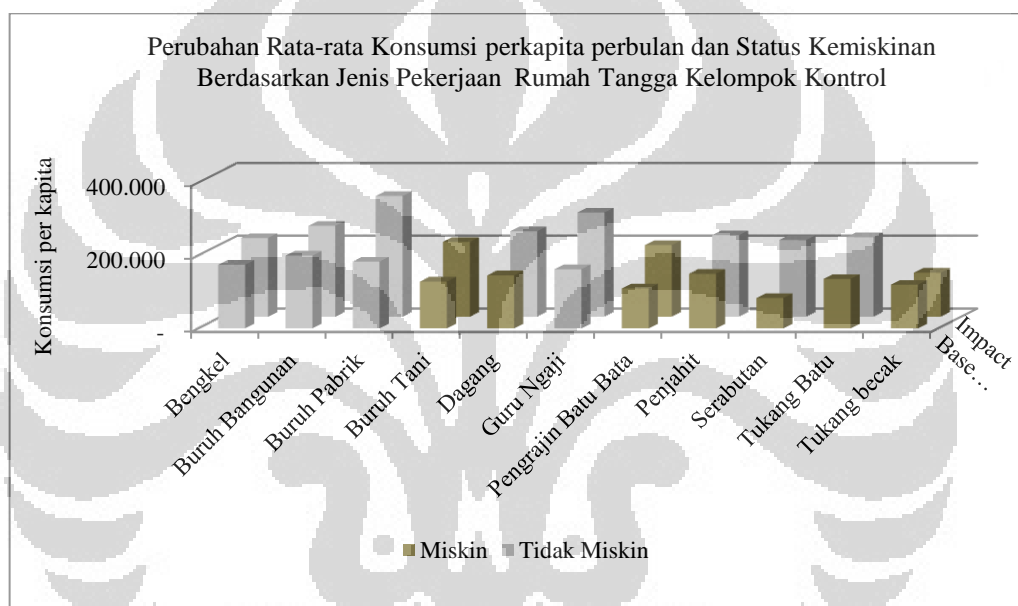
Sampel pada Kelompok Kontrol berprofesi sebagai Buruh Bangunan, Guru Ngaji, Pengrajin Batu bata, Penjahit dan Tukang Becak sebanyak 1 responden; Bengkel dan Buruh Pabrik sebanyak 2 responden; Serabutan dan Tukang Batu sebanyak 5 responden; Dagang 29 responden dan paling banyak adalah Buruh Tani 62 responden. Perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan dan status kemiskinan pada masing-masing profesi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Kontrol

No	Pekerjaan	Rumah Tangga		Baseline		Impact		Perubahan	
		Jml	%	Rata-rata kons/kap/bl	Status	Rata-rata kons/kap/bl	Status	Rp	%
1	Bengkel	2	1,82	175.000	Tidak Miskin	216.108	Tidak Miskin	41.108	23,49
2	Buruh Bangunan	1	0,91	200.000	Tidak Miskin	249.755	Tidak Miskin	49.755	24,88
3	Buruh Pabrik	2	1,82	183.333	Tidak Miskin	331.839	Tidak Miskin	148.506	81,00
4	Buruh Tani	62	26,36	128.735	Miskin	205.550	Miskin	76.815	59,67
5	Dagang	29	26,36	145.869	Miskin	234.758	Tidak Miskin	88.888	60,94
6	Guru Ngaji	1	0,91	162.500	Tidak Miskin	286.005	Tidak Miskin	123.505	76,00
7	Pengrajin Batu Bata	1	0,91	110.000	Miskin	196.767	Miskin	86.767	78,88
8	Penjahit	1	0,91	150.000	Miskin	223.987	Tidak Miskin	73.987	49,32
9	Serabutan	5	4,55	83.333	Miskin	210.465	Tidak Miskin	127.132	152,56
10	Tukang Batu	5	4,55	135.667	Miskin	218.377	Tidak Miskin	82.710	60,97
11	Tukang Becak	1	0,91	120.000	Miskin	121.158	Miskin	1.158	0,97
	Jumlah	110	100						

Sumber: Data primer. Telah diolah.

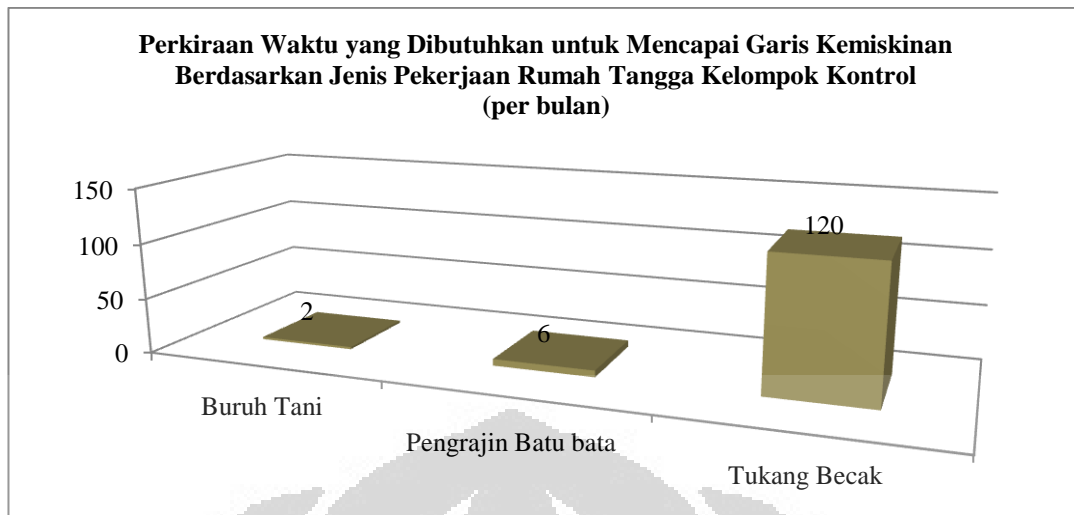
Dari tabel di atas rumah tangga dengan pekerjaan sebagai Pedagang, Penjahit, Serabutan dan Tukang Batu mengalami perubahan status dari Miskin menjadi Tidak Miskin. Rumah tangga yang mempunyai usaha Bengkel, bekerja sebagai Buruh Bangunan, Buruh Pabrik dan Guru Ngaji pada tahun 2011 tetap berstatus Tidak Miskin. Sedangkan Buruh Tani, pengrajin Batu bata dan Tukang Becak tetap miskin. Untuk lebih jelas melihat perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan dan status kemiskinan berdasarkan jenis pekerjaan rumah tangga pada Kelompok Kontrol disajikan grafik berikut ini:



Gambar 4.21 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Rumah tangga Kelompok Kontrol

#### 4.3.3.1. Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Kontrol

Pada Kelompok Kontrol rumah tangga dengan pekerjaan sebagai Buruh Tani, Pengrajin Batu bata dan Tukang Becak secara rata-rata masih berstatus Miskin setelah mendapat intervensi program. Perkiraan waktu yang dibutuhkan rumah tangga tersebut untuk mencapai Garis Kemiskinan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.22 Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Kontrol

Mengacu pada peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan selama periode waktu 3,5 tahun (dihitung sejak tahun 2007 sampai dengan saat dilakukan penelitian Juni 2011), rumah tangga dengan pekerjaan sebagai Tukang Becak membutuhkan waktu paling lama untuk mencapai Garis Kemiskinan, yaitu 120 bulan atau 10 tahun, sedangkan rumah tangga sebagai Pengrajin Batu bata 6 bulan dan Buruh Tani 2 bulan.

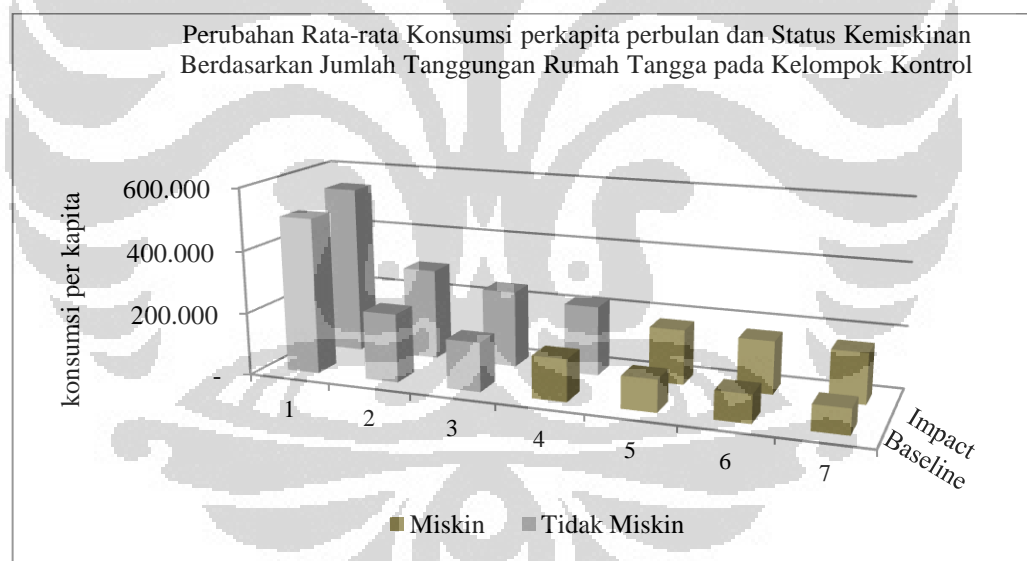
#### 4.3.4. Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita dan Status Kemiskinan perbulan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga Kelompok Kontrol

Rumah tangga Miskin pada Kelompok Kontrol mempunyai jumlah tanggungan antara 1 hingga 7 orang. Rumah tangga dengan jumlah tanggungan 4 orang merupakan porsi terbesar pada sampel yang diambil, yaitu 35 responden. Berikutnya adalah rumah tangga dengan jumlah tanggungan 3 dan 5 orang. Sedangkan rumah tangga dengan jumlah tanggungan 1, 2, 6, dan 7 masing-masing sebanyak 1, 5, 7 dan 4 responden. Perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan dan status kemiskinan rumah tangga Kelompok Kontrol berdasarkan jumlah tanggungan ditunjukkan pada Lampiran dan grafik berikut ini:

Tabel 4.11 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga Kelompok Kontrol

No	Jumlah Tangg.	Rumah Tangga		Baseline		Impact		Perubahan	
		Jml	%	Rata-rata kons/kap/bl	Status	Rata-rata kons/kap/bl	Status	Rp	%
1	1	1	0,91	500.000	Tidak Miskin	542.738	Tidak Miskin	42.738	8,55
2	2	5	4,55	219.000	Tidak Miskin	293.526	Tidak Miskin	74.526	34,03
3	3	29	26,36	156.897	Tidak Miskin	246.378	Tidak Miskin	89.482	57,03
4	4	35	31,82	134.357	Miskin	223.036	Tidak Miskin	88.679	66,00
5	5	29	26,36	102.483	Miskin	175.342	Miskin	72.859	71,09
6	6	7	6,36	89.286	Miskin	168.477	Miskin	79.191	88,69
7	7	4	3,64	80.357	Miskin	160.995	Miskin	80.638	100,35
	Jumlah	110	100						

Sumber: Data primer. Telah diolah.



Gambar 4.23 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga pada Kelompok Kontrol

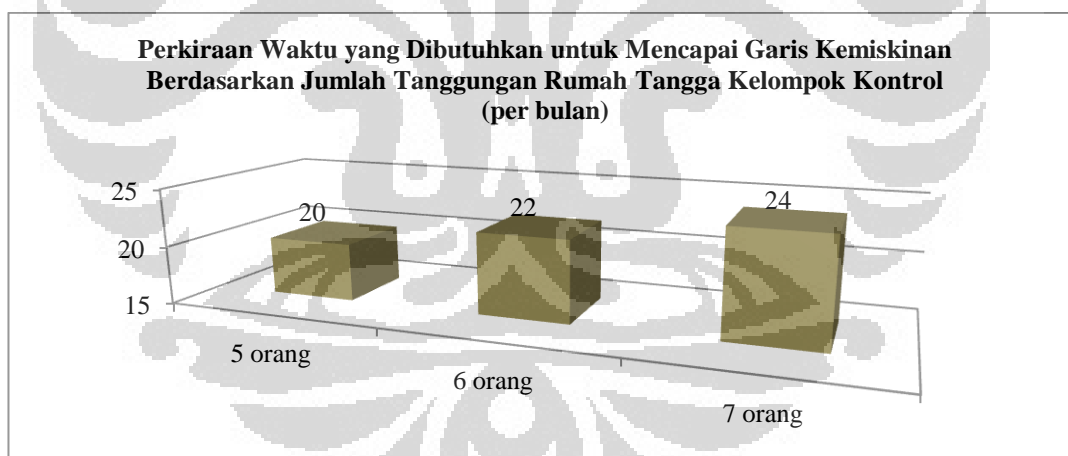
Semua rumah tangga miskin dalam Kelompok Kontrol tersebut mengalami peningkatan konsumsi perkapita perbulan pada tahun 2011, tetapi berdasarkan jumlah tanggungan keluarga, rumah tangga dengan jumlah tanggungan sebanyak 5, 6 dan 7 orang tidak beranjak dari status Miskin. Sementara itu rumah tangga dengan



jumlah tanggungan sebanyak 4 orang pada tahun 2011 mengalami perubahan status menjadi Tidak Miskin, sedangkan rumah tangga dengan jumlah tanggungan sebanyak 1, 2 dan 3 tetap Tidak Miskin. Apabila dilihat dari peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan, rumah tangga yang mengalami peningkatan paling besar adalah rumah tangga dengan jumlah tanggungan sebanyak 7 orang yaitu meningkat sebesar 100,35 %, dan yang mengalami peningkatan paling sedikit adalah rumah tangga dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang. Dari tabel tersebut dapat pula dilihat bahwa pada rumah tangga miskin jumlah konsumsi perkapita perbulan menurun seiring dengan bertambahnya jumlah tanggungan keluarga.

#### 4.3.4.1. Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga Kelompok Kontrol

Pada Kelompok Kontrol rumah tangga dengan jumlah tanggungan sebanyak 5, 6 dan 7 tetap berstatus Miskin setelah periode intervensi program. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Garis Kemiskinan adalah:



Gambar 4.24 Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai Garis Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga Kelompok Kontrol

Sama halnya pada Kelompok Aksi, makin banyak jumlah tanggungan makin lama perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh rumah tangga Miskin untuk mencapai Garis Kemiskinan. Rumah tangga dengan jumlah tanggungan sebanyak 7 orang secara rata-rata membutuhkan waktu selama 24 bulan (2 tahun). Sementara itu rumah

tangga dengan jumlah tanggungan 6 orang selama 22 bulan dan jumlah tanggungan 5 orang selama 20 bulan.

#### 4.4. Perhitungan Dampak dengan Menggunakan Kelompok Kontrol

Setelah perhitungan selisih rata-rata konsumsi perkapita perbulan pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol sebelum dan setelah periode intervensi kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan, tahap berikutnya adalah menghitung selisih antara selisih rata-rata konsumsi perkapita perbulan pada Kelompok Aksi dengan selisih rata-rata konsumsi perkapita perbulan pada Kelompok Kontrol. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui adanya dampak kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan pada Kelompok Aksi dan besaran dampak yang diakibatkan oleh adanya intervensi program tersebut.

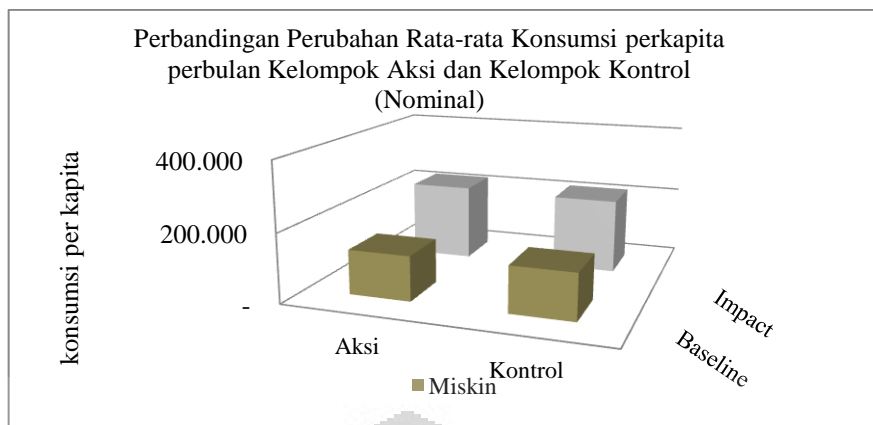
##### 4.4.1. Perbandingan Perubahan Konsumsi perkapita perbulan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Penghitungan selisih rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol sebelum (*baseline* tahun 2007) dan sesudah intervensi (*impact* tahun 2011) kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol (Nominal)

Kelompok	Baseline (Rp)	Impact Nominal (Rp)	Perubahan (Rp)	Perubahan (%)
Aksi	130.439	223.931	93.481,89	71,67
Kontrol	134.236	216.999	82.762,85	61,65
<b>Selisih</b>			<b>10.719,04</b>	<b>10,02</b>

Sumber: Data primer. Telah diolah.



Gambar 4.25 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol (Nominal)

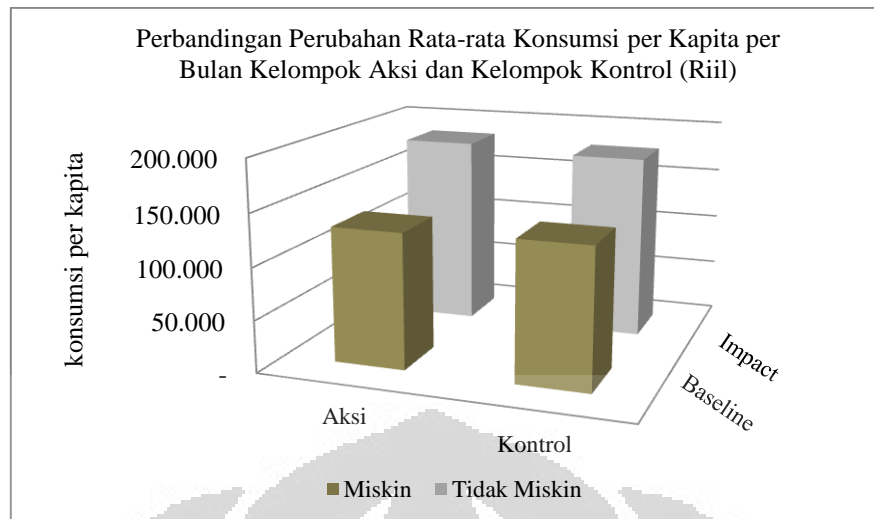
Dari hasil penghitungan tersebut diperoleh rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga pada Kelompok Aksi setelah adanya intervensi program (tahun 2011) secara nominal **10,02 %** lebih besar daripada rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga pada Kelompok Kontrol.

Sedangkan secara riil, dengan memasukkan inflasi efektif dari tahun 2008 hingga Juli 2011 sebesar 22 % (BPS) dapat dilihat perbedaan rata-rata konsumsi perkapita perbulan dari tahun 2007 pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.13 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol (Riil)

Kelompok	Baseline (Rp)	Impact Riil (Rupiah 2007)	Perubahan (Rp)	Perubahan (%)
Aksi	130.439	183.542	53.103	40,71
Kontrol	134.236	177.868	43.632	32,50
<b>Selisih</b>			<b>9.471</b>	<b>8,21</b>

Sumber: Data primer. Telah diolah.

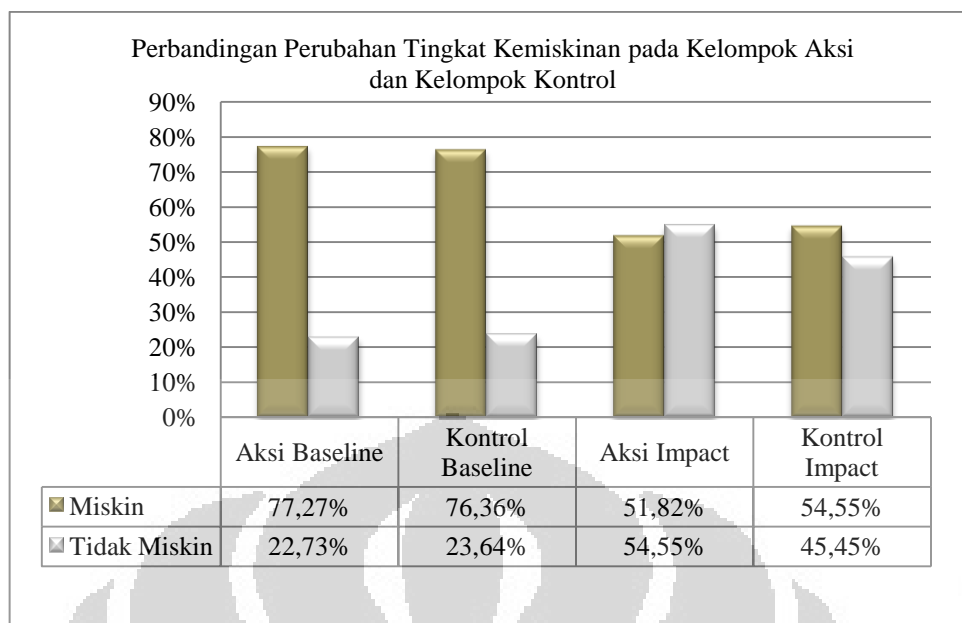


Gambar 4.26 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol (Riil)

Secara riil, rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga baik pada Kelompok Aksi maupun Kelompok Kontrol mengalami peningkatan, namun pada Kelompok Aksi peningkatannya lebih besar **8,21%** dibandingkan dengan Kelompok Kontrol. Dengan demikian kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang mempunyai dampak positif sesuai dengan yang diharapkan yaitu meningkatnya tingkat konsumsi rumah tangga miskin penerima manfaat program, dengan besaran dampak sebesar **8,21%**.

#### 4.4.2. Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan dan Pergeseran Status Kemiskinan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

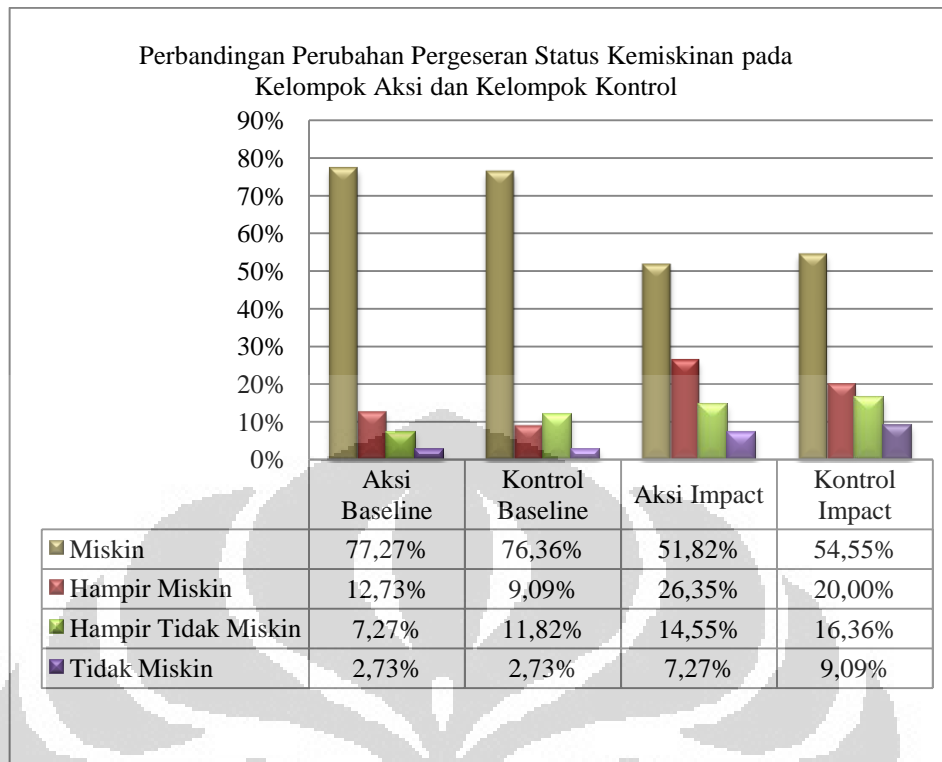
Dengan mempertimbangkan Garis Kemiskinan Jawa Tengah tahun 2007 sebesar Rp.154.111,- dan Garis Kemiskinan Jawa Tengah tahun 2011 sebesar Rp.209.611,- perbandingan perubahan jumlah rumah tangga miskin pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol adalah sebagai berikut:



Gambar 4.27 Perbandingan Perubahan Tingkat Kemiskinan pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Sebelum mendapat intervensi program Pinjaman Bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan tingkat kemiskinan di Kelompok Aksi hampir sama dengan tingkat kemiskinan pada Kelompok Kontrol. Setelah adanya intervensi program tingkat kemiskinan pada Kelompok Aksi mengalami penurunan sebesar 25,45 % dan Kelompok Kontrol mengalami penurunan kemiskinan sebesar 21,81 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah intervensi program penurunan kemiskinan pada rumah tangga penerima manfaat lebih besar 3,64 % dibanding dengan rumah tangga bukan penerima manfaat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan memberikan dampak positif terhadap penurunan kemiskinan pada rumah tangga penerima manfaat, dengan besaran dampak sebesar **3,64 %**.

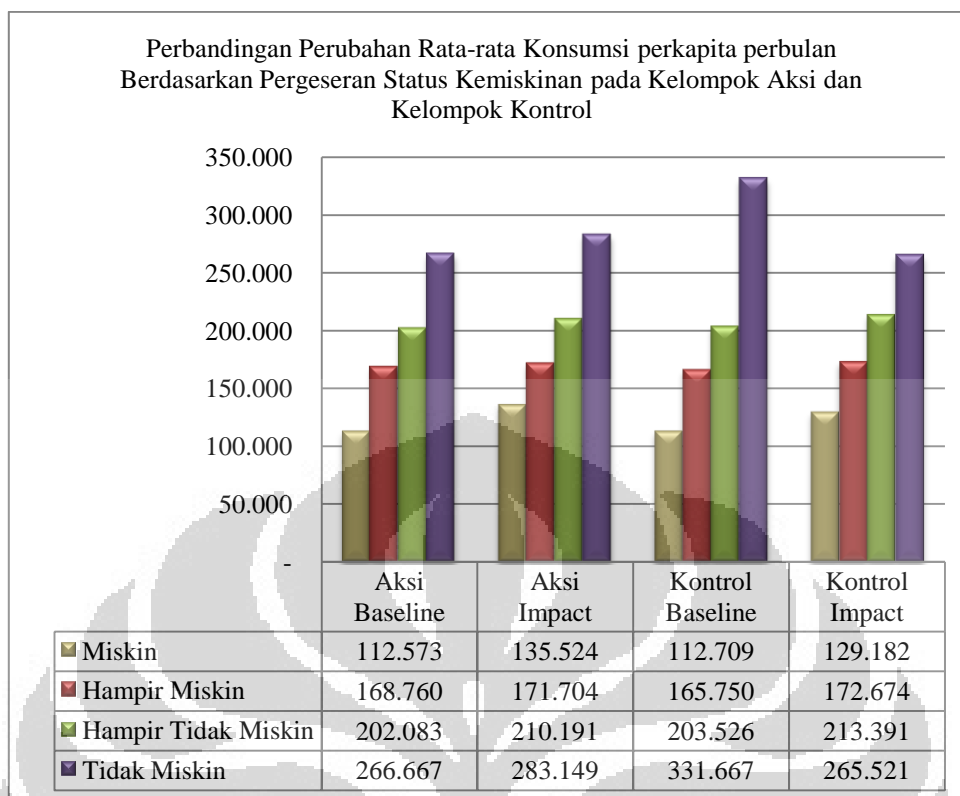
Perbedaan dalam pergeseran status kemiskinan antara Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol adalah:



Gambar 4.28 Perbandingan Perubahan Pergeseran Status Kemiskinan pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Dilihat dari pergeseran status kemiskinan, kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan berdampak positif pada rumah tangga dengan status kemiskinan Hampir Miskin dan Hampir Tidak Miskin. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan persentase rumah tangga Hampir Miskin pada Kelompok Aksi lebih besar **2,71%** dibandingkan pada Kelompok Kontrol dan rumah tangga Hampir Tidak Miskin pada Kelompok Aksi **2,74%** lebih besar daripada rumah tangga Hampir Tidak Miskin pada Kelompok Kontrol.

Sedangkan perubahan rata-rata konsumsi pada tiap status kemiskinan di Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol adalah:



Gambar 4.29 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan  
Berdasarkan Pergeseran Status Kemiskinan pada Kelompok Aksi dan  
Kelompok Kontrol

Berdasarkan rata-rata konsumsi perkapita perbulan pada tiap status kemiskinan, kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan berdampak positif pada rumah tangga dengan status kemiskinan Miskin dan Tidak Miskin dengan besaran dampak masing-masing **5,78%** dan **26,12%**. Artinya rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga Miskin pada Kelompok Aksi lebih besar 5,78% dibandingkan rumah tangga Miskin pada Kelompok Kontrol dan rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga Tidak Miskin pada Kelompok Aksi lebih besar 26,12% daripada rumah tangga Tidak Miskin pada Kelompok Kontrol.

Selisih perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan berdasarkan Pergeseran Status Kemiskinan pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Nilai	Status Kemiskinan							
	Kelompok Aksi				Kelompok Kontrol			
	Miskin	Hampir Miskin	Hampir Tidak Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Hampir Tidak Miskin	Tidak Miskin
Baseline	112.573	168.760	202.083	266.667	112.709	165.750	203.526	331.667
Impact Nominal	175.347	240.626	282.485	392.321	167.320	230.305	290.202	354.031
Impact Riil	135.524	171.704	210.191	283.149	129.182	172.674	213.391	265.521
Perubahan Riil (Rp)	22.951	2.924	8.108	16.483	16.472	6.924	9.866	-66.146
Perubahan Riil (%)	20,39	1,73	4,01	6,18	14,61	4,18	4,85	-19,94

Sumber: Data primer. Telah diolah.

#### 4.4.3. Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Untuk mengukur perbedaan konsumsi perkapita perbulan berdasarkan jenis pekerjaan, penulis memilih jenis pekerjaan responden yang sama yang ada baik di Kelompok Aksi maupun Kelompok Kontrol. Hal ini bertujuan agar perbedaan tersebut dapat diperbandingkan. Berdasarkan sampel pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol jenis pekerjaan yang sama-sama ada pada dua kelompok itu antara lain adalah Bengkel, Buruh Bangunan, Buruh Pabrik, Buruh Tani, Dagang, Penjahit dan Tukang Batu. Berikut ini adalah perbandingan perubahan konsumsi perkapita perbulan pada rumah tangga dengan pekerjaan tersebut pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol.



Tabel 4.15 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Pekerjaan Rumah Tangga Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Pek.	Kelompok Aksi					Kelompok Kontrol				
	Baseline		Impact		Per. (%)	Baseline		Impact		Per. (%)
	Rata-rata Kons.	Status	Rata-rata Kons.	Status		Rata-rata Kons.	Status	Rata-rata Kons.	Status	
Bengkel	137.500	M	187.095	M	36,07	175.000	TM	216.108	TM	23,49
Buruh Bangunan	80.000	M	146.513	M	83,14	200.000	TM	249.755	TM	24,88
Buruh Pabrik	131.250	M	256.361	TM	95,32	183.333	TM	331.839	TM	81,00
Buruh Tani	121.394	M	225.966	TM	86,14	128.735	M	205.550	M	59,67
Dagang	136.815	M	227.502	TM	66,24	145.869	M	234.758	TM	60,94
Penjahit	150.000	M	235.336	TM	56,89	150.000	M	223.987	TM	49,32
Tukang Batu	126.250	M	171.048	M	35,48	135.667	M	218.377	TM	60,97

Keterangan: M = Miskin; TM = Tidak Miskin; Per = Perubahan; Pek = Pekerjaan

Sumber: Data primer. Telah diolah.

Dari tabel tersebut perbedaan konsumsi perkapita perbulan berdasarkan jenis pekerjaan antara lain:

#### 1. Bengkel

Bengkel dimaksud di sini adalah rumah tangga yang membuka usaha bengkel kecil antara lain bengkel sepeda dan tambal ban. Pada Kelompok Aksi rumah tangga ini berstatus Miskin sebelum adanya intervensi program dengan rata-rata konsumsi perkapita perbulan sebesar Rp.137.500, sedangkan pada Kelompok Kontrol berstatus Tidak Miskin dengan rata-rata konsumsi perkapita perbulan sebesar Rp.175.000,- Setelah adanya intervensi program rumah tangga pada Kelompok Aksi tetap Miskin dan rumah tangga pada Kelompok Kontrol tetap Tidak Miskin, namun peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan lebih banyak terjadi di Kelompok Aksi dengan selisih sebesar 12,58 %. Dengan demikian kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan berdampak positif terhadap rata-rata konsumsi perkapita perbulan pada rumah tangga yang mempunyai usaha produktif Bengkel dengan dampak sebesar 12,58%.

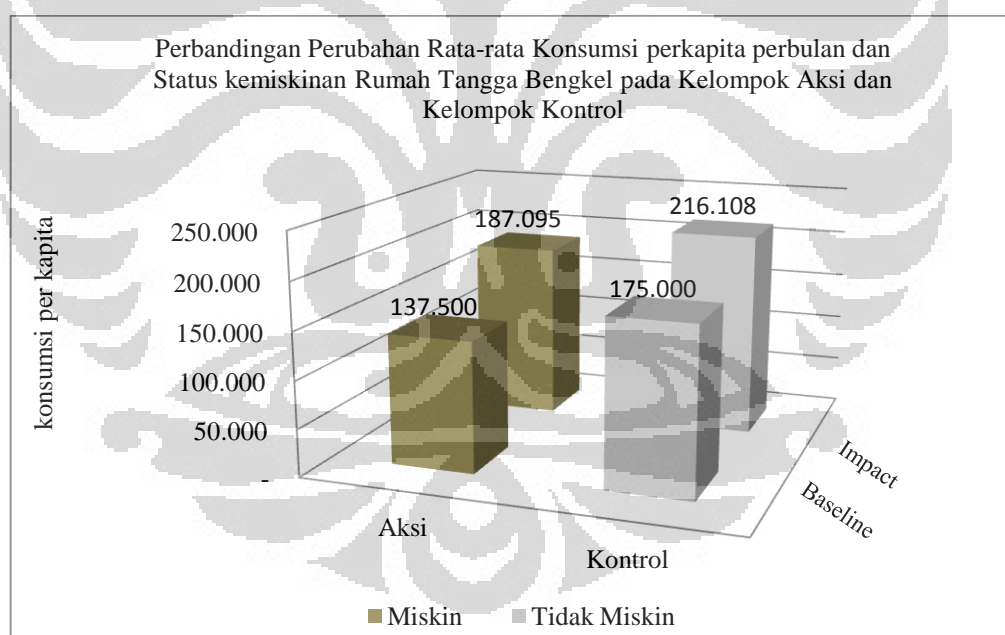
**Universitas Indonesia**

dari segi penurunan kemiskinan, kegiatan Pinjaman Bergulir PNPB Mandiri Perkotaan tidak berdampak pada rumah tangga Bengkel, dalam arti tidak ada penurunan kemiskinan, bahkan bila dibandingkan dengan Kelompok Kontrol selisih penurunan tingkat kemiskinan sebesar **-50%**. Artinya penurunan kemiskinan rumah tangga Bengkel pada Kelompok Aksi lebih kecil 50% daripada Kelompok Kontrol.

Tabel 4.16 Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga Bengkel pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Status	Kelompok Aksi			Kelompok Kontrol		
	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)
Miskin	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	(50,00)
Tidak Miskin	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	50,00

Sumber: Data primer. Telah diolah.



Gambar 4.30 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Bengkel pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

## 2. Buruh Bangunan

Responden dengan profesi sebagai buruh Bangunan pada Kelompok Aksi ada satu rumah tangga, begitu pula pada Kelompok Kontrol. Pada kondisi *baseline* status

kemiskinan kedua rumah tangga ini berbeda. Rumah tangga pada Kelompok Aksi Miskin, pada Kelompok Kontrol Tidak Miskin. Setelah intervensi program, status kemiskinan pada keduanya tidak berubah. Sulitnya rumah tangga penerima manfaat dengan profesi sebagai Buruh Bangunan untuk lepas dari kemiskinan antara lain disebabkan oleh:

a. Parahnya kemiskinan pada saat *baseline*

Secara rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga Buruh Bangunan pada Kelompok Aksi sangat rendah yaitu Rp.80.000,-.

b. Tidak menggunakan Dana Bergulir yang diterimanya untuk memulai usaha produktif melainkan untuk konsumsi.

c. Sedikitnya Dana Bergulir yang diterima.

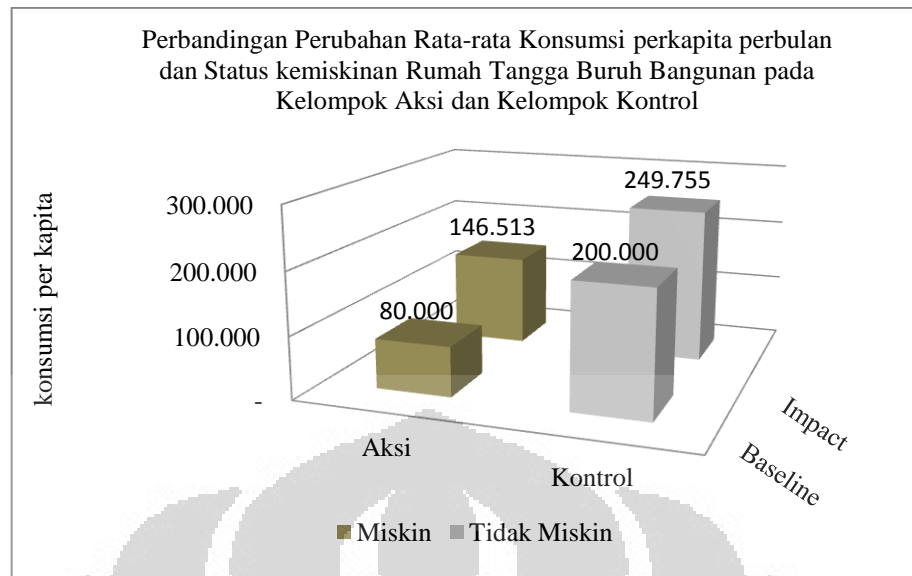
Rumah tangga ini juga mendapat Dana Bergulir yang relatif sedikit yaitu Rp.1000.000,- dalam dua kali perguliran.

Apabila dilihat dari konsumsi, keduanya mengalami peningkatan konsumsi perkapita perbulan, pada Kelompok Aksi sebesar 83,14% dan pada Kelompok Kontrol 24,88 %. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan berdampak positif terhadap peningkatan konsumsi pada rumah tangga Buruh Bangunan penerima manfaat, dengan besaran dampak **58,26%**. Artinya rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga Buruh Bangunan penerima manfaat lebih besar 58,26% daripada rumah tangga Buruh Bangunan yang tidak menerima manfaat Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan.

Tabel 4.17 Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga Buruh Bangunan pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Status	Kelompok Aksi			Kelompok Kontrol		
	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)
Miskin	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tidak Miskin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Data primer. Telah diolah.



Gambar 4.31 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Buruh Bangunan pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

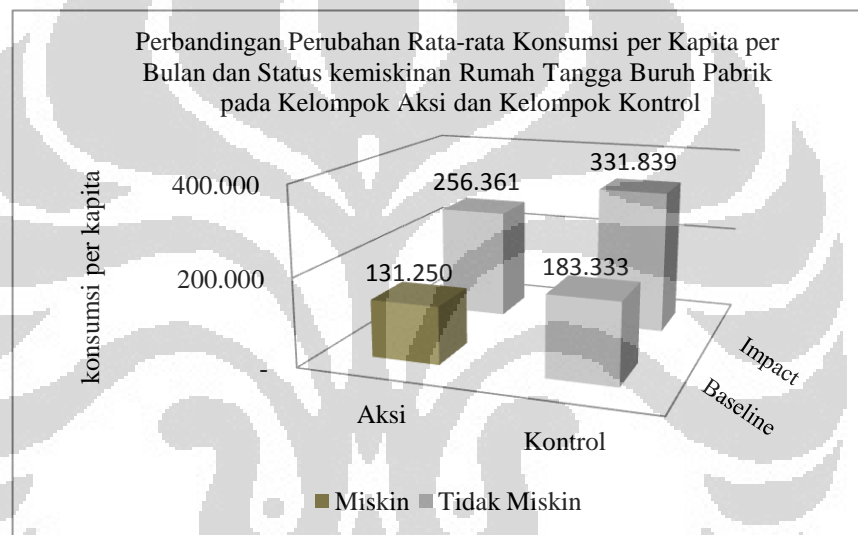
### 3. Buruh Pabrik

Responden rumah tangga Buruh Pabrik pada Kelompok Aksi sama dengan pada Kelompok Kontrol yaitu 2 rumah tangga. Secara rata-rata status kemiskinan sebelum intervensi program pada kedua kelompok tersebut berbeda. Pada Kelompok Aksi berstatus Miskin, sedangkan pada Kelompok Kontrol Tidak Miskin. Namun apabila dilihat per rumah tangga, dalam kedua kelompok aksi dan kontrol terdapat 1 rumah tangga berstatus Miskin, yang setelah adanya intervensi program berubah status menjadi Tidak Miskin. Sehingga baik pada Kelompok Aksi maupun Kelompok Kontrol terjadi penurunan kemiskinan sebesar 50%. Apabila dilihat dari konsumsi, maka peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan pada Kelompok Aksi lebih besar 14,32 % dari Kelompok Kontrol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan berdampak positif terhadap rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga Buruh Pabrik dengan besar dampak **14,32%**.

Tabel 4.18 Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga Buruh Pabrik pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Status	Kelompok Aksi			Kelompok Kontrol		
	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)
Miskin	50,00	0,00	(50,00)	50,00	0,00	(50,00)
Tidak Miskin	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00

Sumber: Data primer. Telah diolah.



Gambar 4.32 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Buruh Pabrik pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

#### 4. Buruh Tani

Rumah tangga dengan profesi Buruh Tani pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol dalam status Miskin sebelum adanya intervensi program. Setelah adanya intervensi, rumah tangga pada Kelompok Aksi secara rata-rata beralih status menjadi Tidak Miskin dengan rata-rata konsumsi perkapita perbulan sebesar Rp.225.966,-. Dari 22 responden Buruh tani, tingkat kemiskinan pada saat *baseline* adalah 81,82%. Setelah intervensi program tingkat kemiskinan turun menjadi 52,94% atau turun sebesar 36,36%. Sedangkan pada Kelompok Kontrol secara rata-rata masih tetap Miskin dengan konsumsi perkapita perbulan sebesar

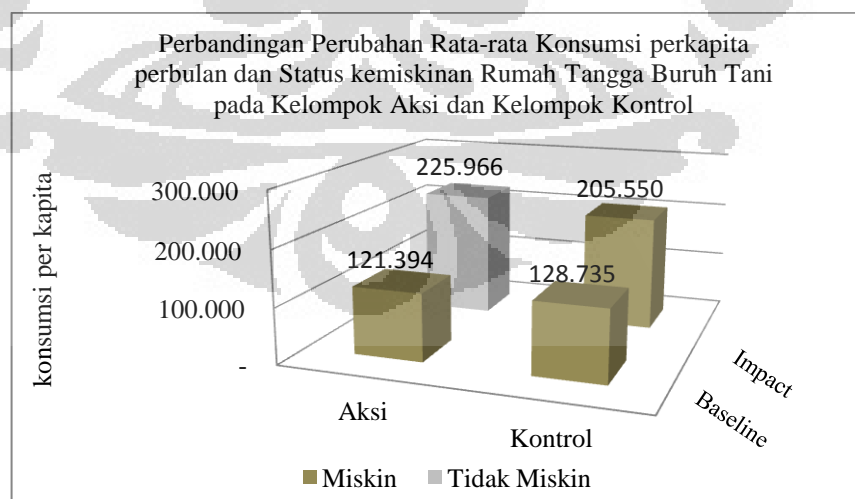
Universitas Indonesia

Rp.205.550,- Jumlah responden rumah tangga Buruh Tani pada Kelompok Kontrol adalah 62 responden. Tingkat kemiskinan pada saat *baseline* adalah 83,87% dan tingkat saat *impact* sebesar 67,74% atau terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 16,13%. Rata-rata konsumsi perkapita perbulan pada Kelompok Aksi lebih besar 26,47 % dibandingkan pada Kelompok Kontrol. Sehingga kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan menghasilkan dampak positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan pada rumah tangga penerima manfaat, dengan besar dampak **20,23%** dan meningkatkan rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga penerima manfaat lebih besar **26,47%** dibandingkan rumah tangga yang tidak menerima manfaat.

Tabel 4.19 Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga Buruh Tani pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Status	Kelompok Aksi			Kelompok Kontrol		
	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)
Miskin	81,82	45,45	(36,36)	83,87	67,74	(16,13)
Tidak Miskin	18,18	54,55	36,36	16,33	32,26	16,13

Sumber: Data primer. Telah diolah.



Gambar 4.33 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Buruh Tani pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

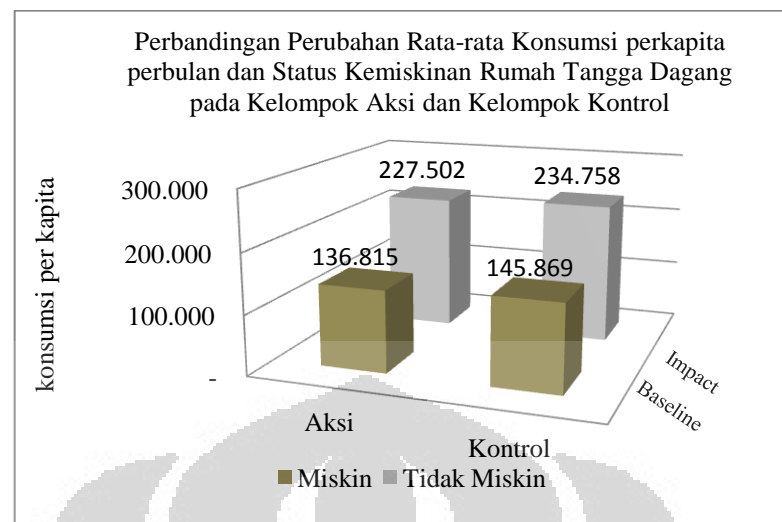
## 5. Dagang

Baik pada Kelompok Aksi maupun Kelompok Kontrol rumah tangga dengan profesi sebagai pedagang berstatus Miskin sebelum intervensi program. Pada Kelompok Aksi sampel rumah tangga dagang sebanyak 68 responden, sedangkan pada Kelompok Kontrol 29 responden. Setelah intervensi secara rata-rata kedua kelompok ini mengalami peningkatan konsumsi perkapita perbulan hingga di atas Garis Kemiskinan Jawa Tengah tahun 2011, sehingga status kemiskinannya berubah menjadi Tidak Miskin. Namun besar penurunan kemiskinan pada 2 kelompok ini berbeda. Kelompok Aksi mengalami penurunan sebesar 14,71% sedangkan Kelompok Kontrol mengalami penurunan lebih besar yaitu 20,69%. Sehingga terhadap penurunan kemiskinan, Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan berdampak bagi penurunan kemiskinan rumah tangga pedagang penerima manfaat, artinya jumlah rumah tangga miskin dengan profesi sebagai pedagang menurun bila dibandingkan sebelum intervensi program, namun besar dampaknya adalah **-5,98%**, artinya bahwa penurunan kemiskinan rumah tangga dagang pada Kelompok Aksi lebih kecil 5,98% daripada penurunan kemiskinan rumah tangga dagang pada Kelompok Kontrol. Namun demikian apabila dilihat dari perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan, peningkatan yang terjadi pada Kelompok Aksi lebih besar 5,2% dibandingkan Kelompok Kontrol. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan berdampak positif terhadap peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan rumah tangga dagang penerima manfaat, dengan besar dampak **5,3%**.

Tabel 4.20 Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga Dagang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Status	Kelompok Aksi			Kelompok Kontrol		
	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)
Miskin	76,47	61,67	(14,71)	62,07	41,38	(20,69)
Tidak Miskin	23,53	38,33	14,71	37,93	58,62	20,69

Sumber: Data primer. Telah diolah.



Gambar 4.34 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Dagang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

#### 6. Penjahit

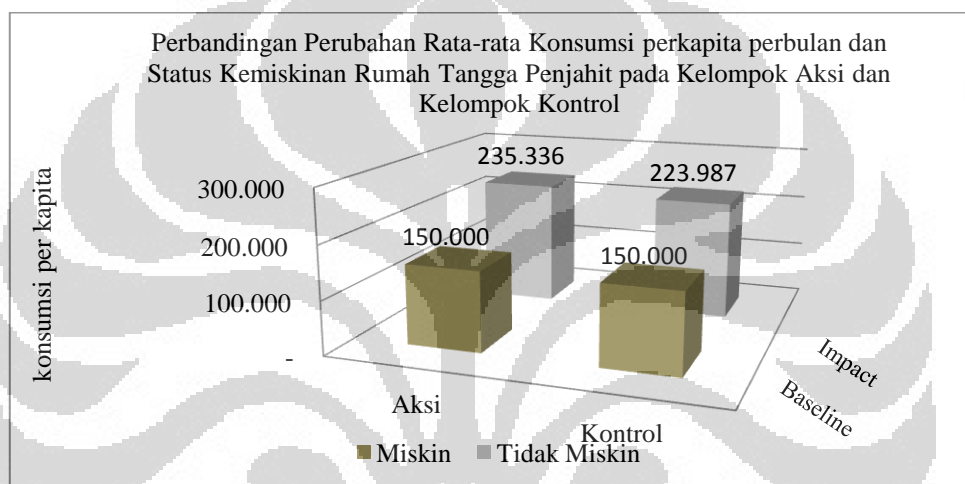
Responden rumah tangga dengan profesi sebagai Penjahit pada Kelompok Aksi ada 2 rumah tangga, sedangkan Kelompok Kontrol hanya ada 1 rumah tangga. Rumah tangga dengan profesi sebagai penjahit pada tahun 2007 secara rata-rata berstatus Miskin baik pada Kelompok Aksi maupun Kelompok Kontrol dengan besar rata-rata konsumsi perkapita perbulan sama yaitu Rp.150.000,-. Setelah intervensi program keduanya mengalami peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan hingga berada di atas Garis Kemiskinan. Namun peningkatan pada Kelompok Aksi lebih besar 7,57 % dibandingkan Kelompok Kontrol. Sehingga kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan berdampak positif terhadap peningkatan konsumsi pada rumah tangga Penjahit penerima manfaat sebesar **7,57%**. Tetapi apabila dilihat dari tingkat kemiskinan, Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan berdampak menurunkan kemiskinan pada rumah tangga Penjahit penerima manfaat dengan besar dampak **-0,50%**. Artinya penurunan kemiskinan rumah tangga Penjahit pada Kelompok Aksi lebih kecil 50% daripada pada Kelompok Kontrol.



Tabel 4.21 Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga Penjahit pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Status	Kelompok Aksi			Kelompok Kontrol		
	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)
Miskin	50,00	0,00	(50,00)	100,00	0,00	(100,00)
Tidak Miskin	50,00	100,00	50,00	0,00	100,00	100,00

Sumber: Data primer. Telah diolah.



Gambar 4.35 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Penjahit pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

#### 7. Tukang Batu

Responden rumah tangga yang berprofesi sebagai Tukang Batu pada Kelompok Aksi ada 4 rumah tangga dan Kelompok Kontrol 5 rumah tangga. Sebelum intervensi program, baik pada Kelompok Aksi maupun Kelompok Kontrol secara rata-rata berstatus Miskin. Setelah intervensi program, tingkat kemiskinan rumah tangga Tukang Batu pada Kelompok Aksi justru meningkat 50%, sementara pada Kelompok Aksi turun 20%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan berdampak negatif terhadap kemiskinan rumah tangga Tukang Batu penerima manfaat, dengan besar dampak -70%. Artinya tingkat kemiskinan pada Kelompok Aksi naik lebih tinggi 70% dibandingkan Kelompok Kontrol. Meskipun terjadi peningkatan rata-rata

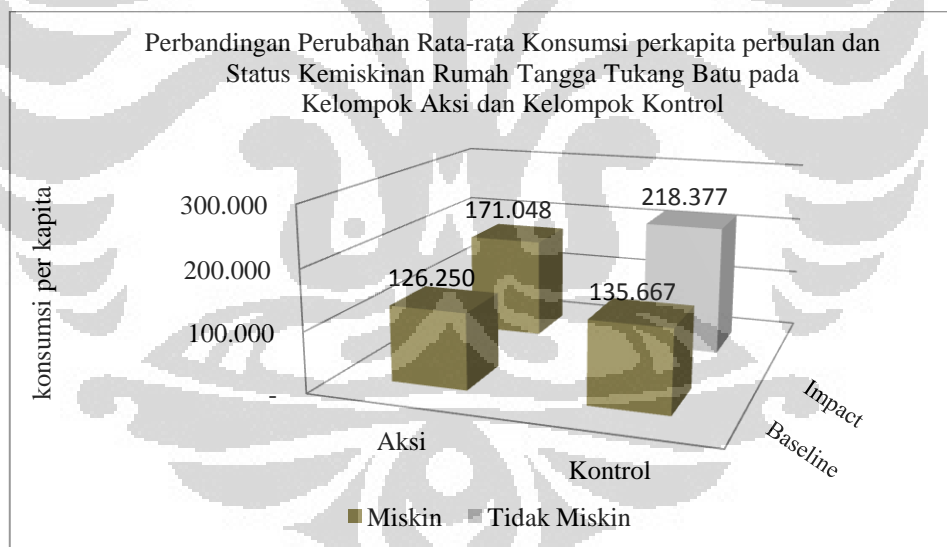
Universitas Indonesia

konsumsi perkapita perbulan rumah tangga Tukang Batu pada Kelompok Aksi namun peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan pada Kelompok Kontrol lebih tinggi 25,49%. Sehingga disimpulkan bahwa kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan tidak berdampak positif terhadap peningkatan konsumsi pada rumah tangga Tukang Batu.

Tabel 4.22 Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga Tukang Batu pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Status	Kelompok Aksi			Kelompok Kontrol		
	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)
Miskin	50,00	100,00	50,00	80,00	60,00	(20,00)
Tidak Miskin	50,00	0,00	(50,00)	20,00	40,00	20,00

Sumber: Data primer. Telah diolah.



Gambar 4.36 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Tukang Batu pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

#### 4.4.4. Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol memiliki kesamaan dalam hal jumlah tanggungan keluarga sebanyak 2,3,4,5 dan 6 orang. Perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan pada kedua kelompok aksi dan kontrol berdasarkan jumlah tanggungan keluarga adalah:

Tabel 4.23 Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Jml Tangg.	Kelompok Aksi					Kelompok Kontrol				
	Baseline		Impact		Per. (%)	Baseline		Impact		Per. (%)
	Rata-rata Kons.	Status	Rata-rata Kons.	Status		Rata-rata Kons.	Status	Rata-rata Kons.	Status	
2	216.667	TM	411.950	TM	90,13	219.000	TM	293.526	TM	34,03
3	167.667	TM	269.881	TM	60,96	156.897	TM	246.368	TM	57,03
4	132.066	M	222.392	TM	68,39	134.357	M	223.036	TM	66,00
5	110.071	M	190.512	M	73,08	102.483	M	175.342	M	71,09
6	84.375	M	182.324	M	116,09	89.286	M	168.477	M	88,69

Sumber: Data primer. Telah diolah.

Dari tabel di atas rumah tangga dengan jumlah tanggungan 5 dan 6 baik pada Kelompok Aksi maupun Kelompok Kontrol tetap berada dalam status Miskin di tahun 2011, namun peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan lebih besar terjadi pada Kelompok Aksi. Rumah tangga dengan jumlah tanggungan sebanyak 4 orang berada dalam status Miskin pada tahun 2007 baik Kelompok Aksi maupun Kelompok Kontrol, dengan peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan sedikit lebih besar pada Kelompok Aksi. Rumah tangga dengan jumlah tanggungan 2 dan 3 orang, baik pada Kelompok Aksi maupun Kelompok Kontrol tetap berada pada status Tidak Miskin pada tahun 2011 dengan peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan lebih besar pada Kelompok Aksi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa makin banyak jumlah tanggungan baik pada Kelompok Aksi maupun Kelompok Kontrol semakin menyulitkan rumah tangga miskin beranjak dari kemiskinan dan semakin banyak jumlah tanggungan makin kecil konsumsi perkapita

perbulan. Untuk melihat perbedaan perubahan rata-rata konsumsi perkapita perbulan dan status kemiskinan pada rumah tangga aksi dan kontrol yang mempunyai jumlah tanggungan sama, disajikan gambar sebagai berikut.

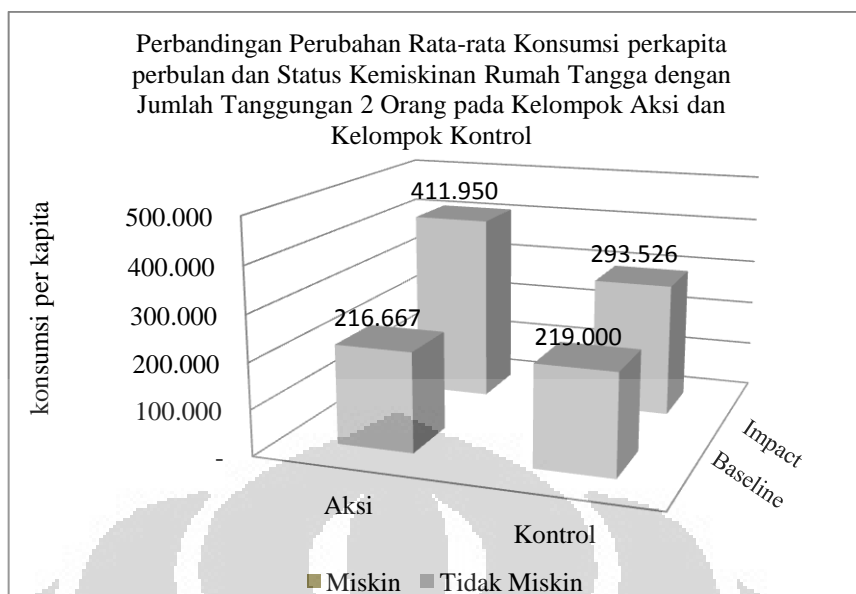
1. Rumah tangga dengan jumlah tanggungan 2 orang.

Pada Kelompok Aksi sampel untuk rumah tangga ini berjumlah 3 responden dan pada Kelompok Kontrol 5 responden. Secara rata-rata status kemiskinan pada kedua kelompok tersebut adalah Tidak Miskin pada *baseline* dan setelah intervensi program, tidak mengalami perubahan status kemiskinan. Namun apabila dilihat status kemiskinan pada masing-masing rumah tangga, pada Kelompok Aksi terdapat 1 rumah tangga dengan jumlah tanggungan 2 orang yang berstatus Miskin. Setelah mendapat intervensi program, rumah tangga ini menjadi Tidak Miskin. Hal ini berarti kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan rumah tangga penerima manfaat dengan jumlah tanggungan 2 orang. Apabila dilihat dari rata-rata konsumsi perkapita perbulan maka rumah tangga dengan jumlah tanggungan 2 orang pada Kelompok Aksi mengalami peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan lebih besar 50,61% dibandingkan Kelompok Kontrol. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan pada rumah tangga penerima manfaat dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang membawa dampak positif bagi peningkatan konsumsi sebesar **50,61%**.

Tabel 4.24 Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga dengan Jumlah Tanggungan 2 Orang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Status	Kelompok Aksi			Kelompok Kontrol		
	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)
Miskin	33,33	0,00	(33,33)	00,00	00,00	00,00
Tidak Miskin	66,67	100,00	33,33	100,00	100,00	00,00

Sumber: Data primer. Telah diolah.



Gambar 4.37 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga dengan Jumlah Tanggungan 2 Orang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

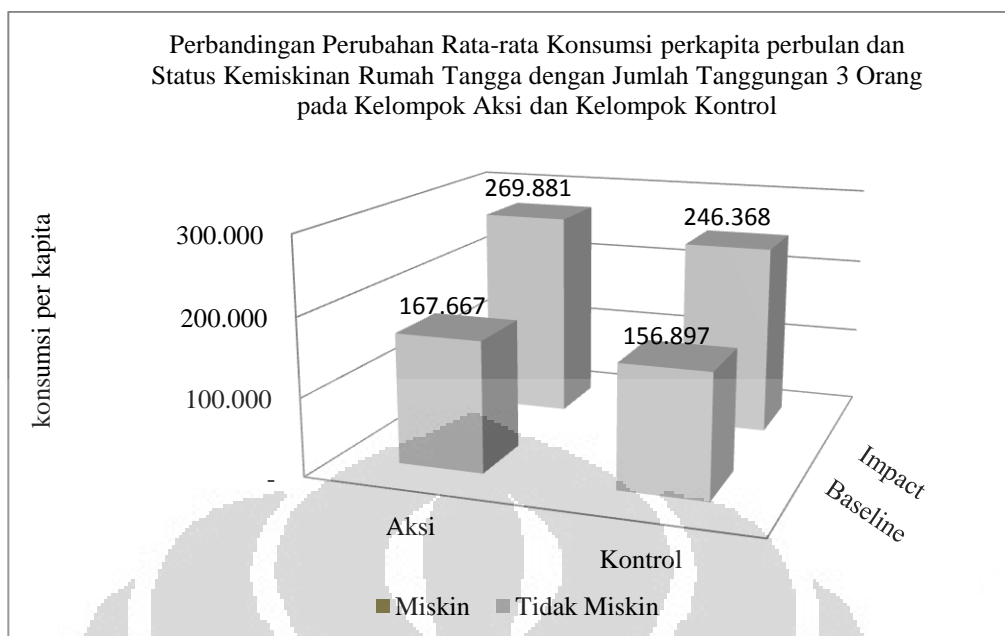
2. Rumah tangga dengan jumlah tanggungan 3 orang.

Sampel rumah tangga dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang pada Kelompok Aksi ada 20 responden, sedangkan pada Kelompok Kontrol 29 responden. Dari segi konsumsi, peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan **3,93%** lebih besar terjadi pada Kelompok Aksi dibandingkan dengan Kelompok Kontrol. Begitupun dengan penurunan kemiskinan. Secara rata-rata penurunan kemiskinan pada Kelompok Aksi lebih besar **14,66%** dibandingkan dengan Kelompok Kontrol.

Tabel 4.25 Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga dengan Jumlah Tanggungan 3 orang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Status	Kelompok Aksi			Kelompok Kontrol		
	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)
Miskin	45,00	20,00	(25,00)	48,28	37,93	(10,34)
Tidak Miskin	55,00	80,00	25,00	51,72	62,07	10,34

Sumber: Data primer. Telah diolah.



Gambar 4.38 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga dengan Jumlah Tanggungan 3 Orang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

3. Rumah tangga dengan jumlah tanggungan 4 orang.

Terdapat 49 responden rumah tangga dengan jumlah tanggungan 4 orang pada Kelompok Aksi dan 35 responden pada Kelompok Kontrol. Perubahan status kemiskinan pada kedua kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

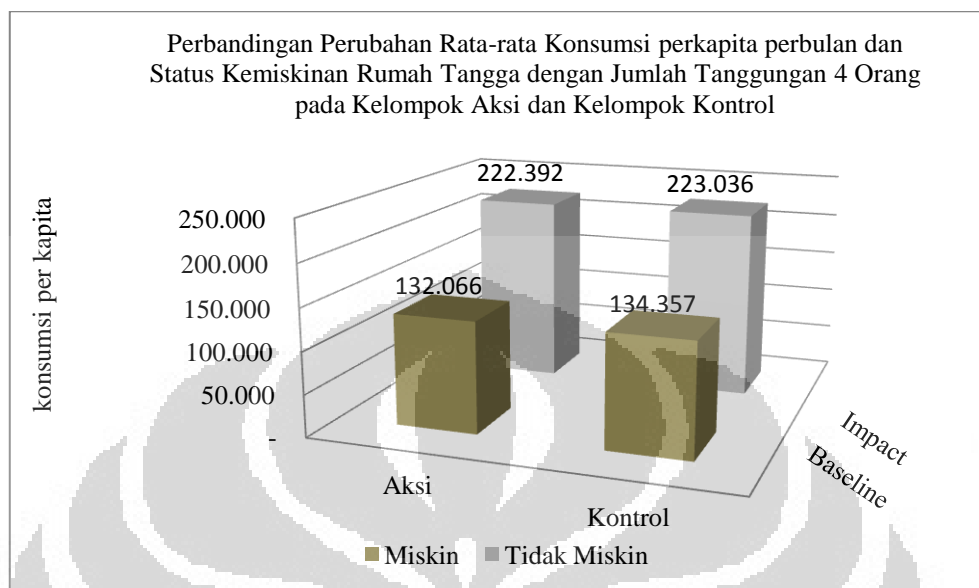
Tabel 4.26 Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga dengan Jumlah Tanggungan 4 orang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Status	Kelompok Aksi			Kelompok Kontrol		
	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)
Miskin	79,59	51,02	(28,57)	85,71	48,57	(37,14)
Tidak Miskin	20,41	48,98	28,57	14,29	51,43	37,14

Sumber: Data primer. Telah diolah.

Rumah tangga dengan jumlah tanggungan 4 orang pada kedua kelompok aksi dan kontrol sama-sama mengalami penurunan tingkat kemiskinan, namun penurunan pada Kelompok Kontrol lebih besar 8,57%. Apabila dilihat dari konsumsi rumah

tangga pada Kelompok Aksi mengalami peningkatan rata-rata konsumsi perkapita perbulan lebih besar 2,39% dibandingkan pada Kelompok Kontrol.



Gambar 4.39 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga dengan Jumlah Tanggungan 4 Orang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

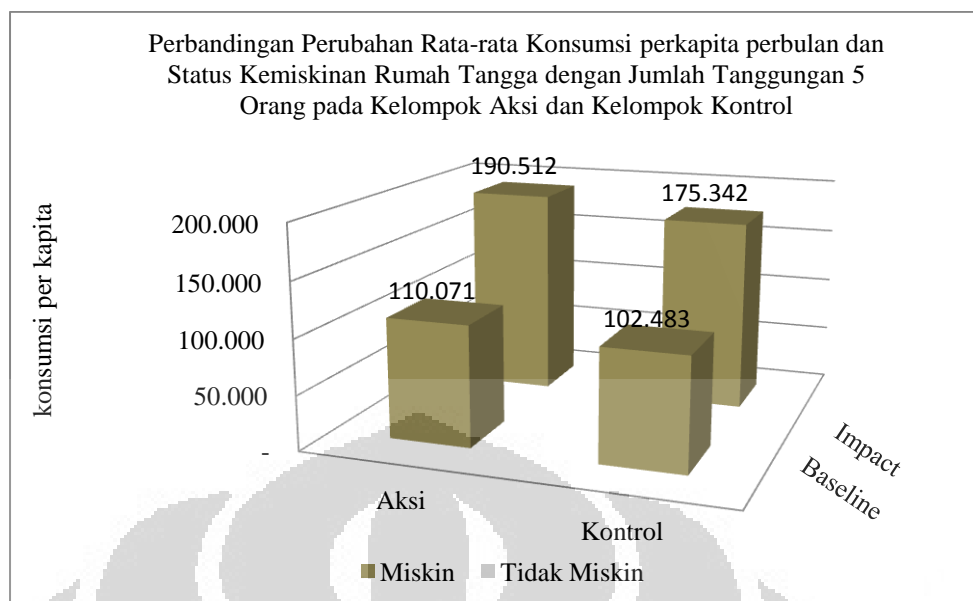
4. Rumah tangga dengan jumlah tanggungan 5 orang.

Responden rumah tangga dengan jumlah tanggungan 5 orang pada Kelompok Aksi sejumlah 28 dan pada Kelompok Kontrol sejumlah 29 rumah tangga. Secara rata-rata status kemiskinan kedua kelompok aksi dan kontrol pada saat baseline adalah Miskin, dan setelah adanya intervensi program tetap miskin. Namun bukan berarti tidak terjadi penurunan kemiskinan sama sekali pada kedua kelompok tersebut. Pada Kelompok Aksi penurunan tingkat kemiskinan lebih kecil 6,16% dibandingkan Kelompok Kontrol.

Tabel 4.27 Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga dengan Jumlah Tanggungan 5 orang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Status	Kelompok Aksi			Kelompok Kontrol		
	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)
Miskin	92,86	71,43	(21,43)	100,00	72,41	(27,59)
Tidak Miskin	7,14	28,57	21,43	0,00	27,59	27,59

Sumber: Data primer. Telah diolah.



Gambar 4.40 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga dengan Jumlah Tanggungan 5 Orang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

#### 5. Rumah tangga dengan jumlah tanggungan 6 orang

Responden dengan jumlah tanggungan 6 orang pada Kelompok Aksi sejumlah 8 rumah tangga dan pada Kelompok Kontrol 7 rumah tangga. Secara rata-rata status kemiskinan kedua kelompok tersebut baik pada saat *baseline* maupun *impact* adalah Miskin. Namun pada keduanya terjadi perubahan jumlah rumah tangga miskin sebagai berikut:

Tabel 4.28 Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga dengan Jumlah Tanggungan 6 orang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

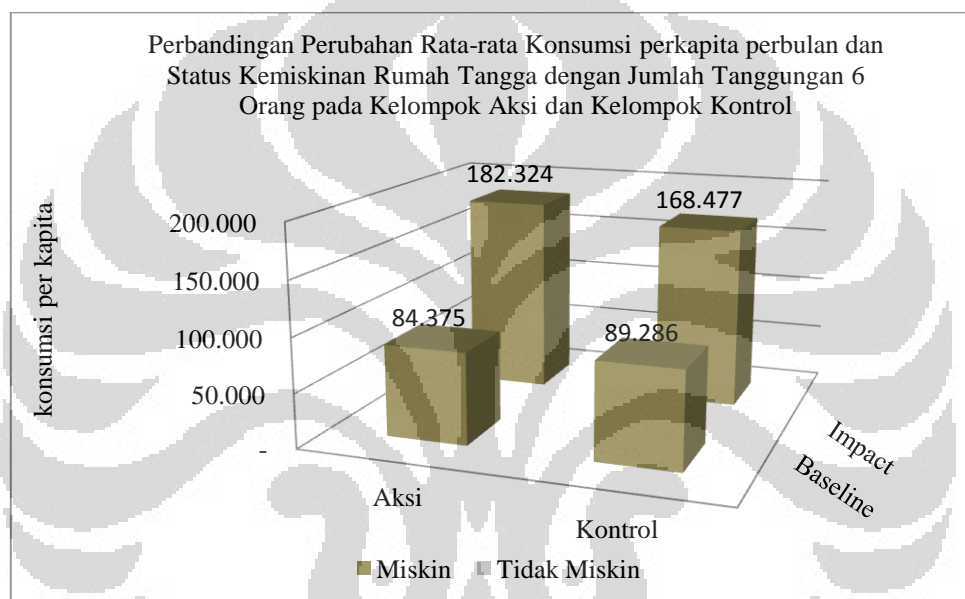
Status	Kelompok Aksi			Kelompok Kontrol		
	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)	Baseline (%)	Impact (%)	Selisih (%)
Miskin	100,00	75,00	(25,00)	100,00	100,00	0,00
Tidak Miskin	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Data primer. Telah diolah.

Setelah intervensi program, tingkat kemiskinan pada Kelompok Aksi turun sebanyak 25% dan Kelompok Kontrol 0%. Hal ini berarti kegiatan Pinjaman



Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan memberikan dampak positif bagi penurunan kemiskinan rumah tangga dengan jumlah tanggungan 6 orang pada kelompok aksi dengan besar dampak **25%**. Dilihat dari konsumsi, rumah tangga pada Kelompok Aksi mengalami peningkatan 27,4% lebih besar dari Kelompok Kontrol, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan memberikan dampak positif bagi peningkatan konsumsi rumah tangga penerima manfaat dengan jumlah tanggungan 6 orang, dengan besar dampak **27,4%**.



Gambar 4.41 Perbandingan Perubahan Rata-rata Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Rumah Tangga dengan Jumlah Tanggungan 6 Orang pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

#### 4.5. Perhitungan FGT Index

FGT index merupakan alat untuk mengukur kemiskinan yang lebih lengkap karena tidak hanya menghitung jumlah penduduk miskin namun juga jarak tingkat konsumsi mereka terhadap garis kemiskinan juga distribusi pengeluaran (konsumsi) diantara penduduk miskin. Hasil penghitungan FGT Indeks terhadap Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol sebelum dan setelah intervensi program adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29 FGT Index pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

	Kelompok Aksi			Kelompok Kontrol		
	Baseline	Impact Nominal	Impact Riil (2007)	Baseline	Impact Nominal	Impact Riil (2007)
P0	0,77273	0,51818	0,36364	0,76364	0,54545	0,41818
P1	0,20828	0,08470	0,04386	0,20515	0,11055	0,06765
P2	0,05614	0,01385	0,00529	0,05511	0,02220	0,01094

Sumber: Data primer. Telah diolah.

Berdasarkan penghitungan FGT index antara Kelompok Aksi dan Kontrol, maka:

1. P0 atau *head count index* atau proporsi penduduk yang konsumsinya di bawah garis kemiskinan seperti sudah diungkapkan di atas pada kelompok aksi lebih banyak secara nominal sebesar 3,6%, dan secara riil lebih banyak sebesar 6,4%.
2. P1 atau *poverty gap index* yaitu jarak antara rata-rata konsumsi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan baik pada kelompok aksi maupun kontrol sama-sama mengalami penurunan, namun secara nominal penurunan di kelompok aksi lebih banyak sebesar 2,9% artinya secara nominal rata-rata konsumsi per kapita membaik, semakin mendekati garis kemiskinan sebesar 2,9% dibandingkan pada kelompok kontrol. Sedangkan secara riil rata-rata konsumsi per kapita kelompok aksi semakin mendekati garis kemiskinan sebesar 2,7% dibanding kelompok kontrol.
3. P2 atau *poverty severity index* atau penyebaran konsumsi di antara penduduk miskin mengalami penurunan, pada kelompok aksi lebih besar penurunannya sebanyak 0,94% dibanding kelompok kontrol secara nominal, dan lebih besar 1,5% secara riil.

## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana diungkapkan pada Bab Pendahuluan serta hasil dari proses olah data, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan tujuan penelitian: Mengidentifikasi distribusi alokasi dana Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Dari total BLM PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Petarukan Rp.6.891.480.537, sebesar Rp.1.330.275.000 atau 19,30% dialokasikan untuk Pinjaman Bergulir.
  - b. Dari 20.176 rumah tangga miskin di Kecamatan Petarukan yang terdaftar dalam PS2, baru 2.920 rumah tangga miskin atau 14,47% yang mendapat alokasi Dana Bergulir 2007.
  - c. Sebanyak 77,27% sampel rumah tangga yang mendapat alokasi Dana Bergulir berstatus Miskin (menurut kriteria BPS) pada periode sebelum intervensi program (*baseline*).
  - d. Rumah tangga yang mendapat alokasi Dana Bergulir pada saat *baseline*, tidak semuanya telah menjalankan kegiatan usaha produktif contohnya Buruh Bangunan, Buruh Pabrik, Buruh Tani, Penjaga Makam, Sopir, Tukang Bantu
2. Berdasarkan tujuan penelitian: Mengidentifikasi efektivitas alokasi Dana Bergulir dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, diperoleh kesimpulan:
  - a. Dana Bergulir efektif dalam meningkatkan kegiatan ekonomi di 79% rumah tangga yang memanfaatkan Dana Bergulir untuk kegiatan usaha.
  - b. Dalam hubungannya dengan pengentasan kemiskinan, efektif bila:
    - 1) Perguliran  $\geq 2$  kali
    - 2) Dana Bergulir  $\geq$  Rp. 1.250.000

- 3) Jumlah tanggungan keluarga  $\leq 4$  orang
3. Berdasarkan tujuan penelitian: Menganalisa dampak kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan terhadap peningkatan angka pengeluaran (konsumsi) rumah tangga penerima manfaat, diperoleh kesimpulan:
  - a. Dampak Pinjaman Bergulir terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga penerima manfaat sebesar 8,21%.
  - b. Dampak Pinjaman Bergulir terhadap tingkat kemiskinan:
    - 1) Tingkat kemiskinan (P0) rumah tangga penerima manfaat turun sebesar 3,64%.
    - 2) Penurunan *poverty gap index* (P1) pada rumah tangga penerima manfaat program sebesar 2,9%.
    - 3) Ketimpangan konsumsi di antara penduduk miskin (P2) pada Kelompok Aksi berkurang lebih banyak 0,94% dibandingkan Kelompok Kontrol.

Rendahnya capaian indikator keberhasilan berupa peningkatan konsumsi sebesar 8,21% dan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 3,64% selama kurun waktu  $\pm 3,5$  tahun sejak Dana Bergulir dicairkan (tahun 2008), antara lain disebabkan oleh:

1. Sulitnya mengidentifikasi kriteria calon peminjam yaitu memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Dalam pelaksanaannya, kriteria ini sulit untuk dipenuhi karena tidak mudah untuk melihat seseorang memiliki motivasi untuk berusaha atau tidak. Persetujuan alokasi dana bergulir didasarkan pada proposal pengajuan pinjaman, jadi bisa saja dalam proposal seorang warga miskin mengatakan bahwa tujuan meminjam adalah untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang telah dijalankan, tapi dalam praktek pemanfaatan Dana Bergulir yang diterimanya tidak sesuai tujuan penggunaan dana dalam proposal. Hal ini tidak bisa dihindari, karena pemanfaatan dana sepenuhnya adalah hak peminjam, sedangkan UPK dan fasilitator hanya berkewajiban untuk mengarahkan. Dari 110 responden, sebanyak 23 responden atau 21% tidak menggunakan Dana Bergulir untuk kegiatan usaha, namun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

2. Lemahnya fungsi Pengawas UPK dan LKM sehingga kontrol terhadap UPK kurang. Pada dua desa yaitu Klareyan dan Loning penentuan warga miskin yang mendapat alokasi Pinjaman Bergulir tergantung pada subyektivitas UPK. Hubungan kekerabatan dan pertemanan lebih mendominasi daripada terpenuhinya kriteria dapat dipercaya dan dapat bekerjasama.
3. Rendahnya RR (*Repayment Rate*) sehingga frekuensi perguliran rendah dan Dana Bergulir yang diterima peminjam relatif sedikit. Antara lain disebabkan karena:
  - a. Kurangnya sosialisasi sebelum pelaksanaan program, sehingga banyak anggota KSM peminjam tidak memahami aturan yang berlaku;
  - b. Masih membekas kesan terhadap BLT sehingga *mindset* yang terbentuk Pinjaman Bergulir sama dengan dana hibah yang tidak perlu dikembalikan
  - c. Interaksi sosial menyebabkan perilaku buruk menunggak pinjaman menular dari satu individu ke individu lainnya, bahkan antar desa;
  - d. Sistem tanggung renteng yang tidak bisa berjalan dengan baik;
  - e. Tidak ada mekanisme *punishment* bagi desa/kel yang kinerja UPK-nya buruk;
  - f. Parahnya tingkat kemiskinan peminjam sehingga kesulitan untuk melunasi pinjaman
  - g. Kurangnya monitoring oleh Pemda mengakibatkan permasalahan Pinjaman Bergulir di suatu desa tidak segera tertangani. Tanggung jawab pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di bawah Sekretariat Bappeda Kabupaten Pematang, yang notabene tidak sesuai dengan tupoksinya, menyebabkan koordinasi dengan Korkab PNPM Mandiri Perkotaan menjadi terhambat dan monitoring lemah.

## 5.2. Saran

Dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut, beberapa saran dari penulis terhadap pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Petarukan adalah:

1. Perlunya peningkatan sosialisasi.

Sosialisasi tentang aturan pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan perlu ditingkatkan baik untuk tingkat LKM/UPK atau sosialisasi kepada anggota KSM peminjam, sehingga diperoleh kesamaan persepsi guna mendukung lancarnya kegiatan Pinjaman Bergulir. Sosialisasi terutama sangat diperlukan kepada LKM dan calon peminjam baru sehingga hal yang tidak diinginkan seperti tunggakan pinjaman dapat diminimalisir. Hal ini dilakukan mengingat siklus PNPM Mandiri Perkotaan tiga tahunan, dimana pada tahun ke-4 memasuki siklus baru dengan pergantian LKM, sehingga sosialisasi harus senantiasa dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan Pinjaman Bergulir.

2. Perlunya pembinaan pinjaman yang lebih intensif.

Kunjungan UPK setelah realisasi pinjaman ke rumah anggota KSM peminjam untuk memantau keadaan peminjam, perkembangan usaha dan penggunaan pinjaman apakah digunakan sesuai dengan tujuan semula, harus lebih ditingkatkan lagi. Dalam kunjungan tersebut UPK juga harus mengingatkan kembali kewajiban angsuran yang harus dilakukan dan bahwa Pinjaman Bergulir adalah hutang bukan hibah.

3. Perlunya peningkatan monitoring.

Bappeda Kabupaten Pematang Jaya sebagai penanggung jawab pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pematang Jaya perlu meningkatkan kegiatan monitoring untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dari pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir di lapangan dan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan. Untuk itu sebaiknya dilakukan pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dari Sekretariat Bappeda ke bidang dengan tupoksi sesuai yaitu Bidang Sosial Budaya, sehingga koordinasi dengan Korkab PNPM Mandiri Perkotaan menjadi lancar dan kegiatan monitoring dapat ditingkatkan.

4. Perlu penguatan peran LKM dan Pengawas dalam mengarahkan dan mengawasi UPK dalam mengelola Pinjaman Bergulir.

5. Perlunya diciptakan suatu mekanisme *punishment* bagi desa/kelurahan yang mempunyai kinerja UPK buruk, misal dengan penundaan pencairan BLM berikutnya selama jangka waktu tertentu sampai membaiknya kinerja UPK.

**Universitas Indonesia**

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2005). *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bappeda Kabupaten Pemalang. (2011). *Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016*. Pemalang.
- (2010). *Pengembangan Informasi Profil Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Semester II*. Pemalang.
- (2011) *Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2010*. Pemalang.
- (2011) *Kecamatan Petarukan Dalam Angka 2010*. Pemalang.
- (2011) *Kecamatan Ulujami Dalam Angka 2010*. Pemalang.
- Bappenas. *Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan dan Evaluasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan. Modul 4 Persyaratan dan Unsur-unsur Evaluasi yang Baik*. Oleh Asep Suharyadi. <http://ditpk.bappenas.go.id>
- BPS. *Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 1999 Pedoman Kerja Kepala Kantor Statistik Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya*.  
<http://www.rand.org/content/dam/rand/www/external/labor/bps/manualpdf/susenas/sn99pedomankerja.pdf>
- *Meta Data Subdit Statistik Kerawanan Sosial*.  
[http://www.bps.go.id/aboutus.php?id\\_subyek=23&tabel=1&fl=2](http://www.bps.go.id/aboutus.php?id_subyek=23&tabel=1&fl=2)
- *Berita Resmi Statistik No.45/07/Th.XIV, 1 Juli 2011. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2011*.  
[http://www.bps.go.id/brs\\_file/kemiskinan-01jul11.pdf](http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01jul11.pdf)
- *Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Bulanan Indonesia 2005-2011*.  
[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=03&notab=5](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=03&notab=5)
- BPS Propinsi Jawa Tengah. *Berita Resmi Statistik Propinsi Jawa Tengah No.5/08/33/Th.I/ 1 Agustus 2007. Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2007*.  
[http://jateng.bps.go.id/offrel/brs\\_kemiskinan\\_0708\\_33.pdf](http://jateng.bps.go.id/offrel/brs_kemiskinan_0708_33.pdf)
- *Berita Resmi Statistik Propinsi Jawa Tengah No.37/07/33/Th.V/ 1 Juli 2011. Profil Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2011*.  
[http://jateng.bps.go.id/offrel/brs\\_kemiskinan\\_1103\\_33.pdf](http://jateng.bps.go.id/offrel/brs_kemiskinan_1103_33.pdf)
- Damanhuri, Didin S. (2010) *Ekonomi Politik dan Pembangunan*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Tentang P2KP. <http://www.pnpm-perkotaan.org/aboutdetil.asp?mid=1&catid=5&>

Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. (2010). *Pedoman Pelaksanaan PNPMM Mandiri Perkotaan*. Jakarta.

----- *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPMM Mandiri Perkotaan*.

----- *Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPMM Mandiri Perkotaan*.

Harsono, A. Marliati. *Kemiskinan Perkotaan: Penyebab dan Upaya Penanggulangannya*. Bogor: IPB, 2005.

Mafruhah, Izza. (2009). *Multidimensi Kemiskinan*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press

Maksum, Choiril. (2004, 4-6 October) "Official Poverty Measurement in Indonesia", makalah dipresentasikan pada: *2004 International Conference On Official Poverty Statistics, Philippines*.  
[http://www.nscb.gov.ph/poverty/conference/papers/2\\_indonesia.pdf](http://www.nscb.gov.ph/poverty/conference/papers/2_indonesia.pdf)

Sevilla, Consuelo G. (1993). *Pengantar Metode Penelitian* (Alimuddin Tuwu, Penerjemah). Jakarta: UI-Press

Singarimbun, dan Sofian Effendi. (1989). *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

Sudjana. (1996). *Metoda Statistika*. Edisi ke-6. Bandung: Penerbit Tarsito.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Todaro, Michael P., & Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke-9. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Universitas Indonesia. (2009). *Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahap 2 (P2KP-2) di Jawa Barat terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat*. Oleh Radiana Mahaga. <http://www.lontar.ui.ac.id>

Worldbank. (1999, January). *Impact Evaluation: A Note on Concepts and Methods*. By Kene Ezemenari, Anders Rudqvist, K.subbarao.  
[http://ciat-library.ciat.cgiar.org/paper\\_pobreza/082.pdf](http://ciat-library.ciat.cgiar.org/paper_pobreza/082.pdf)



Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Survey Dampak Pinjaman Bergulir  
PNPM Mandiri Perkotaan terhadap Tingkat Konsumsi

**DAFTAR PERTANYAAN**

Tanggal wawancara : \_\_\_\_\_

Jam : \_\_\_\_\_

Pewawancara : \_\_\_\_\_

**IDENTIFIKASI RESPONDEN**

Kecamatan : \_\_\_\_\_

Desa / Kelurahan : \_\_\_\_\_

Nama : \_\_\_\_\_

Umur : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Pendidikan Terakhir: 1. Tidak Tamat SD 2. SD. 3. SMP 4. SMA. 5. S1

Jumlah Tanggungan Keluarga : \_\_\_\_\_  
(Termasuk dirinya sendiri)

Pendapatan/Pengeluaran *Baseline*: \_\_\_\_\_  
(Data PS2)

Penggunaan Dana Bergulir : 1. Konsumtif 2. Usaha/produktif

<b>PENGELUARAN RUMAH TANGGA</b>	
<b>A. Pengeluaran untuk makanan selama seminggu yang lalu</b>	<b>Rp.</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
1. <b>Padi-padian</b> (beras, jagung, terigu,, tepung beras, tepung jagung, dll)	
2. <b>Umbi-umbian</b> (ketela pohon, ketela rambat, kentang, gapek, talas, sagu, dll)	
3. <b>Ikan</b> (ikan segar, ikan diawetkan/asin, udang, dll)	
4. <b>Daging</b> (dagingsapi/kambing/kerbau/domba/babi/ayam, jeroan, ati, limpa, abon, dendeng, dll)	

<b>PENGELUARAN RUMAH TANGGA</b>	
<b>A. Pengeluaran untuk makanan selama seminggu yang lalu</b>	<b>Rp.</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
5. <b>Telur dan susu</b> (telur ayam/itik/puyuh, susu segar, susu kental, susu bubuk, dll)	
6. <b>Sayur-sayuran</b> (bayam, kangkung, ketimun, wortel, kacang panjang, buncis, bawang, cabe, tomat, dll)	
7. <b>Kacang-kacangan</b> (kacang tanah/hijau/kedele/merah/tunggak, mete, tahu, tempe, tauco, oncom, dll)	
8. <b>Buah-buahan</b> (jeruk, mangga, apel, durian, rambuta, salak, duku, nanas, semangka, pisang, pepaya, dll)	
9. <b>Minyak dan lemak</b> (minyak kelapa/goreng, kelapa, mentega, dll)	
10. <b>Bahan minuman</b> (gula pasir, gula merah, teh, kopi, coklat, sirup, dll)	
11. <b>Bumbu-bumbuan</b> (garam, kemiri, ketumbar, merica, terasi, kecap, dll)	
12. <b>Konsumsi lanilla</b> (kerupuk, eming, mie, bihun, makaroni, dll)	
13. <b>Makanan dan minuman jadi</b> (roti, biskuit, kue basah, bubur, bakso, es sirup, limun, gado-gado, nasi rames, dll)	
14. <b>Minuman mengandung alkohol</b> (bir, anggur, dan minuman keras lainnya)	
15. <b>Tembakau dan sirih</b> (rokok kretek, rokok putih, cerutu, tembakau, sirih, pinang, dll)	
16. <b>Jumlah Makanan</b> ( Rincian 1 sd 15)	

A. Pengeluaran bukan makanan	Sebulan yang lalu	12 Bulan yang lalu
(1)	(2)	(3)
<b>17. Perumahan dan fasilitas rumah tangga</b> (sewa, perkiraan sewa rumah sendiri, rekening listrik, rekening telepon, gas, minyak tanah, air, kayu)		
<b>18. Aneka barang dan jasa</b> (sabun mandi, kecantikan, pengangkutan, bacaan, pembuatan KTP/SIM, rekreasi, kartu telepon/pulsa, benda pos dll)		
<b>19. Biaya pendidikan</b> (uang pangkal/daftar ulang, SPP, pramuka, prakarya, dll)		
<b>20. Biaya kesehatan</b> (rumah sakit, puskesmas, dokter praktek, dukun, obat-obatan, dll)		
<b>21. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala</b> (bahan pakaian, pakaian jadi, sepatu, topi, sabun cuci, dll)		
<b>22. Barang tahan lama</b> (alat rumah tangga, perkakas, alat dapur, alat hiburan, alat olah raga, perhiasan mahal/imitasi, kendaraan, payung, arloji, kamera, pasang telepon, pasang listrik, dll)		
<b>23. Pajak dan asuransi</b> (PBB, iuran TV, pajak kendaraan, asuransi kecelakaan/kesehatan)		
<b>24. Keperluan pesta dan upacara</b> (perkawinan, khitanan, ulang tahun, perayaan hari agama, upacara adat, dll)		
<b>25. Jumlah bukan makanan</b> (Rincian 17 sd rincian 24)		
<b>26. Rata-rata pengeluaran makanan sebulan</b> (Rincian 16 x 30) $\frac{\quad}{7}$		
<b>27. Rata-rata pengeluaran bukan makanan sebulan</b> (Rincian 25 kolom 3) $\frac{\quad}{12}$		
<b>28. Rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan</b> (Rincian 26 + Rincian 27)		

Lampiran 2. Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan Kelompok Aksi

No	Rumah Tangga	Pekerjaan	Jml Tangg.	Kons/kapita /bl Baseline	Pinjaman Bergulir					Kons/kapita/bl Impact		Selisih Thd GK Jateng		Status Kemiskinan		
					Periode				Jumlah (Rp)	Nominal	Riil	Nominal 2011	Riil 2007	Baseline	Impact	
					Jml (X)	PB 1	PB 2	PB 3							PB 4	Nominal
1	RT001	Dagang	2	300.000	2	Sep'09-Jul'10	Ags'10-Jun'11		1.500.000	566.278	464.163	356.667	310.052	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
2	RT002	Dagang	5	120.000	2	Sep'09-Jul'10	Ags'10-Jun'11		1.500.000	190.450	156.107	(19.161)	1.996	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
3	RT003	Dagang	3	200.000	2	Sep'09-Jul'10	Ags'10-Jun'11		1.500.000	270.183	221.462	60.572	67.351	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
4	RT004	Dagang	4	150.000	2	Sep'09-Jul'10	Ags'10-Jun'11		1.500.000	241.909	198.286	32.298	44.175	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
5	RT005	Dagang	5	120.000	2	Sep'09-Jul'10	Ags'10-Jun'11		1.500.000	172.450	141.353	(37.161)	(12.758)	Miskin	Miskin	Miskin
6	RT006	Dagang	4	105.000	2	Sep'08-Jul'09	May'10-Mar'11		1.250.000	180.427	147.891	(29.184)	(6.220)	Miskin	Miskin	Miskin
7	RT007	Dagang	5	100.000	2	Sep'08-Jul'09	May'10-Mar'11		1.250.000	182.624	149.692	(26.987)	(4.419)	Miskin	Miskin	Miskin
8	RT008	Dagang	3	116.667	2	Sep'08-Jul'09	May'10-Mar'11		1.250.000	376.653	308.732	167.042	154.621	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
9	RT009	Dagang	3	133.333	2	Sep'08-Jul'09	May'10-Mar'11		1.250.000	375.270	307.598	165.659	153.487	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
10	RT010	Dagang	6	58.333	2	Sep'08-Jul'09	May'10-Mar'11		1.250.000	150.590	123.435	(59.021)	(30.676)	Miskin	Miskin	Miskin
11	RT011	Tukang Service	4	75.000	2	Jul'08-May'09	Feb'10-Dec'10		1.250.000	184.896	151.554	(24.715)	(2.557)	Miskin	Miskin	Miskin
12	RT012	Buruh Tani	4	87.500	2	Jul'08-May'09	Feb'10-Dec'10		1.250.000	260.786	213.759	51.175	59.648	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
13	RT013	Tukang Batu	6	50.000	2	Jul'08-May'09	Feb'10-Dec'10		1.250.000	151.345	124.053	(58.266)	(30.058)	Miskin	Miskin	Miskin
14	RT014	Dagang	5	70.000	2	Jul'08-May'09	Feb'10-Dec'10		1.250.000	187.745	153.890	(21.866)	(221)	Miskin	Miskin	Miskin
15	RT015	Dagang	4	75.000	2	Jul'08-May'09	Feb'10-Dec'10		1.250.000	268.161	219.804	58.550	65.693	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
16	RT016	Dagang	5	112.000	2	Sep'08-Jul'09	Feb'10-Dec'10		1.250.000	172.624	141.495	(36.987)	(12.616)	Miskin	Miskin	Miskin
17	RT017	Dagang	5	104.000	2	Sep'08-Jul'09	Feb'10-Dec'10		1.250.000	224.683	184.167	15.072	30.056	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
18	RT018	Dagang	5	90.000	2	Sep'08-Jul'09	Feb'10-Dec'10		1.250.000	204.743	167.822	(4.868)	13.711	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
19	RT019	Dagang	5	102.000	2	Sep'08-Jul'09	Feb'10-Dec'10		1.250.000	221.136	181.259	11.525	27.148	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
20	RT020	Dagang	4	115.000	2	Sep'08-Jul'09	Feb'10-Dec'10		1.250.000	231.732	189.944	22.121	35.833	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
21	RT021	Penjahit	3	200.000	2	May'08-Mar'09	Feb'10-Nov'10		1.500.000	247.283	202.691	37.672	48.580	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
22	RT022	Dagang	5	130.000	2	May'08-Mar'09	Feb'10-Nov'10		1.500.000	179.511	147.140	(30.100)	(6.971)	Miskin	Miskin	Miskin
23	RT023	Dagang	4	162.500	2	May'08-Mar'09	Feb'10-Nov'10		1.500.000	243.548	199.629	33.937	45.518	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
24	RT024	Dagang	4	150.000	2	May'08-Mar'09	Feb'10-Nov'10		1.500.000	204.674	167.765	(4.937)	13.654	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
25	RT025	Dagang	4	162.500	2	May'08-Mar'09	Feb'10-Nov'10		1.500.000	185.547	152.088	(24.064)	(2.023)	Tidak Miskin	Miskin	Miskin
26	RT026	Dagang	3	200.000	2	May'08-Mar'09	Feb'10-Nov'10		1.500.000	279.752	229.305	70.141	75.194	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
27	RT027	Dagang	6	100.000	2	May'08-Mar'09	Feb'10-Nov'10		1.500.000	174.030	142.647	(35.581)	(11.464)	Miskin	Miskin	Miskin
28	RT028	Dagang	4	150.000	2	May'08-Mar'09	Feb'10-Nov'10		1.500.000	173.937	142.571	(35.674)	(11.540)	Miskin	Miskin	Miskin
29	RT029	Dagang	3	183.333	2	Apr'09-Feb'10	Jun'10-Apr'11		1.500.000	233.137	191.095	23.526	36.984	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
30	RT030	Dagang	3	216.667	2	Apr'09-Feb'10	Jun'10-Apr'11		1.500.000	280.909	230.253	71.298	76.142	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
31	RT031	Dagang	3	233.333	2	Apr'09-Feb'10	Jun'10-Apr'11		1.500.000	230.458	188.900	20.847	34.789	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
32	RT032	Sopir	5	110.000	2	Apr'09-Feb'10	Jun'10-Apr'11		1.500.000	244.838	200.687	35.227	46.576	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
33	RT033	Sopir	4	137.500	2	Apr'09-Feb'10	Jun'10-Apr'11		1.500.000	171.366	140.464	(38.245)	(13.647)	Miskin	Miskin	Miskin
34	RT034	Dagang	4	125.000	2	Nov'08-Sep'09	May'10-Mar'11		1.250.000	254.214	208.372	44.603	54.261	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
35	RT035	Dagang	4	125.000	2	Nov'08-Sep'09	May'10-Mar'11		1.250.000	243.917	199.932	34.306	45.821	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
36	RT036	Dagang	3	170.000	2	Nov'08-Sep'09	May'10-Mar'11		1.250.000	303.933	249.125	94.322	95.014	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
37	RT037	Dagang	4	125.000	2	Nov'08-Sep'09	May'10-Mar'11		1.250.000	194.929	159.778	(14.682)	5.667	Miskin	Miskin	Tidak Miskin

No	Rumah Tangga	Pekerjaan	Jml Tangg.	Kons/kapita /bl Baseline	Pinjaman Bergulir					Kons/kapita/bl Impact		Selisih Thd GK Jateng		Status Kemiskinan			
					Periode				Jumlah (Rp)	Nominal	Riil	Nominal 2011	Riil 2007	Baseline	Impact		
					Jml (X)	PB 1	PB 2	PB 3							PB 4	Nominal	Riil
38	RT038	Dagang	4	127.500	2	Nov'08-Sep'09	May'10-Mar'11			1.250.000	267.012	218.862	57.401	64.751	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
39	RT039	Dagang	4	127.500	2	Nov'08-Sep'09	May'10-Mar'11			1.250.000	192.804	158.036	(16.807)	3.925	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
40	RT040	Dagang	4	127.500	2	Nov'08-Sep'09	May'10-Mar'11			1.250.000	258.012	211.485	48.401	57.374	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
41	RT041	Dagang	4	150.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	209.503	171.724	(108)	17.613	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
42	RT042	Dagang	4	150.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	170.791	139.992	(38.820)	(14.119)	Miskin	Miskin	Miskin
43	RT043	Dagang	5	120.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	180.935	148.307	(28.676)	(5.804)	Miskin	Miskin	Miskin
44	RT044	Dagang	4	150.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	164.757	135.047	(44.854)	(19.064)	Miskin	Miskin	Miskin
45	RT045	Dagang	5	120.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	170.390	139.664	(39.221)	(14.447)	Miskin	Miskin	Miskin
46	RT046	Dagang	4	150.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	250.880	205.639	41.269	51.528	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
47	RT047	Dagang	4	150.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	161.365	132.266	(48.246)	(21.845)	Miskin	Miskin	Miskin
48	RT048	Dagang	4	150.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	168.859	138.409	(40.752)	(15.702)	Miskin	Miskin	Miskin
49	RT049	Buruh Tani	6	100.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	166.081	136.132	(43.530)	(17.979)	Miskin	Miskin	Miskin
50	RT050	Dagang	3	166.667	1	Feb'09-Des'09				500.000	240.915	197.471	31.304	43.360	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
51	RT051	Dagang	3	166.667	1	Feb'09-Des'09				500.000	229.409	188.040	19.798	33.929	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
52	RT052	Dagang	4	125.000	1	Feb'09-Des'09				500.000	317.098	259.917	107.487	105.806	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
53	RT053	Dagang	5	100.000	1	Feb'09-Des'09				500.000	245.232	201.010	35.621	46.899	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
54	RT054	Buruh Tani	6	83.333	1	Feb'09-Des'09				500.000	200.485	164.332	(9.126)	10.221	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
55	RT055	Dagang	4	125.000	1	Feb'09-Des'09				500.000	153.042	125.445	(56.569)	(28.666)	Miskin	Miskin	Miskin
56	RT056	Buruh Tani	4	125.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	286.930	235.189	77.319	81.078	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
57	RT057	Ternak	4	175.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	285.885	234.332	76.274	80.221	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
58	RT058	Buruh Tani	4	125.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	243.414	199.519	33.803	45.408	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
59	RT059	Dagang	5	100.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	276.606	226.726	66.995	72.615	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
60	RT060	Buruh Tani	4	150.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	284.664	233.331	75.053	79.220	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
61	RT061	Dagang	5	120.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	197.058	161.523	(12.553)	7.412	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
62	RT062	Buruh Tani	6	116.667	2	Feb'09-Des'09	May'10-Mar'11			1.250.000	219.232	179.698	9.621	25.587	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
63	RT063	Buruh Tani	5	100.000	2	Feb'09-Des'09	May'10-Mar'11			1.250.000	191.017	156.571	(18.594)	2.460	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
64	RT064	Tukang Batu	5	120.000	2	Feb'09-Des'09	May'10-Mar'11			1.250.000	168.290	137.943	(41.321)	(16.168)	Miskin	Miskin	Miskin
65	RT065	Buruh Tani	4	125.000	2	Feb'09-Des'09	May'10-Mar'11			1.250.000	236.120	193.541	26.509	39.430	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
66	RT066	Buruh Tani	6	83.333	2	Feb'09-Des'09	May'10-Mar'11			1.250.000	156.094	127.946	(53.517)	(26.165)	Miskin	Miskin	Miskin
67	RT067	Buruh Tani	3	116.667	2	May'09-Mar'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	194.221	159.198	(15.390)	5.087	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
68	RT068	Sopir	9	50.000	2	May'09-Mar'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	130.434	106.913	(79.177)	(47.198)	Miskin	Miskin	Miskin
69	RT069	Dagang	4	187.500	2	May'09-Mar'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	206.942	169.625	(2.669)	15.514	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
70	RT070	Buruh Tani	4	162.500	2	May'09-Mar'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	180.298	147.785	(29.313)	(6.326)	Tidak Miskin	Miskin	Miskin
71	RT071	Tukang Batu	5	160.000	2	May'09-Mar'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	171.993	140.978	(37.618)	(13.133)	Tidak Miskin	Miskin	Miskin
72	RT072	Buruh Pabrik	4	162.500	2	May'09-Mar'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	280.924	230.266	71.313	76.155	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
73	RT073	Tukang Batu	4	175.000	2	May'09-Mar'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	192.563	157.838	(17.049)	3.727	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
74	RT074	Dagang	4	125.000	2	Apr'08-Feb'09	May'10-Mar'11			1.250.000	288.411	236.402	78.800	82.291	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
75	RT075	Wilit	4	75.000	2	Apr'08-Feb'09	May'10-Mar'11			1.250.000	148.435	121.668	(61.176)	(32.443)	Miskin	Miskin	Miskin

No	Rumah Tangga	Pekerjaan	Jml Tangg.	Kons/kapita /bl Baseline	Pinjaman Bergulir					Kons/kapita/bl Impact		Selisih Thd GK Jateng		Status Kemiskinan			
					Periode				Jumlah (Rp)	Nominal	Riil	Nominal 2011	Riil 2007	Baseline	Impact		
					Jml (X)	PB 1	PB 2	PB 3							PB 4	Nominal	Riil
76	RT076	Buruh Tani	3	116.667	2	Apr'08-Feb'09	May'10-Mar'11			1.250.000	297.567	243.908	87.956	89.797	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
77	RT077	Wilit	3	133.333	2	Apr'08-Feb'09	May'10-Mar'11			1.250.000	272.690	223.517	63.079	69.406	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
78	RT078	Buruh Tani	2	200.000	4	Oct'08-Ags'09	Sep'09-Jul'10	Ags'10-Jun'11	Jul'11-May'12	3.000.000	259.357	212.588	49.746	58.477	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
79	RT079	Dagang	4	100.000	4	Oct'08-Ags'09	Sep'09-Jul'10	Ags'10-Jun'11	Jul'11-May'12	3.000.000	197.131	161.583	(12.480)	7.472	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
80	RT080	Dagang	4	100.000	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Des'10			1.250.000	229.741	188.312	20.130	34.201	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
81	RT081	Dagang	3	133.333	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Des'10			1.250.000	186.667	153.005	(22.944)	(1.106)	Miskin	Miskin	Miskin
82	RT082	Buruh Tani	4	100.000	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Des'10			1.250.000	174.917	143.375	(34.694)	(10.736)	Miskin	Miskin	Miskin
83	RT083	Penjahit	4	100.000	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Des'10			1.250.000	223.389	183.106	13.778	28.995	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
84	RT084	Dagang	3	133.333	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Des'10			1.000.000	166.444	136.430	(43.167)	(17.681)	Miskin	Miskin	Miskin
85	RT085	Buruh Tani	4	100.000	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Des'10			1.250.000	239.371	196.205	29.760	42.094	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
86	RT086	Dagang	3	133.333	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Des'10			1.000.000	159.226	130.513	(50.385)	(23.598)	Miskin	Miskin	Miskin
87	RT087	Dagang	5	80.000	2	Feb'09-Des'09	Ags'10-Jun'11			1.000.000	140.608	115.252	(69.003)	(38.859)	Miskin	Miskin	Miskin
88	RT088	Buruh Bangunan	5	80.000	2	Feb'09-Des'09	Ags'10-Jun'11			1.000.000	146.513	120.092	(63.099)	(34.019)	Miskin	Miskin	Miskin
89	RT089	Dagang	5	80.000	2	Feb'09-Des'09	Ags'10-Jun'11			1.000.000	151.027	123.792	(58.584)	(30.319)	Miskin	Miskin	Miskin
90	RT090	Sopir	4	100.000	2	Feb'09-Des'09	Ags'10-Jun'11			1.000.000	198.167	162.432	(11.444)	8.321	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
91	RT091	Buruh Tani	4	75.000	2	Mar'09-Jan'10	Jun'10-Apr'11			1.000.000	235.845	193.316	26.234	39.205	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
92	RT092	Bengkel	4	137.500	2	Mar'09-Jan'10	Jun'10-Apr'11			1.000.000	187.095	153.357	(22.516)	(754)	Miskin	Miskin	Miskin
93	RT093	Buruh Tani	2	150.000	2	Mar'09-Jan'10	Jun'10-Apr'11			1.000.000	410.214	336.241	200.603	182.130	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
94	RT094	Dagang	4	100.000	2	Mar'09-Jan'10	Jun'10-Apr'11			1.000.000	280.467	229.891	70.856	75.780	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
95	RT095	Buruh Tani	5	60.000	2	Mar'09-Jan'10	Jun'10-Apr'11			1.000.000	113.171	92.763	(96.440)	(61.348)	Miskin	Miskin	Miskin
96	RT096	Buruh Tani	4	200.000	2	May'09-Mar'10	Jul'10-May'11			1.500.000	335.814	275.257	126.203	121.146	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
97	RT097	Buruh Tani	5	160.000	2	May'09-Mar'10	Jul'10-May'11			1.500.000	156.064	127.922	(53.547)	(26.189)	Tidak Miskin	Miskin	Miskin
98	RT098	Dagang	5	140.000	2	May'09-Mar'10	Jul'10-May'11			1.500.000	260.742	213.723	51.131	59.612	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
99	RT099	Dagang	9	66.667	2	May'09-Mar'10	Jul'10-May'11			1.500.000	177.196	145.243	(32.415)	(8.868)	Miskin	Miskin	Miskin
100	RT100	Dagang	5	150.000	2	May'09-Mar'10	Jul'10-May'11			1.500.000	166.193	136.224	(43.418)	(17.887)	Miskin	Miskin	Miskin
101	RT101	Penjaga Makam	3	133.333	2	May'09-Mar'10	Jun'10-Apr'11			1.250.000	295.671	242.353	86.060	88.242	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
102	RT102	Buruh pabrik	5	100.000	2	May'09-Mar'10	Jun'10-Apr'11			1.250.000	231.798	189.998	22.187	35.887	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
103	RT103	Dagang	4	125.000	2	May'09-Mar'10	Jun'10-Apr'11			1.250.000	209.603	171.805	(8)	17.694	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
104	RT104	Sopir	5	100.000	2	May'09-Mar'10	Jun'10-Apr'11			1.250.000	256.321	210.100	46.710	55.989	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
105	RT105	Dagang	6	83.333	2	May'09-Mar'10	Jun'10-Apr'11			1.250.000	240.734	197.323	31.123	43.212	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
106	RT106	Dagang	4	168.750	2	Dec'08-Oct'09	Mar'10-Jan'11			1.250.000	191.351	156.845	(18.260)	2.734	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
107	RT107	Buruh Tani	5	134.000	2	Dec'08-Oct'09	Mar'10-Jan'11			1.250.000	129.586	106.218	(80.025)	(47.893)	Miskin	Miskin	Miskin
108	RT108	Dagang	4	200.000	2	Dec'08-Oct'09	Mar'10-Jan'11			1.250.000	205.568	168.499	(4.043)	14.388	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
109	RT109	Dagang	3	266.667	2	Dec'08-Oct'09	Mar'10-Jan'11			1.250.000	335.294	274.831	125.683	120.720	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
110	RT110	Dagang	3	200.000	2	Dec'08-Oct'09	Mar'10-Jan'11			1.250.000	421.948	345.859	212.337	191.748	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
<b>RATA-RATA</b>			<b>4</b>	<b>130.439</b>							<b>223.921</b>	<b>183.541</b>			<b>Miskin</b>	<b>Tidak Miskin</b>	<b>Tidak Miskin</b>

Lampiran 3. Perubahan Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan pada Rumah Tangga Buruh Tani Berdasarkan Penggunaan Dana Bergulir

No	Rumah Tangga	Pekerjaan	Jml Tangg.	Kons/kapita /bl Baseline	Pinjaman Bergulir					Kons/kapita/bl Impact		Selisih Thd GK Jateng		Status Kemiskinan			Penggunaan Dana	
					Periode					Jumlah (Rp)	Nominal	Riil	Nominal 2011	Riil 2007	Baseline	Impact		
					Jml (X)	PB 1	PB 2	PB 3	PB 4							Nominal		Riil
1	RT012	Buruh Tani	4	87.500	2	Jul'08-May'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	260.786	213.759	51.175	59.648	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
2	RT049	Buruh Tani	6	100.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	166.081	136.132	(43.530)	(17.979)	Miskin	Miskin	Miskin	Konsumsi
3	RT054	Buruh Tani	6	83.333	1	Feb'09-Dec'09				500.000	200.485	164.332	(9.126)	10.221	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Konsumsi
4	RT056	Buruh Tani	4	125.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	286.930	235.189	77.319	81.078	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
5	RT058	Buruh Tani	4	125.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	243.414	199.519	33.803	45.408	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
6	RT060	Buruh Tani	4	150.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	284.664	233.331	75.053	79.220	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
7	RT062	Buruh Tani	6	116.667	2	Feb'09-Dec'09	May'10-Mar'11			1.250.000	219.232	179.698	9.621	25.587	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
8	RT063	Buruh Tani	5	100.000	2	Feb'09-Dec'09	May'10-Mar'11			1.250.000	191.017	156.571	(18.594)	2.460	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Konsumsi
9	RT065	Buruh Tani	4	125.000	2	Feb'09-Dec'09	May'10-Mar'11			1.250.000	236.120	193.541	26.509	39.430	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
10	RT066	Buruh Tani	6	83.333	2	Feb'09-Dec'09	May'10-Mar'11			1.250.000	156.094	127.946	(53.517)	(26.165)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
11	RT067	Buruh Tani	3	116.667	2	May'09-Mar'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	194.221	159.198	(15.390)	5.087	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Konsumsi
12	RT070	Buruh Tani	4	162.500	2	May'09-Mar'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	180.298	147.785	(29.313)	(6.326)	Tidak Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
13	RT076	Buruh Tani	3	116.667	2	Apr'08-Feb'09	May'10-Mar'11			1.250.000	297.567	243.908	87.956	89.797	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
14	RT078	Buruh Tani	2	200.000	4	Oct'08-Ags'09	Sep'09-Jul'10	Ags'10-Jun'11	Jul'11-May'12	3.000.000	259.357	212.588	49.746	58.477	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
15	RT082	Buruh Tani	4	100.000	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	174.917	143.375	(34.694)	(10.736)	Miskin	Miskin	Miskin	Konsumsi
16	RT085	Buruh Tani	4	100.000	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	239.371	196.205	29.760	42.094	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
17	RT091	Buruh Tani	4	75.000	2	Mar'09-Jan'10	Jun'10-Apr'11			1.000.000	235.845	193.316	26.234	39.205	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
18	RT093	Buruh Tani	2	150.000	2	Mar'09-Jan'10	Jun'10-Apr'11			1.000.000	410.214	336.241	200.603	182.130	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
19	RT095	Buruh Tani	5	60.000	2	Mar'09-Jan'10	Jun'10-Apr'11			1.000.000	113.171	92.763	(96.440)	(61.348)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
20	RT096	Buruh Tani	4	200.000	2	May'09-Mar'10	Jul'10-May'11			1.500.000	335.814	275.257	126.203	121.146	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
21	RT097	Buruh Tani	5	160.000	2	May'09-Mar'10	Jul'10-May'11			1.500.000	156.064	127.922	(53.547)	(26.189)	Tidak Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
22	RT107	Buruh Tani	5	134.000	2	Dec'08-Oct'09	Mar'10-Jan'11			1.250.000	129.586	106.218	(80.025)	(47.893)	Miskin	Miskin	Miskin	Konsumsi
<b>RATA-RATA</b>			<b>4</b>	<b>121.394</b>						<b>225,966</b>	<b>185,218</b>				<b>Miskin</b>	<b>Tidak Miskin</b>	<b>Tidak Miskin</b>	

Lampiran 4. Perubahan Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan pada Rumah Tangga Dagang Berdasarkan Penggunaan Dana Bergulir

No	Rumah Tangga	Pekerjaan	Jml Tangg.	Kons/kapita /bl Baseline	Pinjaman Bergulir					Kons/kapita/bl Impact		Selisih Thd GK Jateng		Status Kemiskinan			Penggunaan Dana	
					Periode					Jumlah (Rp)	Nominal	Riil	Nominal 2011	Riil 2007	Baseline	Impact		
					Jml (X)	PB 1	PB 2	PB 3	PB 4							Nominal		Riil
1	RT001	Dagang	2	300.000	2	Sep09-Jul'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	566.278	464.163	356.667	310.052	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
2	RT002	Dagang	5	120.000	2	Sep09-Jul'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	190.450	156.107	(19.161)	1.996	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
3	RT003	Dagang	3	200.000	2	Sep09-Jul'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	270.183	221.462	60.572	67.351	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
4	RT004	Dagang	4	150.000	2	Sep09-Jul'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	241.909	198.286	32.298	44.175	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
5	RT005	Dagang	5	120.000	2	Sep09-Jul'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	172.450	141.353	(37.161)	(12.758)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
6	RT006	Dagang	4	105.000	2	Sep08-Jul'09	May'10-Mar'11			1.250.000	180.427	147.891	(29.184)	(6.220)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
7	RT007	Dagang	5	100.000	2	Sep08-Jul'09	May'10-Mar'11			1.250.000	182.624	149.692	(26.987)	(4.419)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
8	RT008	Dagang	3	116.667	2	Sep08-Jul'09	May'10-Mar'11			1.250.000	376.653	308.732	167.042	154.621	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
9	RT009	Dagang	3	133.333	2	Sep08-Jul'09	May'10-Mar'11			1.250.000	375.270	307.598	165.659	153.487	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
10	RT010	Dagang	6	58.333	2	Sep08-Jul'09	May'10-Mar'11			1.250.000	150.590	123.435	(59.021)	(30.676)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
11	RT014	Dagang	5	70.000	2	Jul'08-May'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	187.745	153.890	(21.866)	(221)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
12	RT015	Dagang	4	75.000	2	Jul'08-May'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	268.161	219.804	58.550	65.693	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
13	RT016	Dagang	5	112.000	2	Sep08-Jul'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	172.624	141.495	(36.987)	(12.616)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
14	RT017	Dagang	5	104.000	2	Sep08-Jul'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	224.683	184.167	15.072	30.056	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
15	RT018	Dagang	5	90.000	2	Sep08-Jul'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	204.743	167.822	(4.868)	13.711	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
16	RT019	Dagang	5	102.000	2	Sep08-Jul'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	221.136	181.259	11.525	27.148	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
17	RT020	Dagang	4	115.000	2	Sep08-Jul'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	231.732	189.944	22.121	35.833	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
18	RT022	Dagang	5	130.000	2	May08-Mar09	Feb'10-Nov'10			1.500.000	179.511	147.140	(30.100)	(6.971)	Miskin	Miskin	Miskin	Konsumsi
19	RT023	Dagang	4	162.500	2	May08-Mar09	Feb'10-Nov'10			1.500.000	243.548	199.629	33.937	45.518	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
20	RT024	Dagang	4	150.000	2	May08-Mar09	Feb'10-Nov'10			1.500.000	204.674	167.765	(4.937)	13.654	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Konsumsi
21	RT025	Dagang	4	162.500	2	May08-Mar09	Feb'10-Nov'10			1.500.000	185.547	152.088	(24.064)	(2.023)	Tidak Miskin	Miskin	Miskin	Konsumsi
22	RT026	Dagang	3	200.000	2	May08-Mar09	Feb'10-Nov'10			1.500.000	279.752	229.305	70.141	75.194	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
23	RT027	Dagang	6	100.000	2	May08-Mar09	Feb'10-Nov'10			1.500.000	174.030	142.647	(35.581)	(11.464)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
24	RT028	Dagang	4	150.000	2	May08-Mar09	Feb'10-Nov'10			1.500.000	173.937	142.571	(35.674)	(11.540)	Miskin	Miskin	Miskin	Konsumsi
25	RT029	Dagang	3	183.333	2	Apr'09-Feb'10	Jun'10-Apr'11			1.500.000	233.137	191.095	23.526	36.984	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
26	RT030	Dagang	3	216.667	2	Apr'09-Feb'10	Jun'10-Apr'11			1.500.000	280.909	230.253	71.298	76.142	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
27	RT031	Dagang	3	233.333	2	Apr'09-Feb'10	Jun'10-Apr'11			1.500.000	230.458	188.900	20.847	34.789	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
28	RT034	Dagang	4	125.000	2	Nov08-Sep09	May'10-Mar'11			1.250.000	254.214	208.372	44.603	54.261	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
29	RT035	Dagang	4	125.000	2	Nov08-Sep09	May'10-Mar'11			1.250.000	243.917	199.932	34.306	45.821	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
30	RT036	Dagang	3	170.000	2	Nov08-Sep09	May'10-Mar'11			1.250.000	303.933	249.125	94.322	95.014	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
31	RT037	Dagang	4	125.000	2	Nov08-Sep09	May'10-Mar'11			1.250.000	194.929	159.778	(14.682)	5.667	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Konsumsi
32	RT038	Dagang	4	127.500	2	Nov08-Sep09	May'10-Mar'11			1.250.000	267.012	218.862	57.401	64.751	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
33	RT039	Dagang	4	127.500	2	Nov08-Sep09	May'10-Mar'11			1.250.000	192.804	158.036	(16.807)	3.925	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
34	RT040	Dagang	4	127.500	2	Nov08-Sep09	May'10-Mar'11			1.250.000	258.012	211.485	48.401	57.374	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
35	RT041	Dagang	4	150.000	1	Mar09-Jan'10				500.000	209.503	171.724	(108)	17.613	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
36	RT042	Dagang	4	150.000	1	Mar09-Jan'10				500.000	170.791	139.992	(38.820)	(14.119)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
37	RT043	Dagang	5	120.000	1	Mar09-Jan'10				500.000	180.935	148.307	(28.676)	(5.804)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
38	RT044	Dagang	4	150.000	1	Mar09-Jan'10				500.000	164.757	135.047	(44.854)	(19.064)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
39	RT045	Dagang	5	120.000	1	Mar09-Jan'10				500.000	170.390	139.664	(39.221)	(14.447)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
40	RT046	Dagang	4	150.000	1	Mar09-Jan'10				500.000	250.880	205.639	41.269	51.528	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif



No	Rumah Tangga	Pekerjaan	Jml Tangg.	Kons/kapita /bl Baseline	Pinjaman Bergulir					Kons/kapita/bl Impact		Selisih Thd GK Jateng		Status Kemiskinan			Penggunaan Dana	
					Periode					Jumlah (Rp)	Nominal	Riil	Nominal 2011	Riil 2007	Baseline	Impact		
					Jml (X)	PB 1	PB 2	PB 3	PB 4							Nominal		Riil
41	RT047	Dagang	4	150.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	161.365	132.266	(48.246)	(21.845)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
42	RT048	Dagang	4	150.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	168.859	138.409	(40.752)	(15.702)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
43	RT050	Dagang	3	166.667	1	Feb'09-Des'09				500.000	240.915	197.471	31.304	43.360	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
44	RT051	Dagang	3	166.667	1	Feb'09-Des'09				500.000	229.409	188.040	19.798	33.929	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
45	RT052	Dagang	4	125.000	1	Feb'09-Des'09				500.000	317.098	259.917	107.487	105.806	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
46	RT053	Dagang	5	100.000	1	Feb'09-Des'09				500.000	245.232	201.010	35.621	46.899	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
47	RT055	Dagang	4	125.000	1	Feb'09-Des'09				500.000	153.042	125.445	(56.569)	(28.666)	Miskin	Miskin	Miskin	Konsumsi
48	RT059	Dagang	5	100.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	276.606	226.726	66.995	72.615	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
49	RT061	Dagang	5	120.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	197.058	161.523	(12.553)	7.412	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
50	RT069	Dagang	4	187.500	2	May'09-Mar'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	206.942	169.625	(2.669)	15.514	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Konsumsi
51	RT074	Dagang	4	125.000	2	Apr'08-Feb'09	May'10-Mar'11			1.250.000	288.411	236.402	78.800	82.291	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
52	RT079	Dagang	4	100.000	4	Oct'08-Ags'09	Sep'09-Jul'10	Ags'10-Jun'11	Jul'11-May'12	3.000.000	197.131	161.583	(12.480)	7.472	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
53	RT080	Dagang	4	100.000	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Des'10			1.250.000	229.741	188.312	20.130	34.201	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
54	RT081	Dagang	3	133.333	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Des'10			1.250.000	186.667	153.005	(22.944)	(1.106)	Miskin	Miskin	Miskin	Konsumsi
55	RT084	Dagang	3	133.333	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Des'10			1.000.000	166.444	136.430	(43.167)	(17.681)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
56	RT086	Dagang	3	133.333	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Des'10			1.000.000	159.226	130.513	(50.385)	(23.598)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
57	RT087	Dagang	5	80.000	2	Feb'09-Des'09	Ags'10-Jun'11			1.000.000	140.608	115.252	(69.003)	(38.859)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
58	RT089	Dagang	5	80.000	2	Feb'09-Des'09	Ags'10-Jun'11			1.000.000	151.027	123.792	(58.584)	(30.319)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
59	RT094	Dagang	4	100.000	2	Mar'09-Jan'10	Jun'10-Apr'11			1.000.000	280.467	229.891	70.856	75.780	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
60	RT098	Dagang	5	140.000	2	May'09-Mar'10	Jul'10-May'11			1.500.000	260.742	213.723	51.131	59.612	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
61	RT099	Dagang	9	66.667	2	May'09-Mar'10	Jul'10-May'11			1.500.000	177.196	145.243	(32.415)	(8.868)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
62	RT100	Dagang	5	150.000	2	May'09-Mar'10	Jul'10-May'11			1.500.000	166.193	136.224	(43.418)	(17.887)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
63	RT103	Dagang	4	125.000	2	May'09-Mar'10	Jun'10-Apr'11			1.250.000	209.603	171.805	(8)	17.694	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
64	RT105	Dagang	6	83.333	2	May'09-Mar'10	Jun'10-Apr'11			1.250.000	240.734	197.323	31.123	43.212	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
65	RT106	Dagang	4	168.750	2	Dec'08-Oct'09	Mar'10-Jan'11			1.250.000	191.351	156.845	(18.260)	2.734	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
66	RT108	Dagang	4	200.000	2	Dec'08-Oct'09	Mar'10-Jan'11			1.250.000	205.568	168.499	(4.043)	14.388	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
67	RT109	Dagang	3	266.667	2	Dec'08-Oct'09	Mar'10-Jan'11			1.250.000	335.294	274.831	125.683	120.720	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
68	RT110	Dagang	3	200.000	2	Dec'08-Oct'09	Mar'10-Jan'11			1.250.000	421.948	345.859	212.337	191.748	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
<b>RATA-RATA</b>			<b>4</b>	<b>136.815</b>							<b>227.502</b>	<b>186.477</b>			<b>Miskin</b>	<b>Tidak Miskin</b>	<b>Tidak Miskin</b>	

No	Rumah Tangga	Pekerjaan	Jml Tangg.	Kons/kapita /bl Baseline	Pinjaman Bergulir					Kons/kapita/bl Impact		Selisih Thd GK Jateng		Status Kemiskinan			Penggunaan Dana	
					Periode					Jumlah (Rp)	Nominal	Riil	Nominal 2011	Riil 2007	Baseline	Impact		
					Jml (X)	PB 1	PB 2	PB 3	PB 4							Nominal		Riil
1	RT001	Dagang	2	300.000	2	Sep'09-Jul'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	566.278	464.163	356.667	310.052	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
2	RT002	Dagang	5	120.000	2	Sep'09-Jul'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	190.450	156.107	(19.161)	1.996	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
3	RT003	Dagang	3	200.000	2	Sep'09-Jul'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	270.183	221.462	60.572	67.351	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
4	RT004	Dagang	4	150.000	2	Sep'09-Jul'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	241.909	198.286	32.298	44.175	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
5	RT005	Dagang	5	120.000	2	Sep'09-Jul'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	172.450	141.353	(37.161)	(12.758)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
6	RT006	Dagang	4	105.000	2	Sep'08-Jul'09	May'10-Mar'11			1.250.000	180.427	147.891	(29.184)	(6.220)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
7	RT007	Dagang	5	100.000	2	Sep'08-Jul'09	May'10-Mar'11			1.250.000	182.624	149.692	(26.987)	(4.419)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
8	RT008	Dagang	3	116.667	2	Sep'08-Jul'09	May'10-Mar'11			1.250.000	376.653	308.732	167.042	154.621	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
9	RT009	Dagang	3	133.333	2	Sep'08-Jul'09	May'10-Mar'11			1.250.000	375.270	307.598	165.659	153.487	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
10	RT010	Dagang	6	58.333	2	Sep'08-Jul'09	May'10-Mar'11			1.250.000	150.590	123.435	(59.021)	(30.676)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
11	RT012	Buruh Tani	4	87.500	2	Jul'08-May'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	260.786	213.759	51.175	59.648	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
12	RT013	Tukang Batu	6	50.000	2	Jul'08-May'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	151.345	124.053	(58.266)	(30.058)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
13	RT014	Dagang	5	70.000	2	Jul'08-May'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	187.745	153.890	(21.866)	(221)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
14	RT015	Dagang	4	75.000	2	Jul'08-May'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	268.161	219.804	58.550	65.693	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
15	RT016	Dagang	5	112.000	2	Sep'08-Jul'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	172.624	141.495	(36.987)	(12.616)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
16	RT017	Dagang	5	104.000	2	Sep'08-Jul'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	224.683	184.167	15.072	30.056	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
17	RT018	Dagang	5	90.000	2	Sep'08-Jul'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	204.743	167.822	(4.868)	13.711	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
18	RT019	Dagang	5	102.000	2	Sep'08-Jul'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	221.136	181.259	11.525	27.148	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
19	RT020	Dagang	4	115.000	2	Sep'08-Jul'09	Feb'10-Dec'10			1.250.000	231.732	189.944	22.121	35.833	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
20	RT021	Penjahit	3	200.000	2	May'08-Mar'09	Feb'10-Nov'10			1.500.000	247.283	202.691	37.672	48.580	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
21	RT023	Dagang	4	162.500	2	May'08-Mar'09	Feb'10-Nov'10			1.500.000	243.548	199.629	33.937	45.518	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
22	RT026	Dagang	3	200.000	2	May'08-Mar'09	Feb'10-Nov'10			1.500.000	279.752	229.305	70.141	75.194	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
23	RT027	Dagang	6	100.000	2	May'08-Mar'09	Feb'10-Nov'10			1.500.000	174.030	142.647	(35.581)	(11.464)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
24	RT029	Dagang	3	183.333	2	Apr'09-Feb'10	Jun'10-Apr'11			1.500.000	233.137	191.095	23.526	36.984	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
25	RT030	Dagang	3	216.667	2	Apr'09-Feb'10	Jun'10-Apr'11			1.500.000	280.909	230.253	71.298	76.142	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
26	RT031	Dagang	3	233.333	2	Apr'09-Feb'10	Jun'10-Apr'11			1.500.000	230.458	188.900	20.847	34.789	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
27	RT032	Sopir	5	110.000	2	Apr'09-Feb'10	Jun'10-Apr'11			1.500.000	244.838	200.687	35.227	46.576	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
28	RT034	Dagang	4	125.000	2	Nov'08-Sep'09	May'10-Mar'11			1.250.000	254.214	208.372	44.603	54.261	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
29	RT035	Dagang	4	125.000	2	Nov'08-Sep'09	May'10-Mar'11			1.250.000	243.917	199.932	34.306	45.821	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
30	RT036	Dagang	3	170.000	2	Nov'08-Sep'09	May'10-Mar'11			1.250.000	303.933	249.125	94.322	95.014	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
31	RT038	Dagang	4	127.500	2	Nov'08-Sep'09	May'10-Mar'11			1.250.000	267.012	218.862	57.401	64.751	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
32	RT039	Dagang	4	127.500	2	Nov'08-Sep'09	May'10-Mar'11			1.250.000	192.804	158.036	(16.807)	3.925	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
33	RT040	Dagang	4	127.500	2	Nov'08-Sep'09	May'10-Mar'11			1.250.000	258.012	211.485	48.401	57.374	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
34	RT041	Dagang	4	150.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	209.503	171.724	(108)	17.613	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
35	RT042	Dagang	4	150.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	170.791	139.992	(38.820)	(14.119)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
36	RT043	Dagang	5	120.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	180.935	148.307	(28.676)	(5.804)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif

No	Rumah Tangga	Pekerjaan	Jml Tangg.	Kons/kapita /bl Baseline	Pinjaman Bergulir					Kons/kapita/bl Impact		Selisih Thd GK Jateng		Status Kemiskinan			Penggunaan Dana	
					Periode					Jumlah (Rp)	Nominal	Riil	Nominal 2011	Riil 2007	Baseline	Impact		
					Jml (X)	PB 1	PB 2	PB 3	PB 4							Nominal		Riil
37	RT044	Dagang	4	150.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	164.757	135.047	(44.854)	(19.064)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
38	RT045	Dagang	5	120.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	170.390	139.664	(39.221)	(14.447)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
39	RT046	Dagang	4	150.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	250.880	205.639	41.269	51.528	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
40	RT047	Dagang	4	150.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	161.365	132.266	(48.246)	(21.845)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
41	RT048	Dagang	4	150.000	1	Mar'09-Jan'10				500.000	168.859	138.409	(40.752)	(15.702)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
42	RT050	Dagang	3	166.667	1	Feb'09-Des'09				500.000	240.915	197.471	31.304	43.360	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
43	RT051	Dagang	3	166.667	1	Feb'09-Des'09				500.000	229.409	188.040	19.798	33.929	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
44	RT052	Dagang	4	125.000	1	Feb'09-Des'09				500.000	317.098	259.917	107.487	105.806	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
45	RT053	Dagang	5	100.000	1	Feb'09-Des'09				500.000	245.232	201.010	35.621	46.899	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
46	RT056	Buruh Tani	4	125.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	286.930	235.189	77.319	81.078	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
47	RT057	Ternak	4	175.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	285.885	234.332	76.274	80.221	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
48	RT058	Buruh Tani	4	125.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	243.414	199.519	33.803	45.408	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
49	RT059	Dagang	5	100.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	276.606	226.726	66.995	72.615	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
50	RT060	Buruh Tani	4	150.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	284.664	233.331	75.053	79.220	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
51	RT061	Dagang	5	120.000	2	Oct'08-Ags'09	Jun'10-Apr'11			1.500.000	197.058	161.523	(12.553)	7.412	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
52	RT062	Buruh Tani	6	116.667	2	Feb'09-Des'09	May'10-Mar'11			1.250.000	219.232	179.698	9.621	25.587	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
53	RT065	Buruh Tani	4	125.000	2	Feb'09-Des'09	May'10-Mar'11			1.250.000	236.120	193.541	26.509	39.430	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
54	RT066	Buruh Tani	6	83.333	2	Feb'09-Des'09	May'10-Mar'11			1.250.000	156.094	127.946	(53.517)	(26.165)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
55	RT068	Sopir	9	50.000	2	May'09-Mar'10	May'10-Jun'11			1.500.000	130.434	106.913	(79.177)	(47.198)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
56	RT070	Buruh Tani	4	162.500	2	May'09-Mar'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	180.298	147.785	(29.313)	(6.326)	Tidak Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
57	RT072	Buruh Pabrik	4	162.500	2	May'09-Mar'10	Ags'10-Jun'11			1.500.000	280.924	230.266	71.313	76.155	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
58	RT074	Dagang	4	125.000	2	Apr'08-Feb'09	May'10-Mar'11			1.250.000	288.411	236.402	78.800	82.291	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
59	RT075	Wilit	4	75.000	2	Apr'08-Feb'09	May'10-Mar'11			1.250.000	148.435	121.668	(61.176)	(32.443)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
60	RT076	Buruh Tani	3	116.667	2	Apr'08-Feb'09	May'10-Mar'11			1.250.000	297.567	243.908	87.956	89.797	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
61	RT077	Wilit	3	133.333	2	Apr'08-Feb'09	May'10-Mar'11			1.250.000	272.690	223.517	63.079	69.406	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
62	RT078	Buruh Tani	2	200.000	4	Oct'08-Ags'09	Sep'09-Jul'10	Ags'10-Jun'11	Jul'11-May'12	3.000.000	259.357	212.588	49.746	58.477	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
63	RT079	Dagang	4	100.000	4	Oct'08-Ags'09	Sep'09-Jul'10	Ags'10-Jun'11	Jul'11-May'12	3.000.000	197.131	161.583	(12.480)	7.472	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
64	RT080	Dagang	4	100.000	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Des'10			1.250.000	229.741	188.312	20.130	34.201	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
65	RT083	Penjahit	4	100.000	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Des'10			1.250.000	223.389	183.106	13.778	28.995	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
66	RT084	Dagang	3	133.333	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Des'10			1.000.000	166.444	136.430	(43.167)	(17.681)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
67	RT085	Buruh Tani	4	100.000	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Des'10			1.250.000	239.371	196.205	29.760	42.094	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
68	RT086	Dagang	3	133.333	2	Oct'08-Ags'09	Feb'10-Des'10			1.000.000	159.226	130.513	(50.385)	(23.598)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
69	RT087	Dagang	5	80.000	2	Feb'09-Des'09	Ags'10-Jun'11			1.000.000	140.608	115.252	(69.003)	(38.859)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
70	RT089	Dagang	5	80.000	2	Feb'09-Des'09	Ags'10-Jun'11			1.000.000	151.027	123.792	(58.584)	(30.319)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
71	RT091	Buruh Tani	4	75.000	2	Mar'09-Jan'10	Jun'10-Apr'11			1.000.000	235.845	193.316	26.234	39.205	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
72	RT093	Buruh Tani	2	150.000	2	Mar'09-Jan'10	Jun'10-Apr'11			1.000.000	410.214	336.241	200.603	182.130	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
73	RT094	Dagang	4	100.000	2	Mar'09-Jan'10	Jun'10-Apr'11			1.000.000	280.467	229.891	70.856	75.780	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif

No	Rumah Tangga	Pekerjaan	Jml Tangg.	Kons/kapita /bl Baseline	Pinjaman Bergulir					Kons/kapita/bl Impact		Selisih Thd GK Jateng		Status Kemiskinan			Penggunaan Dana	
					Periode					Jumlah (Rp)	Nominal	Riil	Nominal 2011	Riil 2007	Baseline	Impact		
					Jml (X)	PB 1	PB 2	PB 3	PB 4							Nominal		Riil
74	RT095	Buruh Tani	5	60.000	2	Mar'09-Jan'10	Jun'10-Apr'11			1.000.000	113.171	92.763	(96.440)	(61.348)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
75	RT096	Buruh Tani	4	200.000	2	May'09-Mar'10	Jul'10-May'11			1.500.000	335.814	275.257	126.203	121.146	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
76	RT098	Dagang	5	140.000	2	May'09-Mar'10	Jul'10-May'11			1.500.000	260.742	213.723	51.131	59.612	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
77	RT099	Dagang	9	66.667	2	May'09-Mar'10	Jul'10-May'11			1.500.000	177.196	145.243	(32.415)	(8.868)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
78	RT100	Dagang	5	150.000	2	May'09-Mar'10	Jul'10-May'11			1.500.000	166.193	136.224	(43.418)	(17.887)	Miskin	Miskin	Miskin	Produktif
79	RT101	Penjaga Makam	3	133.333	2	May'09-Mar'10	Jun'10-Apr'11			1.250.000	295.671	242.353	86.060	88.242	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
80	RT102	Buruh pabrik	5	100.000	2	May'09-Mar'10	Jun'10-Apr'11			1.250.000	231.798	189.998	22.187	35.887	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
81	RT103	Dagang	4	125.000	2	May'09-Mar'10	Jun'10-Apr'11			1.250.000	209.603	171.805	(8)	17.694	Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
82	RT104	Sopir	5	100.000	2	May'09-Mar'10	Jun'10-Apr'11			1.250.000	256.321	210.100	46.710	55.989	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
83	RT105	Dagang	6	83.333	2	May'09-Mar'10	Jun'10-Apr'11			1.250.000	240.734	197.323	31.123	43.212	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
84	RT106	Dagang	4	168.750	2	Dec'08-Oct'09	Mar'10-Jan'11			1.250.000	191.351	156.845	(18.260)	2.734	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
85	RT108	Dagang	4	200.000	2	Dec'08-Oct'09	Mar'10-Jan'11			1.250.000	205.568	168.499	(4.043)	14.388	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Produktif
86	RT109	Dagang	3	266.667	2	Dec'08-Oct'09	Mar'10-Jan'11			1.250.000	335.294	274.831	125.683	120.720	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
87	RT110	Dagang	3	200.000	2	Dec'08-Oct'09	Mar'10-Jan'11			1.250.000	421.948	345.859	212.337	191.748	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Produktif
<b>RATA-RATA</b>			<b>4</b>	<b>131.102</b>						<b>235.779</b>	<b>193.261</b>				<b>Miskin</b>	<b>Tidak Miskin</b>	<b>Tidak Miskin</b>	

Lampiran 6. Konsumsi perkapita perbulan dan Status Kemiskinan  
Kelompok Kontrol

No	Rumah Tangga	Pekerjaan	Jml Tangg.	Kons/kap /bl Baseline	Kons/kapita/bl Impact		Selisih Thd GK Jateng		Status Kemiskinan		
					Nominal	Riil	Nominal 2011	Riil 2007	Baseline	Impact	
										Nominal	Riil
1	RT001	Dagang	5	120.000	179.244	146.922	(30.367)	(7.189)	Miskin	Miskin	Miskin
2	RT002	Dagang	5	120.000	181.331	148.632	(28.280)	(5.479)	Miskin	Miskin	Miskin
3	RT003	Buruh Tani	5	110.000	177.910	145.828	(31.701)	(8.283)	Miskin	Miskin	Miskin
4	RT004	Dagang	3	200.000	255.987	209.825	46.376	55.714	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
5	RT005	Dagang	3	183.333	310.294	254.340	100.683	100.229	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
6	RT006	Buruh Tani	4	87.500	213.018	174.605	3.407	20.494	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
7	RT007	Buruh Tani	5	70.000	222.200	182.131	12.589	28.020	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
8	RT008	Buruh Tani	6	58.333	186.813	153.125	(22.799)	(986)	Miskin	Miskin	Miskin
9	RT009	Buruh Tani	3	130.000	278.639	228.393	69.028	74.282	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
10	RT010	Pengrajin Batubata	5	110.000	196.767	161.284	(12.844)	7.173	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
11	RT011	Buruh Tani	3	116.667	318.222	260.838	108.611	106.727	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
12	RT012	Buruh Tani	4	75.000	218.771	179.320	9.160	25.209	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
13	RT013	Buruh Tani	5	60.000	215.731	176.829	6.120	22.718	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
14	RT014	Buruh Tani	5	60.000	198.319	162.557	(11.292)	8.446	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
15	RT015	Buruh Tani	3	116.667	312.115	255.832	102.504	101.721	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
16	RT016	Dagang	4	125.000	272.744	223.561	63.133	69.450	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
17	RT017	Dagang	3	156.667	339.115	277.963	129.504	123.852	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
18	RT018	Dagang	3	163.333	225.643	184.953	16.032	30.842	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
19	RT019	Dagang	6	83.333	186.224	152.643	(23.387)	(1.468)	Miskin	Miskin	Miskin
20	RT020	Dagang	5	102.000	211.314	173.208	1.703	19.097	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
21	RT021	Guru ngaji	4	162.500	286.005	234.430	76.394	80.319	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
22	RT022	Buruh Tani	3	200.000	310.473	254.486	100.862	100.375	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
23	RT023	Buruh Pabrik	3	216.667	314.693	257.945	105.082	103.834	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
24	RT024	Penjahit	4	150.000	223.987	183.596	14.376	29.485	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
25	RT025	Tukang Batu	5	120.000	181.771	148.992	(27.840)	(5.119)	Miskin	Miskin	Miskin
26	RT026	Buruh Tani	5	120.000	130.171	106.698	(79.440)	(47.413)	Miskin	Miskin	Miskin
27	RT027	Dagang	4	150.000	267.071	218.911	57.460	64.800	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
28	RT028	Dagang	4	150.000	206.988	169.662	(2.623)	15.551	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
29	RT029	Buruh Tani	5	140.000	200.483	164.331	(9.128)	10.220	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
30	RT030	Dagang	3	216.667	248.116	203.374	38.505	49.263	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
31	RT031	Tukang Batu	4	200.000	227.551	186.517	17.940	32.406	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
32	RT032	Dagang	4	137.500	258.172	211.617	48.561	57.506	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
33	RT033	Bengkel	3	200.000	214.953	176.191	5.342	22.080	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
34	RT034	Dagang	3	166.667	369.056	302.505	159.445	148.394	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
35	RT035	Dagang	4	142.500	315.420	258.541	105.809	104.430	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
36	RT036	Buruh Tani	3	150.000	169.857	139.227	(39.754)	(14.884)	Miskin	Miskin	Miskin
37	RT037	Buruh Tani	2	245.000	308.375	252.766	98.764	98.655	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
38	RT038	Buruh Tani	4	100.000	216.464	177.430	6.853	23.319	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
39	RT039	Buruh Tani	4	147.500	306.688	251.383	97.077	97.272	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
40	RT040	Tukang Batu	4	125.000	306.818	251.491	97.207	97.380	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
41	RT041	Dagang	3	200.000	188.490	154.500	(21.121)	389	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
42	RT042	Dagang	5	120.000	138.793	113.765	(70.818)	(40.346)	Miskin	Miskin	Miskin
43	RT043	Dagang	6	100.000	99.786	81.791	(109.825)	(72.320)	Miskin	Miskin	Miskin
44	RT044	Dagang	3	200.000	118.475	97.111	(91.136)	(57.000)	Tidak Miskin	Miskin	Miskin
45	RT045	Dagang	7	85.714	172.496	141.390	(37.115)	(12.721)	Miskin	Miskin	Miskin
46	RT046	Buruh Tani	5	120.000	126.720	103.869	(82.891)	(50.242)	Miskin	Miskin	Miskin
47	RT047	Dagang	4	150.000	194.036	159.046	(15.575)	4.935	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
48	RT048	Buruh tani	4	150.000	148.284	121.544	(61.327)	(32.567)	Miskin	Miskin	Miskin
49	RT049	Bengkel	4	150.000	217.263	178.085	7.652	23.974	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
50	RT050	Buruh Tani	5	100.000	120.593	98.847	(89.018)	(55.264)	Miskin	Miskin	Miskin
51	RT051	Buruh Tani	3	166.667	193.321	158.460	(16.290)	4.349	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
52	RT052	Buruh Tani	2	250.000	327.134	268.143	117.523	114.032	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
53	RT053	Buruh Tani	1	500.000	542.738	444.867	333.127	290.756	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
54	RT054	Buruh Tani	4	125.000	179.865	147.431	(29.746)	(6.680)	Miskin	Miskin	Miskin
55	RT055	Buruh Tani	7	71.429	123.951	101.599	(85.660)	(52.512)	Miskin	Miskin	Miskin
56	RT056	Dagang	4	137.500	273.708	224.351	64.097	70.240	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
57	RT057	Dagang	4	125.000	285.097	233.686	75.486	79.575	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
58	RT058	Buruh Tani	7	100.000	182.975	149.979	(26.636)	(4.132)	Miskin	Miskin	Miskin
59	RT059	Buruh Tani	5	120.000	226.912	185.993	17.301	31.882	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
60	RT060	Dagang	5	100.000	239.879	196.622	30.268	42.511	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
61	RT061	Dagang	5	120.000	272.255	223.160	62.644	69.049	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin

62	RT062	Buruh Tani	4	125.000	204.810	167.877	(4.801)	13.766	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
63	RT063	Buruh Tani	5	120.000	228.460	187.262	18.849	33.151	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
64	RT064	Buruh Bangunan	3	200.000	249.755	204.717	40.144	50.606	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
65	RT065	Buruh Tani	7	64.286	164.560	134.885	(45.051)	(19.226)	Miskin	Miskin	Miskin
66	RT066	Tukang batu	6	116.667	201.304	165.003	(8.307)	10.892	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
67	RT067	Tukang becak	5	120.000	121.158	99.310	(88.453)	(54.801)	Miskin	Miskin	Miskin
68	RT068	Buruh Tani	4	125.000	176.848	144.958	(32.763)	(9.153)	Miskin	Miskin	Miskin
69	RT069	Tukang batu	6	116.667	174.441	142.984	(35.170)	(11.127)	Miskin	Miskin	Miskin
70	RT070	Buruh Tani	5	90.000	125.555	102.914	(84.056)	(51.197)	Miskin	Miskin	Miskin
71	RT071	Buruh Tani	5	90.000	131.859	108.081	(77.752)	(46.030)	Miskin	Miskin	Miskin
72	RT072	Buruh Tani	6	83.333	158.107	129.596	(51.504)	(24.515)	Miskin	Miskin	Miskin
73	RT073	Buruh Tani	5	90.000	149.559	122.590	(60.052)	(31.521)	Miskin	Miskin	Miskin
74	RT074	Buruh Pabrik	4	150.000	348.985	286.053	139.374	131.942	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
75	RT075	Serabutan	3	100.000	232.988	190.974	23.377	36.863	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
76	RT076	Serabutan	4	75.000	148.905	122.053	(60.706)	(32.058)	Miskin	Miskin	Miskin
77	RT077	Serabutan	4	75.000	204.863	167.921	(4.748)	13.810	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
78	RT078	Buruh Tani	3	116.667	168.071	137.763	(41.540)	(16.348)	Miskin	Miskin	Miskin
79	RT079	Buruh Tani	4	125.000	191.015	156.570	(18.596)	2.459	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
80	RT080	Buruh Tani	3	133.333	173.052	141.846	(36.559)	(12.265)	Miskin	Miskin	Miskin
81	RT081	Dagang	3	133.333	175.996	144.259	(33.615)	(9.852)	Miskin	Miskin	Miskin
82	RT082	Buruh Tani	3	133.333	180.393	147.863	(29.218)	(6.248)	Miskin	Miskin	Miskin
83	RT083	Buruh Tani	2	200.000	254.381	208.509	44.770	54.398	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
84	RT084	Buruh Tani	2	200.000	286.095	234.504	76.484	80.393	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
85	RT085	Buruh Tani	4	100.000	172.643	141.511	(36.968)	(12.600)	Miskin	Miskin	Miskin
86	RT086	Buruh Tani	2	200.000	291.643	239.052	82.032	84.941	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
87	RT087	Buruh Tani	3	116.667	173.616	142.308	(35.995)	(11.803)	Miskin	Miskin	Miskin
88	RT088	Buruh Tani	3	133.333	183.652	150.534	(25.959)	(3.577)	Miskin	Miskin	Miskin
89	RT089	Buruh Tani	5	70.000	144.246	118.234	(65.365)	(35.877)	Miskin	Miskin	Miskin
90	RT090	Buruh Tani	5	70.000	129.246	105.939	(80.365)	(48.172)	Miskin	Miskin	Miskin
91	RT091	Serabutan	3	100.000	292.905	240.086	83.294	85.975	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
92	RT092	Serabutan	6	66.667	172.664	141.528	(36.947)	(12.583)	Miskin	Miskin	Miskin
93	RT093	Buruh Tani	3	133.333	324.857	266.276	115.246	112.165	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
94	RT094	Buruh Tani	5	100.000	224.433	183.962	14.822	29.851	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
95	RT095	Dagang	3	166.667	340.087	278.760	130.476	124.649	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
96	RT096	Buruh Tani	5	120.000	135.062	110.706	(74.549)	(43.405)	Miskin	Miskin	Miskin
97	RT097	Dagang	4	162.500	209.211	171.484	(400)	17.373	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
98	RT098	Buruh Tani	4	162.500	179.481	147.115	(30.130)	(6.996)	Tidak Miskin	Miskin	Miskin
99	RT099	Buruh Tani	5	130.000	136.382	111.788	(73.229)	(42.323)	Miskin	Miskin	Miskin
100	RT100	Dagang	4	212.500	272.950	223.730	63.339	69.619	Tidak Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
101	RT101	Buruh Tani	5	80.000	179.602	147.215	(30.009)	(6.896)	Miskin	Miskin	Miskin
102	RT102	Buruh Tani	5	80.000	158.969	130.302	(50.642)	(23.809)	Miskin	Miskin	Miskin
103	RT103	Buruh Tani	4	100.000	207.509	170.089	(2.102)	15.978	Miskin	Miskin	Tidak Miskin
104	RT104	Buruh Tani	4	125.000	240.726	197.317	31.115	43.206	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
105	RT105	Buruh Tani	3	133.333	289.758	237.507	80.147	83.396	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
106	RT106	Buruh Tani	4	125.000	136.643	112.002	(72.968)	(42.109)	Miskin	Miskin	Miskin
107	RT107	Buruh Tani	4	150.000	149.464	122.512	(60.147)	(31.599)	Miskin	Miskin	Miskin
108	RT108	Buruh Tani	4	150.000	160.128	131.252	(49.483)	(22.859)	Miskin	Miskin	Miskin
109	RT109	Buruh Tani	4	150.000	184.122	150.920	(25.489)	(3.191)	Miskin	Miskin	Miskin
110	RT110	Buruh Tani	3	166.667	192.397	157.702	(17.214)	3.591	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
<b>RATA-RATA</b>				<b>134.236</b>	<b>216.999</b>	<b>177.868</b>			<b>Miskin</b>	<b>Tidak Miskin</b>	<b>Tidak Miskin</b>